SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah serta memperkuat tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah;

b. bahwa untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah, perlu melakukan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

5. Perangkat . . .

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RIPJ-PID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
7. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
9. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
10. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
11. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II . . .

BAB II

RIPJ-PID

Pasal 2

(1) RIPJ-PID memuat kebutuhan Riset dan Inovasi Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode pembangunan jangka menengah Daerah terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

(2) Kebutuhan Riset dan Inovasi Daerah yang tercantum dalam RIPJ-PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas produk unggulan Daerah dan isu permasalahan Daerah.

(3) RIPJ-PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 3

(1) RIPJ-PID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I berisi pendahuluan;
   b. bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah Riset dan Inovasi di Daerah;
   c. bab III berisi tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
   d. bab IV berisi analisis kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
   e. bab V berisi strategi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
   f. bab VI berisi Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah;
   g. bab VII berisi rencana aksi tahunan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
   h. bab VIII berisi penutup.

(2) RIPJ-PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

TEGUH WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah tertera dalam dokumen perencanaan pembangunan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan kebijakan pembangunan wajib dilandasi dengan riset dan inovasi. Hasil Riset sebagaimana tertera pada Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 menyebutkan bahwa hasil riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah (perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah).

Riset dan inovasi daerah dikuatkan dengan membangun suatu ekosistem pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Hal ini mengingat bahwa penguatan ekosistem riset dan inovasi merupakan penggerak utama dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Riset dan inovasi yang diarahkan sebagai landasan pembangunan daerah disusun secara sistematis dan komprehensif dalam bentuk rencana induk dan peta jalan pemajuan Iptek. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah (RIPJ-PID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah berfungsi, (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah; dan (3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, tujuan utama Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sangat ditentukan inovasi yang dilakukan wilayah tersebut. Untuk memacu inovasi diperlukan kreativitas suatu wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Sesuai dengan Visi Riset Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 adalah Indonesia Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Visi ini bermakna bahwa riset dijadikan motor utama untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang berdampak pada peningkatan daya saing bangsa.

Pasal 6 UU No 11 tahun 2019, menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional antara lain untuk menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan. Selanjutnya Pasal 41 menyatakan bahwa hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan di dalam Peraturan BRIN No 5 tahun 2023 bahwa hasil riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah tersebut meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa peran ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis

ilmu pengetahuan atau *knowledge based policy*; atau dalam bentuk yang lebih operasional disebut kebijakan berbasis bukti atau *evidence based policy*.

Terbitnya Perpres No 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat besar dalam kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional. Beberapa konsekuensi terbitnya Perpres tersebut terhadap kelembagaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) Iptek. Perangkat daerah pengampu urusan penunjang litbang berubah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) atau Bappelitbangda atau sebutan lainnya menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) apabila berupa perangkat daerah dalam bentuk mandiri, atau Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) apabila berupa perangkat daerah digabungkan dengan perangkat daerah urusan penunjang perencanaan.

Pasal 67 Perpres No 78 tahun 2021 menyatakan bahwa BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembang-an, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi daerah (RIPJ-PID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJ-PID) Kabupaten Pati tahun 2024-2029 merupakan dokumen yang memberikan arah pemanfaatan hasil riset dan inovasi guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan BRIN Nomor 5 tahun 2023. Dokumen RIPJ-PD ini akan menjadi salah satu dokumen yang menjadi masukan bagi penyusunan dokumen rancangan awal RPJMD 2025-2029 Kabupaten Pati. Adapun sasaran RIPJ-PID Kabupaten Pati untuk memberikan

arah pelaksanaan riset dan inovasi daerah serta pemanfaatannya untuk mendukung target kinerja Bupati Pati dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2025-2029. Oleh karena itu, penyusunan RIPJ-PID yang tepat waktu dan berkualitas menjadi urgen untuk dilaksanakan.

Substansi pokok yang tercantum di dalam dokumen RIPJ-PID terdiri atas produk unggulan daerah dan permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Pati selama tahun 2025-2029.

Pemerintah Kabupaten Pati telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045 merupakan salah satu acuan penyusunan RIPJ-PID Kabupaten Pati, yang hasil akhirnya merupakan masukan untuk penyusunan RPJMD. Dengan tersusunnya dokumen RIPJ-PID diharapkan hasil riset dan inovasi dapat mengakselerasi pencapaian prioritas pembangunan di Kabupaten Pati.

Proses penyusunan RIPJ-PD Kabupaten Pati tahun 2025-2029, diawali dengan melakukan pemetaan terhadap produk-produk unggulan daerah dan isu-isu strategis atau permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Pati, serta berdasarkan isu strategis yang tercantum di dalam rancangan akhir RPJPD 2025-2045.

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045, pada tahap lima tahun pertama (2025-2029) diarahkan untuk penguatan landasan transformasi, yaitu perbaikan dan peningkatan produktivitas dan kemudahan akses ke sumber daya ekonomi unggulan berbasis kelestarian alam, penguatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari (pengendalian pencemaran air dan udara), peningkatan rehabilitasi lahan kritis, pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan terbangun, peningkatan tata kelola sumber daya air sebagai upaya menjaga ketersediaan air, pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat, serta penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana, serta pemantapan layanan infrastruktur yang memenuhi standar dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Komoditas atau Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pati untuk dikembangkan tahun 2025-2029 berdasarkan hasil kajian serta sebagaimana hasil *Focus Group Discussion* (FGD) serta berita acara adalah sebagai berikut:

1. Ubi Kayu
2. Kelapa Kopyor

3. Jeruk Pamelo
4. Garam
5. Nila Salin

Berdasarkan uraian prioritas pembangunan yang tercantum di dalam RPJPD 20252-209 serta berdasarkan hasil serangkaian FGD, diusulkan permasalahan utama pembangunan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah:

1. SDM yang Berdaya Saing
   - Kemiskinan
   - Konsumsi Pangan
   - Stunting
   - Kematian Ibu
   - Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
2. Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan
   - Pajak Daerah
   - Pengangguran
   - Kewirausahaan
   - Pengolahan Sampah
   - Kualitas Lingkungan Hidup
   - Kebencanaan
   - Akses Hunian Layak
   - Infrastruktur Jalan
   - Air Minum Perpipaan
   - Infrastruktur Irigasi
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Adaptif
   - Reformasi Birokrasi
   - Kualitas Pelayanan Publik

1.2. Dasar Hukum

Regulasi yang menjadi acuan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Darah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Tujuan:

- Menentukan arah kebijakan dan tahapan penguatan riset dan inovasi di Kabupaten Pati yang tertuang dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Pati tahun 2025-2029;
- Memberikan usulan program dan kegiatan riset dan inovasi yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Pati selama periode 2025-2029 sesuai dengan pentahapan pada Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Pati tahun 2025-2029;

- ❖ Memberi masukan bagi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pati tahun 2025-2029.

Sasaran:

- ❖ Tersusunnya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Pati tahun 2025-2029;
- ❖ Tersusunnya rencana aksi program dan kegiatan tahunan untuk percepatan pencapaian target RPJMD tahun 2025-2029;
- ❖ Tersusunnya arah kebijakan pembangunan riset dan inovasi bagi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pati tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Dokumen

Dokumen Rancangan RIPJPID Kabupaten Pati tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan dan Sasaran

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH RISET DAN INOVASI DI DAERAH

1. Gambaran umum daerah: aspek geografi; kependudukan; ketenagakerjaan; aspek kesejahteraan masyarakat; produk unggulan daerah.
2. Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah yang meliputi: kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Tantangan dan peluang yang penting dan sangat menentukan dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang.

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Analisis kesenjangan (*gap analysis*) kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan kondisi ekosistem Riset dan Inovasi saat ini dan kondisi yang diharapkan, terutama terkait pengembangan unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah.

BAB V STRATEGI PENGEMBANGAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Berisi tentang : Strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan strategi pengembangan produk unggulan daerah

dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Berisi tentang : Peta jalan sasaran strategis dan fokus pengembangan PUD dan Isu permasalahan melalui penguatan pada seluruh elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah.

BAB VII RENCANA AKSI TAHUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Berisi tentang : uraian kegiatan rencana program yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang : ringkasan isi dari dokumen rancangan teknokratik rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Daerah

2.1.1.Aspek Geografis

Kabupaten Pati secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian Timur Laut. Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 157.324 (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) hektar atau 1.573,324 km^2 (Perubahan RTRW Kab. Pati 2010-2030, 2020) dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang;
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora;
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara.

Secara astronomis, Kabupaten Pati terletak antara 6°25′-7°00′ Lintang Selatan dan antara 100°50′-111°15′ Bujur Timur. Gambaran kekhasan posisi Kabupaten Pati yang berpotensi memberikan keuntungan komparatif yaitu posisi strategis di Jalur Pantura yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Selain itu, Kabupaten Pati juga memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 60 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap.

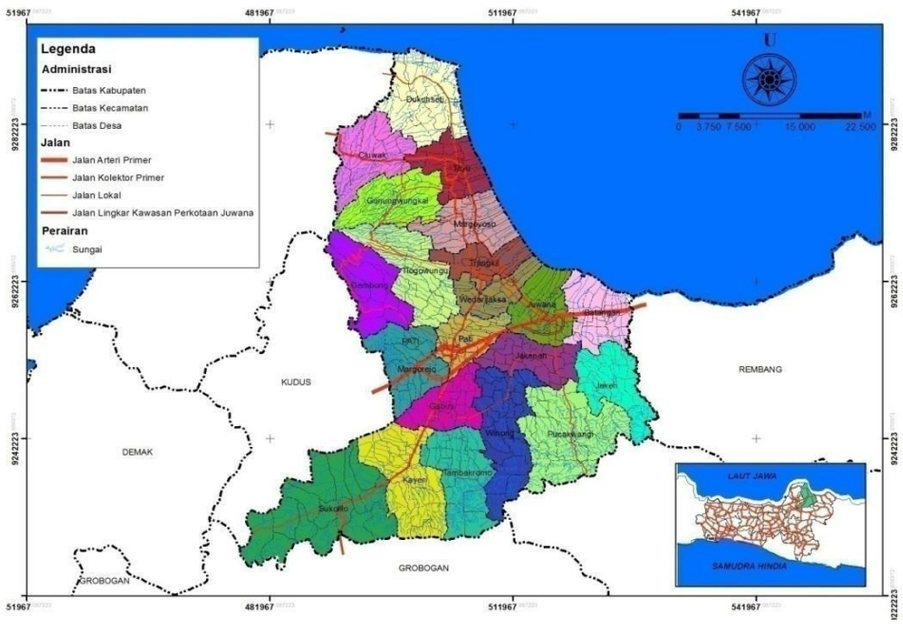

Sumber: RTRW Kab. Pati 2010-2030, 2021.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kecamatan Kabupaten Pati

Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, 1.485 RW, dan 7.556 RT sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pati Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Desa	Kelurahan	RW	RT
1	Sukolilo	15.874	16	-	86	480
2	Kayen	9.603	17	-	70	434
3	Tambakromo	7.247	18	-	62	343
4	Winong	9.994	30	-	82	471
5	Pucakwangi	12.283	20	-	68	332
6	Jaken	6.852	21	-	83	311
7	Batangan	5.066	18	-	53	274
8	Juwana	5.593	29	-	87	357
9	Jakenan	5.304	23	-	58	341
10	Pati	4.294	29	5	100	570
11	Gabus	5.551	24	-	74	386
12	Margorejo	6.181	18	-	65	328
13	Gembong	6.730	11	-	85	276
14	Tlogowungu	9.446	15	-	71	321
15	Wedarijaksa	4.085	18	-	58	339
16	Trangkil	4.284	16	-	60	374
17	Margoyoso	5.997	22	-	80	333
18	Gunungwungkal	6.180	15	-	45	241
19	Cluwak	6.931	13	-	77	308
20	Tayu	4.759	21	-	75	395
21	Dukuhseti	8.159	12	-	46	345
	Jumlah	**150.368**	**406**	**5**	**1.485**	**7.556**

Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka (2025)

Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Sukolilo mencakup 10,56% dari total wilayah Kabupaten Pati. Selain Kecamatan Sukolilo, kecamatan dengan wilayah yang luas adalah Kecamatan Pucakwangi mencapai 8,17% total luas wilayah Kabupaten Pati. Sementara itu, kecamatan dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Pati dengan cakupan luas wilayah berturut-turut 2,72% dan 2,83%. Wilayah dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Winong (30 desa), sedangkan kecamatan dengan jumlah desa tersedikit adalah Kecamatan Gembong (11 desa). Selanjutnya, Kecamatan Pati merupakan wilayah dengan jumlah RW dan RT terbanyak, sedangkan gunungwungkal menjadi kecamatan dengan jumlah RW dan RT tersedikit.

Klimatologi; Secara umum kondisi iklim di wilayah Kabupaten Pati termasuk dalam tipe tropis dengan temperatur udara terendah adalah 230C dan tertinggi adalah 390C. Secara letak geografisnya, Kabupaten Pati beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering.

Kabupaten Pati mempunyai rata-rata curah hujan pada tahun 2018 sebanyak 115,32 mm dengan 78 hari hujan.

Topografi; Kabupaten Pati dilihat ketinggiannya dari permukaan laut, wilayah kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Tlogowungu dengan ketinggian > 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), seluas masing-masing 90 ha, 735 ha, 358 ha, dan 238 ha. Untuk ketinggian 100 – 500 mdpl juga terdapat di keempat kecamatan tersebut selain itu juga terdapat di Kecamatan Kayen, Pucakwangi, Sukolilo, dan Tambakromo yang berada di selatan wilayah Kabupaten Pati yang merupakan wilayah pegunungan kapur. Wilayah kecamatan lain rata-rata berada di ketinggian 0 – 7 mdpl. Kabupaten Pati berdasarkan kondisi kemiringannya terbagi menjadi 5 (lima) kategori. Pada umumnya tergolong kemiringan relatif datar (dominan: 0%-8%), seluas kurang lebih 122.527 hektar atau 78% dari total keseluruhan wilayah kabupaten. Sedangkan wilayah dengan kemiringan 8% hingga 15% seluas 18.101 hektar atau 12% dari total keseluruhan, wilayah dengan kemiringan lereng 15% hingga 25% seluas 11.657 hektar atau 7% dari total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pati. Wilayah dengan kemiringan lereng yang paling curam atau lebih dari 45% seluas 1.972 hektar atau sekitar 1% dari total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pati yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal dan Tlogowungu.

Geologi; Keadaan geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Pati berupa sesar dan kubah. Daerah ini merupakan bagian dari antiklinorium rembang dengan sumbu antiklin dan siklin yang mempunyai arah barat-timur dan barat laut-tenggara. Struktur sesar normal dengan arah timur laut-barat daya yang mensesar litologi batu gamping pada Formasi Bulu. Struktur Kubah dijumpai di daerah Pati Ayam, merupakan suatu diapir. Diduga terbentuknya kubah ini berkaitan dengan proses tektonika setempat sebelum terjadinya kegiatan Gunung Api Muria. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pati yaitu Aluvial, Grumusol, Latosol, Litosol, Mediteran dan Regosol. Didominasi jenis tanah aluvial, latosol, dan mediteran, dimana jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburan cukup tinggi.

Hidrologi; Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup besar jumlahnya. Di Kabupaten Pati terdapat 93 buah sungai/kali yang tersebar merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai di kabupaten ini

berpola kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Namun, pada musim kemarau banyak dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap. Ada beberapa sungai yang memiliki sumber mata air, akan tetapi banyak juga yang tidak, yaitu bersumber dari aliran drainase kota saja. Mata air di Kabupaten Pati pada umumnya bersumber dari mata air Gunung Muria, khususnya sungai-sungai yang terdapat pada wilayah Utara Kabupaten Pati. Sungai-sungai yang ada di suatu daerah berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan dan penyalur air, sedimen, unsur hara melalui sistem sungai dan mengeluarkannya melalui outlet tunggal. Apabila turun hujan di daerah tersebut, maka air hujan yang turun akan mengalir ke sungai-sungai yang ada di sekitar daerah yang dituruni hujan. Sistem sungai yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya disebut dengan Daerah Aliran Sungai (DAS).

2.1.2.Kependudukan

Selama periode 2020 hingga 2024, penduduk Kabupaten Pati mengalami pertumbuhan dengan tingkat pertumbuhan yang fluktuatif, mengalami penurunan di tahun 2023, namun kembali meningkat di tahun 2024. Gambaran jumlah penduduk dan laju pertambahan penduduk Kabupaten Pati selama periode 2020 hingga 2024 ditampilkan pada grafik berikut.

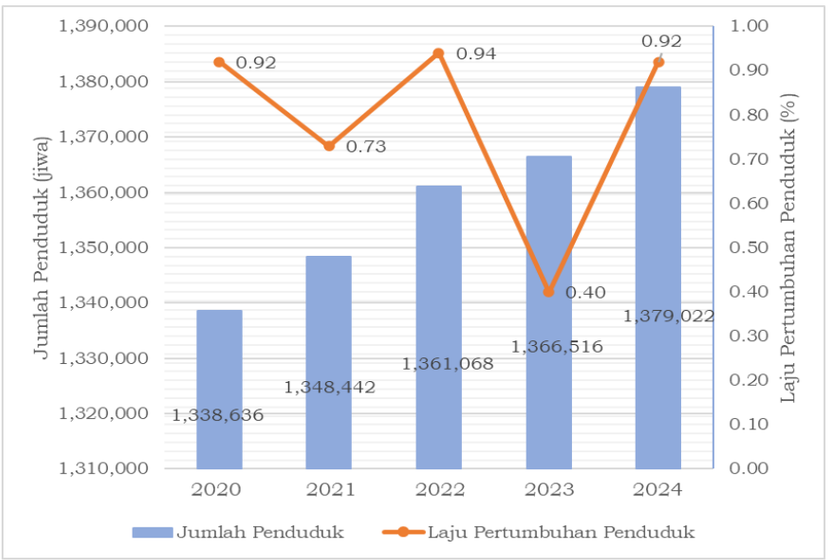

Sumber: Disdukcapil diolah (2025)

Gambar 2.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertambahan Penduduk Kabupaten Pati Tahun 2020-2025

Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pati sudah mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa dan akan terus menunjukkan peningkatan di tahun-tahun

selanjutnya. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, akan terjadi peningkatan kebutuhan akan ruang aktivitas yang berpotensi meningkatkan alih fungsi lahan, peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana, peningkatan kebutuhan akan pangan dan air. Namun alih fungsi lahan dapat mengancam keberlanjutan lahan pertanian pangan dan lahan resapan yang penting bagi keberlanjutan penyediaan air bersih. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya untuk penghematan lahan sehingga kebutuhan ruang aktivitas tertap terpenuhi namun laju alih fungsi lahan dapat dikendalikan.

Penduduk Kabupaten Pati tersebar di 21 kecamatan dengan intensitas yang berbeda. Persebaran penduduk di setiap kecamatan tahun 2020-2024 ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Persebaran Penduduk per-Kecamatan di Kabupaten Pati Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sukolilo	91.905	92.834	93.467	94.997	96.239
2	Kayen	79.566	80.475	81.004	82.194	83.244
3	Tambakromo	56.519	57.066	57.302	57.945	58.397
4	Winong	64.616	65.107	65.353	66.101	66.735
5	Pucakwangi	48.389	48.828	49.030	49.687	50.207
6	Jaken	46.503	46.792	46.891	47.414	47.883
7	Batangan	45.129	45.344	45.447	45.864	46.175
8	Juwana	96.542	96.860	96.862	97.695	98.403
9	Jakenan	48.294	48.673	48.845	49.473	49.983
10	Pati	110.837	111.200	111.366	111.610	112.168
11	Gabus	63.249	63.704	64.411	64.648	65.029
12	Margorejo	62.951	63.371	64.244	64.455	65.154
13	Gembong	47.799	48.209	48.941	49.237	49.795
14	Tlogowungu	54.920	55.439	56.289	56.618	57.388
15	Wedarijaksa	64.412	64.764	65.266	65.439	66.195
16	Trangkil	63.832	64.236	64.339	64.502	64.962
17	Margoyoso	74.647	75.251	75.686	75.892	76.465
18	Gunungwungkal	38.272	38.659	38.938	39.059	39.469
19	Cluwak	47.921	48.282	48.676	48.907	49.443
20	Tayu	70.516	71.144	71.618	71.869	72.290
21	Dukuhseti	61.817	62.204	62.557	62.910	63.398
	Kab. Pati	**1.338.636**	**1.348.442**	**1.361.068**	**1.366.516**	**1.379.022**

Sumber: Disdukcapil Kab. Pati (2023)

Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pati. Tahun 2024, laju pertambahan penduduk Kabupaten Pati sebesar 0,92% hampir sama dengan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 dan 2022. Wilayah yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Pati dengan persentase 0,50%. Selain Kecamatan Pati, Kecamatan Gabus dan Kecamatan Tayu juga menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif rendah masing-masing sebesar 0,59%. Sementara itu, beberapa kecamatan lain menunjukkan laju pertumbuhan lebih dari satu persen, dimana peningkatan jumlah penduduk tertinggi terjadi

di Kecamatan Tlogowungu dan Sukolilo dengan nilai laju pertumbuhan penduduk masing-masing sebesar 1,36%. Selain kedua kecamatan tersebut, Kecamatan Kayen juga mencatatkan laju pertumbuhan yang cukup tinggi mencapai 1,31%.

Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar wilayah memiliki rasio penduduk berdasarkan gender lebih dari satu yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki yang lebih tinggi berada di Kecamatan Kayen, Tlogowungu, dan Margoyoso. Sementara itu beberapa wilayah menunjukkan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin kurang dari satu yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Wilayah dengan rasio penduduk terendah adalah Kecamatan Jakenan dengan rasio 0,952. Selain Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken dan Pati juga memiliki perbedaan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang cukup tinggi, yaitu 0,956 dan 0,969.

2.1.3.Ketenagakerjaan

TPAK Daerah dan Nasional memiliki tren yang meningkat. Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tren peningkatan terjadi sejak Tahun 2020, sedangkan Kabupaten Pati terjadi setelah pandemic Tahun 2020. Meningkatnya persentase TPAK memberikan indikasi semakin banyaknya penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja dan tentunya harus pula dibarengi dengan semakin meningkatnya kualitas dan daya saing SDM tenaga kerja (khususnya bagi daerah), lebih-lebih saat ini merupakan momentum menuju puncak bonus demografi (penduduk usia produktif > 60%) yang diprediksi akan terjadi di awal tahun 2030 an. Rasio penduduk usia produktif Kabupaten Pati saat ini sekitar 70% dengan rasio ketergantungan di angka ±43%. Semakin tinggi rasio ketergantungan penduduk, berarti ada potensi beban ekonomi keluarga yang harus ditanggung semakin besar dan begitu sebaliknya.

Mendasarkan TPAK di Kabupaten Pati menurut jenis kelamin (gender), secara empiris masih didominasi oleh kelompok laki-laki yang rata-rata mencapai ± 83%, sedangkan perempuan hanya ± 53%.

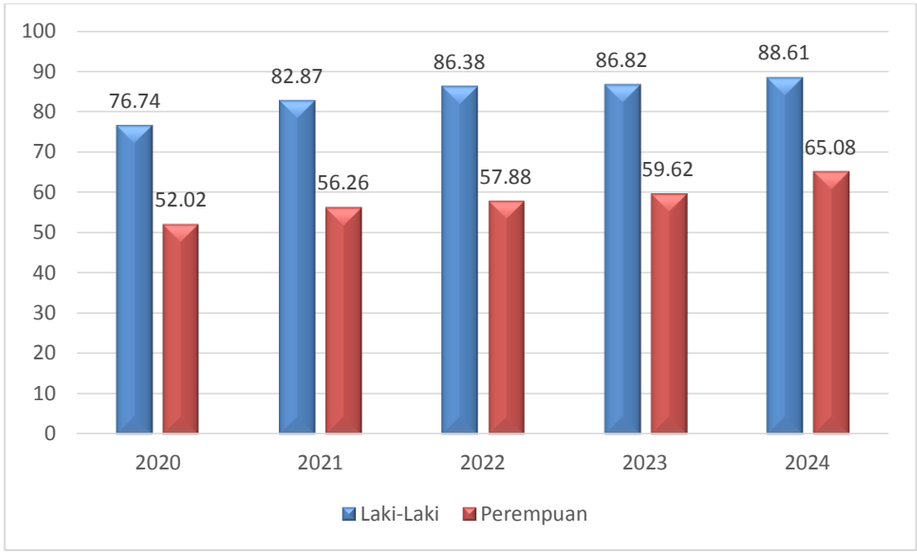

Gambar 2.3. TPAK Kabupaten Pati Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024

Selisih antara angkatan kerja dengan penduduk bekerja merupakan penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran. Gambaran jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pati selama lima tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Pati dalam kurun 6 (enam) tahun terakhir cenderung miliki angka yang paling rendah dibandingkan TPT tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Berikut tabel perbandingan TPT secara lengkap.

Tabel 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Kab. Pati		Jateng		Nasional	
		Realisasi	r	Realisasi	r	Realisasi	r
1	2020	4,74	1	6,48	1,99	7,07	1,79
2	2021	4,6	-0,14	5,95	-0,53	6,49	-0,58
3	2022	4,45	-0,15	5,57	-0,38	5,86	-0,63
4	2023	4,29	-0,14	5,13	-0,53	5,32	-0,58
5	2024	3,87	-0,42	4,78	-0,35	4,91	-0,41

Sumber : BPS 2020 – 2024 (data diolah)

Akibat pandemi, kasus pengangguran meningkat cukup tajam dan pasca pandemi secara perlahan semakin turun. Hingga Tahun 2024, TPT Kabupaten Pati tercatat paling rendah dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa kontribusi penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Pati cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

2.1.4.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pasca selesainya pandemi, pada tahun 2021, perekonomian cenderung mulai pulih (positif) namun dengan pertumbuhan yang relatif lambat dan kembali normal pada kisaran 5%. Sebagai gambaran untuk perbandingan, berikut grafik pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati Tahun 2020-2024.

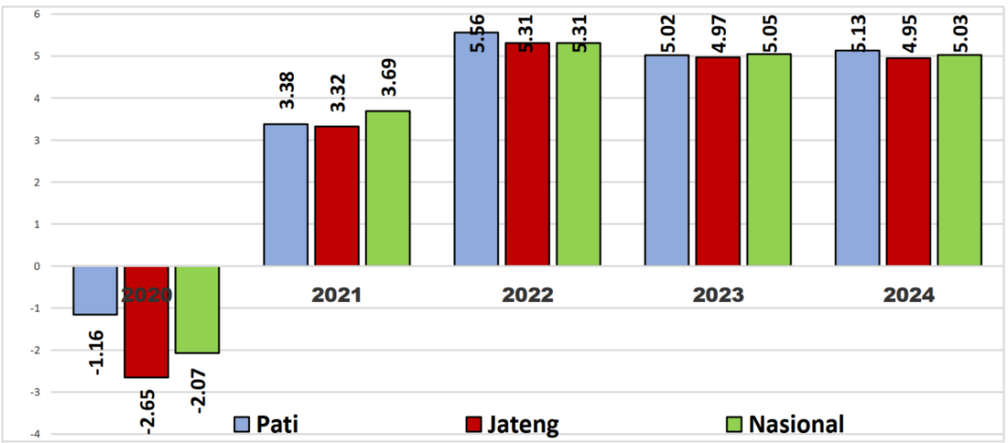

Gambar 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Kinerja ekonomi Kabupaten Pati dua tahun setelah pandemi tumbuh signifikan berada di atas pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yaitu sebesar 5,56% atau tumbuh lebih tinggi 0,25 persen poin dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kinerja ekonomi sektor unggulan utamanya yang banyak berperan memberikan dorongan positif karena mampu tumbuh lebih besar dari tahun sebelumnya (tahun 2022 terhadap 2021) antara lain sector pertanian (naik 4,57 persen poin); industry pengolahan (naik 1,40 persen poin); penyediaan akomodasi dan makan minum (naik 8,01 persen poin), d) jasa pendidikan (naik 1,87 persen poin), serta sector jasa yang lain yang juga tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati cenderung selalu di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, bahkan ketika terjadi Pandemi Covid19 di Tahun 2020 dimana terjadi kontraksi ekonomi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian Kabupaten Pati 2024 tampak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, baik Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah justru mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023. Efek ekonomi global secara empirik berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi dalam negeri. Perlambatan ekonomi

berimplikasi pada daya serap tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan pendapatan dan distribusinya.

Sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Pati adalah sektor atau lapangan usaha Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, dan Akomodasi Makan Minum. Berikut rasio PDRB sektor unggulan.

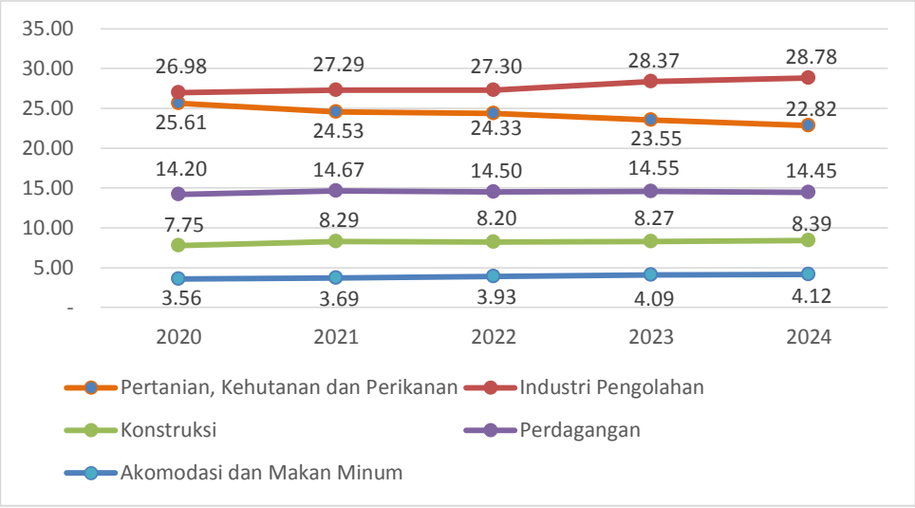

Gambar 2.5. Rasio PDRB Lapangan Usaha Utama/Unggulan Kabupaten Pati Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pati (2025)

Sektor unggulan dengan rasio dan kontribusi PDRB tertinggi adalah sektor industri pengolahan, disusul oleh sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan akomodasi makan minum. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 terlihat bahwa kontribusi sektor industri, konstruksi dan akomodasi makan minum mengalami kecenderungan peningkatan sementara sektor pertanian memiliki kecenderungan penurunan. Adapun sektor perdagangan berfluktuasi tipis namun kondisi tahun 2024 cenderung meningkat dibandingkan tahun 2020. Sebagai Bumi Mina Tani, penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB perlu menjadi perhatian sehingga diperlukan program-program yang dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan meningkatkan kembali kontribusinya terhadap PDRB.

Dalam hal tren pertumbuhan, berikut adalah gambaran tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati pada 5 (lima) lapangan usaha utama/sektor unggulan.

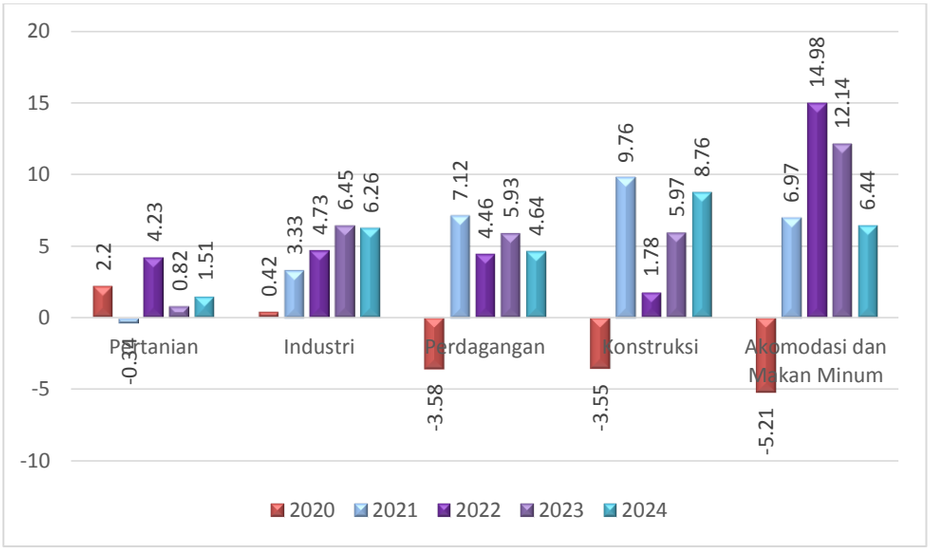

Gambar 2.6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati Pada Lapangan Usaha Utama/Unggulan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pati (2025)

Dari kelima sektor unggulan Kabupaten Pati, sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dalam tahun 2020-2024 adalah sektor akomodasi dan makan minum, disusul sektor konstruksi, industri, perdagangan, dan pertanian.

Secara umum, sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan masih menjadi tiga sektor dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Pati. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja, dengan pertanian dan industri pengolahan tercatat menyerap sekitar 50% atau sekitar 805.928 orang dari total penduduk bekerja (BPS Pati, 2025).

Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi yang dihitung dari aspek pengeluaran masyarakat masih menjadi permasalahan yang harus terus ditangani. Angka kesenjangan diukur menggunakan Rasio Gini. Berikut grafik perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional.

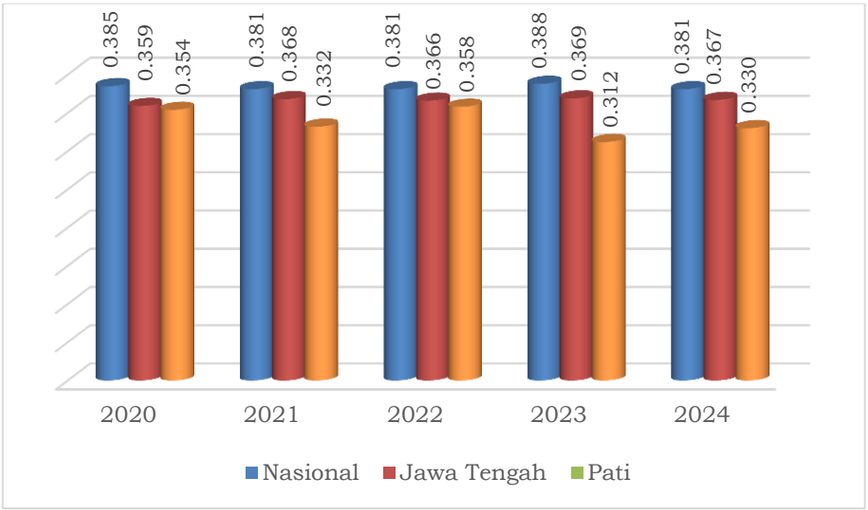

Gambar 2.7. Rasio Gini Tahun 2020–2024
Sumber : BPS Kabupaten Pati (2025)

Tahun 2020-2024 Kabupaten Pati memiliki angka Rasio Gini yang fluktuatif, namun memiliki angka yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan nasional dan provinsi. Secara teoritis, semakin tinggi nilai Rasio Gini, maka ekonomi semakin timpang dan sebaliknya. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya untuk menurunkan tingkat kesenjangan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan asksesibilitas.

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin baik secara nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten Pati pada kurun tahun 2020-2024 meskipun mengalami fluktuasi namun juga menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Dengan berbagai intervensi, angka dan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 sebanyak 127,40 ribu jiwa (9,52%) dapat diturunkan menjadi 116,84 ribu jiwa (8.47%) pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk miskin yang dapat dientaskan sebanyak 10.560 orang. Kontribusi jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati terhadap jumlah penduduk miskin Jawa Tengah juga menurun dari 3,2% pada tahun 2020 menjadi 3,15%. Kondisi kinerja penurunan kemiskinan menunjukkan perbaikan dengan menurunnya jumlah kemiskinan dan menunjukkan adanya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Pati.

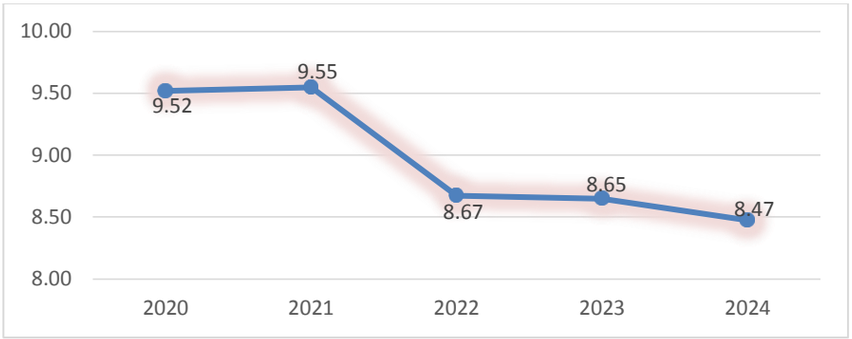

Gambar 2.8. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2020-2024 (%)
Sumber: RPJMD (2025)

Dalam hal kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

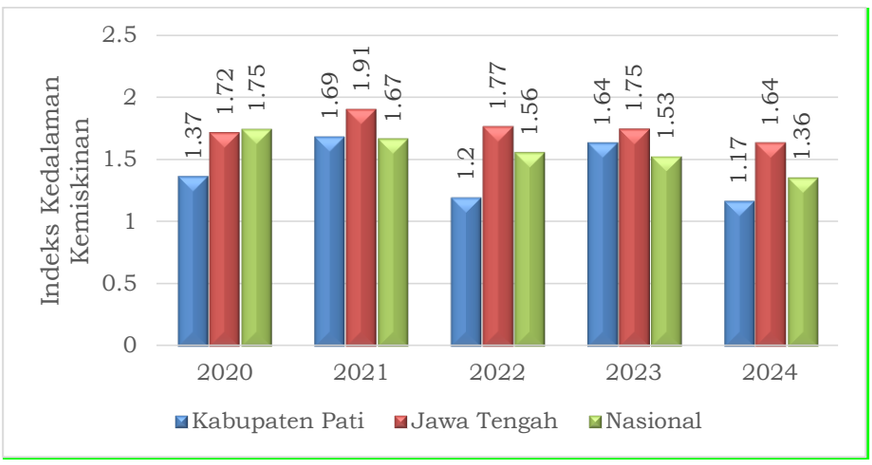

Gambar 2.9. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020-2024

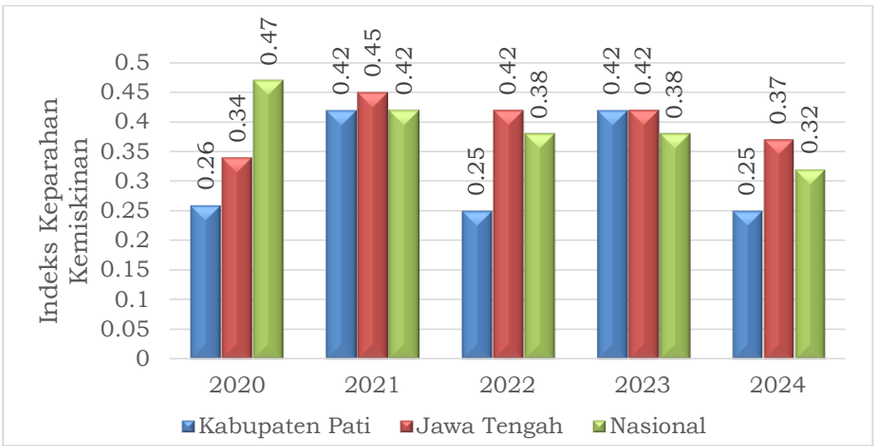

Gambar 2.10. Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2020-2024

Selama lima tahun terakhir, kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Pati relatif lebih baik dibandingkan kedalaman kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional. Nilai kedalaman dan keparahan kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2021 pada saat pandemi Covid. Pada tahun 2023, akibat inflasi yang cukup tinggi, Kabupaten Pati kembali mengalami peningkatan

kedalaman dan keparahan kemiskinan dengan kedalaman kemiskinan melebihi Nasional dan kedalaman kemiskinan sama dengan Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, dengan berbagai intervensi, kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Pati dapat diturunkan dan menjadi yang terendah selama lima tahun terakhir dan lebih baik dibandingkan kedalaman kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari suatu wilayah. IPM diukur dari tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Aspek Kesehatan terwakili oleh Angka Harapan Hidup (AHH). Aspek Pendidikan direpresentasikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sementara aspek Ekonomi terwakili oleh Pengeluaran Perkapita.

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Pati mampu meningkatkan kualitas pembangunan yang ditunjukkan oleh tren peningkatan IPM. Di tahun 2024, IPM Kabupaten Pati adalah 74,1 dimana capaian tersebut melebihi target pembangunan tahun 2024, lebih tinggi dari IPM Jawa Tengah, namun lebih rendah dibandingkan IPM Nasional.

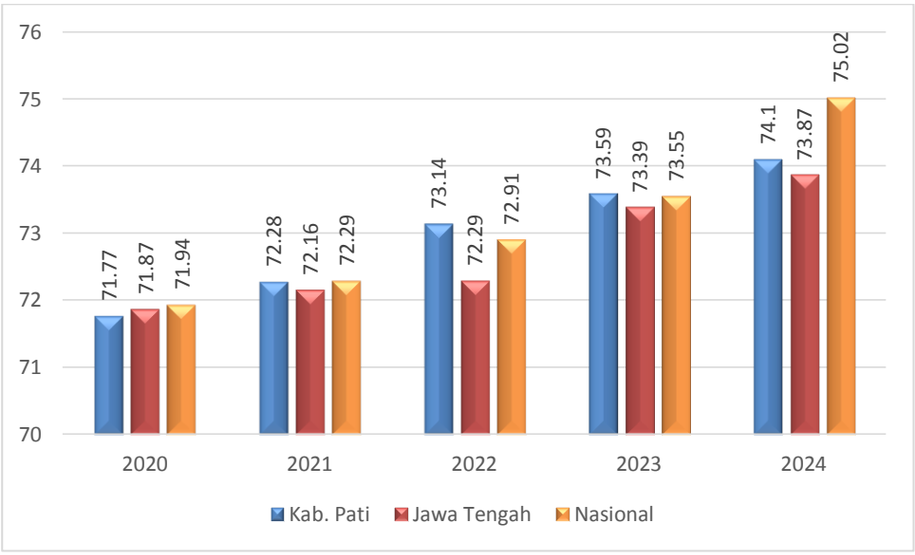

Gambar 2.11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pati (2025)

Di tahun 2020, capaian IPM Kabupaten Pati masih lebih rendah dibandingkan IPM Jawa Tengah dan Nasional. Tahun 2022, IPM Kabupaten meningkat sehingga mampu melampaui IPM Jawa Tengah, namun masih lebih rendah dibandingkan IPM Nasional. Di periode selanjutnya hingga tahun 2023, IPM Kabupaten Pati kembali meningkat hingga melampaui IPM Jawa Tengah dan Nasional. Akan tetapi, di tahun 2024, capaian IPM Kabupaten kembali

lebih rendah dibandingkan IPM Nasional, namun masih lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Tengah.

Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat dilakukan terus menerus dari tahun ke tahunnya. Upaya-upaya tersebut dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Berikut ini adalah jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di Kabupaten Pati.

Tabel 2.4. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pati Tahun 2024

Indikator	Jumlah
1. Jumlah Fasilitas Kesehatan :	262
a. Rumah Sakit	12
b. Poliklinik	47
c. Puskesmas	29
d. Puskesmas Pembantu	41
e. Apotik	133
2. Jumlah Tenaga Kesehatan :	4.839
a. Tenaga Medis	695
b. Tenaga Psikologi Klinis	12
c. Keperawatan	2276
d. Tenaga Kebidanan	1154
e. Tenaga Kefarmasian	290
f. Tenaga Kesehatan Masyarakat	154
g. Tenaga Kesehatan Lingkungan	60
h. Tenaga Gizi	98
i. Tenaga Keterapian	100

Sumber : BPS Kabupaten Pati (2025)

Dengan penambahan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan dan akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, meskipun telah dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan secara jumlah, kualitas pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan baik melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana deteksi dan pengobatan penyakit, ketersediaan obat, maupun kualitas seluruh tenaga pelayanan kesehatan. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Umur Harapan Hidup (UHH) pada saat lahir adalah usia rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan seseorang sejak lahir. UHH Kabupaten Pati dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Umur Harapan Hidup		
		Kab. Pati	Jateng	Nasional
1	2020	76,22	74,39	73,37
2	2021	76,27	74,49	73,46
3	2022	76,32	74,58	73,7
4	2023	76,39	74,69	73,93
5	2024	76,56	74,91	74,15

Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2025

Gambar 2.12. Perubahan Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 2021-2024
Sumber : BPS Kabupaten Pati (2025)

UHH Kabupaten Pati selama periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas SDM pada aspek kesehatan di Kabupaten Pati lebih baik dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Namun demikian, peningkatan UHH juga menjadi tantangan bagi pembangunan di Kabupaten Pati, karena berpotensi meningkatkan angka ketergantungan serta pembiayaan di bidang kesehatan karena kerentanan kelompok usia tua terhadap beberapa masalah kesehatan.

Salah satu fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan adalah prevalensi stunting pada balita. Gambaran kondisi stunting pada balita di Kabupaten Pati dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

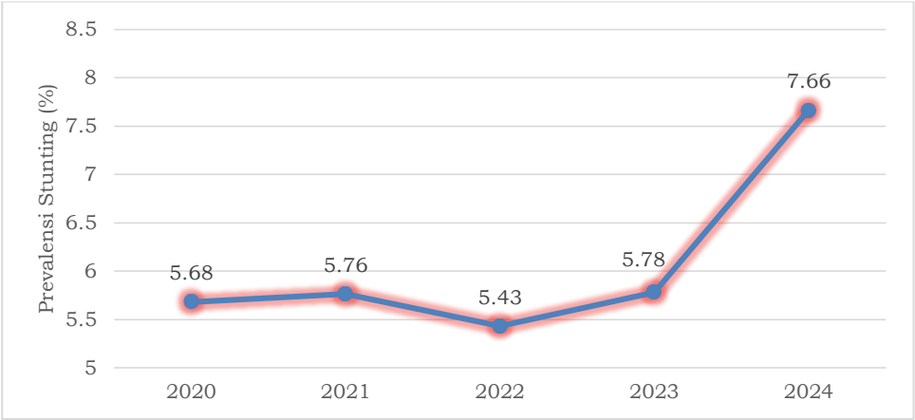

Gambar 2.13. Prevalensi Stunting Kabupaten Pati Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Pati dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini menandakan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan untuk penanganan stunting belum memberikan hasil yang optimal.

Pendidikan

Salah satu indikator kualitas SDM aspek pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah dapat didedfinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. Selama periode 2020 hingga 2024, RLS Kabupaten Pati mengalami tren peningkatan, sebagaimana RLS Jawa Tengah dan Nasional. Lebih lanjut, di tahun 2024, capaian RLS Kabupaten Pati juga melampaui target pembangunan di tahun tersebut. Gambaran RLS Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah		
		Kab. Pati	Jawa Tengah	Nasional
1	2020	7,44	7,69	8,48
2	2021	7,48	7,75	8,69
3	2022	7,79	7,93	8,69
4	2023	7,80	8,01	8,77
5	2024	7,82	8,02	8,85

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Selama lima tahun terakhit, tren RLS Kabupaten Pati adalah lebih rendah dibandingkan RLS Jawa Tengah dan Nasional. Masih rendahnya RLS Kabupaten Pati utamanya didominasi oleh penduduk usia tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah bahkan tidak bersekolah. Hal ini lah yang juga

membuat upaya peningkatan kepesertaan kesetaraan pendidikan menjadi tidak optimal dan menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan RLS.

Indikator kualitas SDM pada aspek pendidikan selanjutnya adalah Harapan Lama Sekolah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, HLS Kabupaten Pati selalu menunjukkan peningkatan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
		Kab.Pati	Jawa Tengah	Nasional
1	2020	12,65	12,70	12,98
2	2021	12,94	12,77	13,08
3	2022	12,95	12,81	13,10
4	2023	12,96	12,85	13,16
5	2024	12,98	12,86	13,21

Sumber: BPS Kabupaten Pati (2025)

Di tahun 2020, HLS Kabupaten Pati masih lebih rendah dibandingkan HLS Jawa Tengah dan Nasional. Namun sejak tahun 2021, HLS Kabupaten Pati meningkat hingga mampu melampaui HLS Jawa Tengah, namun masih di bawah HLS Nasional. Selama lima tahun terakhir, HLS Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,114 tahun. Rata-rata tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata peningkatan HLS Jawa Tengah dan Nasional. Peningkatan HLS tertinggi terjadi di tahun 2022 mencapai 0,29 tahun. Selanjutnya, di tahun berikutnya, peningkatan HLS Kabupaten Pati mengalami penurunan bahkan relatif lebih rendah dibandingkan peningkatan HLS Jawa Tengah dan Nasional. Di tahun 2024, HLS Kabupaten Pati hanya meningkat 0,02 tahun, lebih baik dari peningkatan HLS Jawa Tengah (0,01 tahun), namun lebih rendah dari peningkatan HLS Nasional (0,05 tahun).

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks pembangunan literasi masyarakat baru mulai dihitung pada tahun 2023. Berikut adalah nilai IPLM dan unsur pembentuk IPLM Kabupaten Pati.

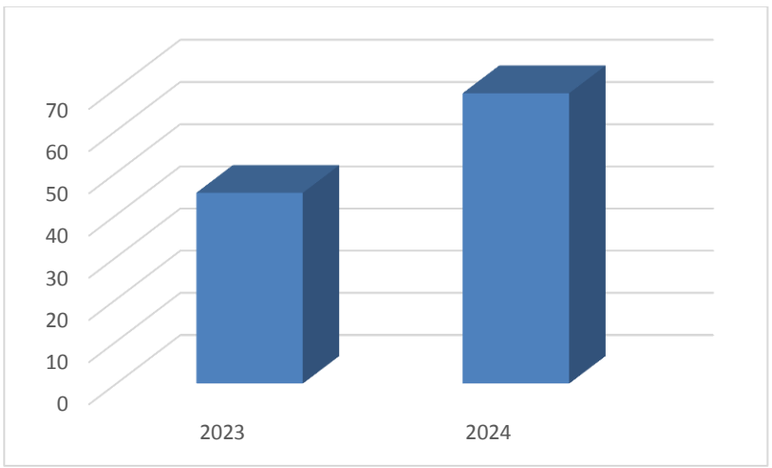

Gambar 2.14. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023-2024
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Indeks Ketimpangan Gender

Kesetaraan gender juga masih menjadi permasalahan pembangunan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Selama periode lima tahun terakhir, IPG Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan, begitu juga dengan IPG Jawa Tengah dan Nasional. Selain itu, IPG Kabupaten Pati juga selalu lebih baik dibandingkan IPG Nasional, namun lebih rendah dibandingkan IPG Jawa Tengah. Selama periode 2021 hingga 2023, IPG Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan, namun dengan nilai peningkatan yang semakin turun. Meningkatnya IPG menjadi indikasi menurunnya kesenjangan kualitas penduduk perempuan dan penduduk laki-laki di Kabupaten Pati.

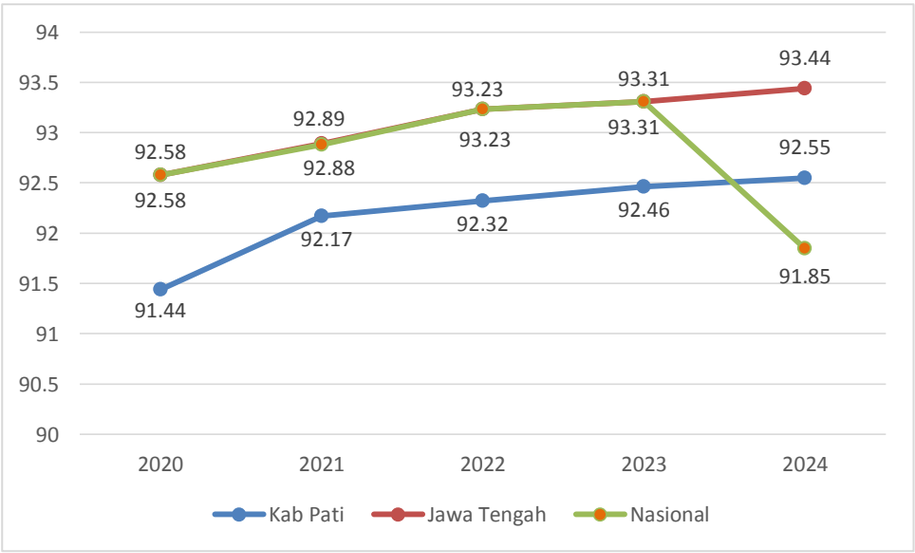

Sumber: BPS Kabupaten Pati (2025)

Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Selama periode lima tahun terakhir, IPG Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan, begitu juga dengan IPG Jawa Tengah dan Nasional. Selain itu, IPG Kabupaten Pati juga selalu lebih baik dibandingkan IPG Nasional, namun lebih rendah dibandingkan IPG Jawa Tengah. Selama periode 2021 hingga 2023, IPG Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan, namun dengan nilai peningkatan yang semakin turun. Meningkatnya IPG menjadi indikasi menurunnya kesenjangan kualitas penduduk perempuan dan penduduk laki-laki di Kabupaten Pati

Berdasarkan komponennya, kesenjangan gender terbesar ditemukan pada aspek ekonomi. Rasio pengeluaran perkapita penduduk perempuan relatif lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita penduduk laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan kontribusi perempuan dalam aspek ekonomi relatif masih rendah yang berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima perempuan. Pada aspek pendidikan, kesenjangan masih ditemukan pada RLS, sementara HLS telah menunjukkan peningkatan kesetaraan gender. Terkait RLS, dapat dinyatakan tingkat pendidikan penduduk perempuan masih di bawah tingkat pendidikan penduduk laki-laki. Namun demikian, dapat dikatakan terjadi peningkatan kesetaraan gender terkait RLS yang ditunjukkan semakin membaiknya rasio RLS berdasarkan gender. Selanjutnya, terkait aspek kesehatan juga ditemukan kesenjangan, dimana kualitas kesehatan penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan kualitas kesehatan penduduk perempuan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa di masa mendatang kelompok penduduk usia tua akan didominasi oleh penduduk perempuan.

Indeks Pembangunan Gender memiliki korelasi negatif dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Keberhasilan pembangunan gender selanjutnya akan diikuti dengan penurunan kesenjangan gender. Selama kurun waktu 2020 hingga 2023, IKG Kabupaten Pati cenderung mengalami penurunan, dan di tahun 2023, kondisi ketimpangan gender di Kabupaten Pati jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan lebih rendah dibandingkan IKG Jawa Tengah dan Nasional.

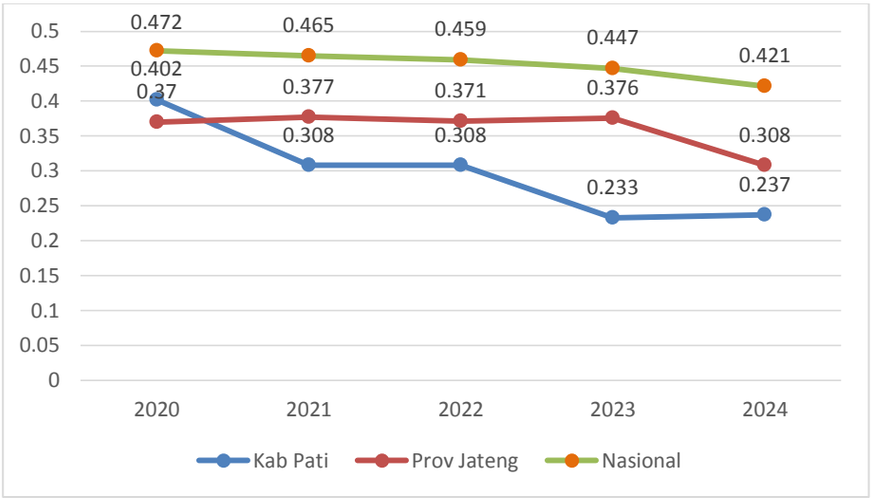

Gambar 2.16. Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pati (2025)

Ketimpangan gender di Kabupaten Pati dapat digambarkan dengan kualitas penduduk perempuan yang lebih rendah dibandingkan kualitas penduduk laki-laki. Ketimpangan tertinggi ditemukan pada indeks pemberdayaan dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Ketimpangan pemberdayaan utamanya disebabkan oleh rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen, dimana selama lima tahun terakhir, persentase anggota parlemen perempuan hanya sebesar 16%, paling rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Ketimpangan terkait partisipasi tenaga kerja ditunjukkan dengan tingkat partisipasi kerja penduduk perempuan yang lebih rendah dibandingkan TPAK penduduk laki-laki. Walaupun demikian, TPAK penduduk perempuan Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan dengan dibukanya beberapa industri manufaktur yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan.

2.1.5.Produk Unggulan Daerah (PUD)

Usulan produk unggulan daerah (PUD) adalah usulan PUD yang akan dikembangkan dalam masa RPJMD mendatang (2025-2029). Jika pemerintah daerah belum menetapan PUD, maka dapat melakukan kajian singkat dan disepakati seluruh stakeholder dalam forum FGD, dengan membuat Berita Acara hasil FGD tentang penetapan usulan PUD.

Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi

kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.Produk unggulan daerah merupakan produk baik berupa barang maupun jasa untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal serta mendatangkan kekuatan ekonomi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Berdasarkan potensi yang ada serta dalam rangka sinergitas kebijakan nasional dan daerah guna peningkatan daya saing produk domestik, Pemerintah Kabupaten Pati telah melaksanakan Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah pada tahun 2016. Hasil kajian menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) Produk Unggulan Daerah (PUD) di Kabupaten Pati yaitu (1) makanan dan minuman, (2) padi sawah, (3) jagung, (4) sapi potong, (5) ketela pohon, (6) jeruk pamelo, (7) padi ladang, (8) bandeng, (9) tapioka dam (10) udang windu.

Terkait penetapan pemetaan kawasan produk unggulan, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 414.3/078 Tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Kawasan Sentra Penghasil Garam Rakyat, Kawasan Pesisir, Kawasan Sentra Penghasil Bawang Merah, dan Kawasan Penghasil Produk Unggulan di Kabupaten Pati. Selain melaui pemetaan kawasan, dalam rangka sinergitas perencanaan pendampingan perangkat daerah terhadap produk unggulan maka pemerintah juga membentuk forum pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Pati berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 050/5320 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Pati Tahun 2022. Sesuai SK tersebut, terdapat 9 (sembilan) klaster yang diidentifikasi sebagai potensi unggulan berskala usaha mikro di Kabupaten Pati dan masih memerlukan pendampingan perangkat daerah untuk pengembangannya. Adapun 9 (sembilan) klaster tersebut terdiri dari klaster batik, klaster makanan ringan, klaster kopi, klaster kelapa kopyor, klaster *handycraft,* klaster jeruk pamelo, klaster kuningan, klaster bandeng air tawar dan klaster pariwisata. Selanjutnya, hasil penyusunan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Pati, terdapat 10 alternatif produk unggulan Kabupaten Pati yaitu kacang, garam, tepung tapioka, gula/tebu, kapuk, logam kuningan, batu belah, ikan pindang, jeruk pamelo dan kelapa kopyor.

Berdasarkan beberapa kajian dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pati, serta telah dilaksanakannya *Focus Group Discussion* (FGD) Produk Unggulan Daerah pada tanggal 2 Mei 2024 bertempat di Ruang Rajawali Bapperida Kabupaten Pati dan dengan mempertimbangkan slogan Kabupaten Pati yaitu "Pati Bumi Mina Tani" maka diperoleh kesimpulan bahwa Produk unggulan Daerah Kabupaten Pati yang akan disertakan dalam dokumen RIPJ-PID adalah Ubi Kayu, Kelapa Kopyor, Jeruk Pamelo, Garam dan Bandeng.

1. Ubi Kayu

Berdasarkan analisis produk basis dengan pendekatan analisis Location Quotient (LQ) untuk menentukan produk-produk yang unggul dan memiliki spesialisasi diperoleh hasil bahwa tanaman ubi kayu/ketela pohon menduduki peringkat pertama dan memperoleh skor tertinggi yaitu 2,1581. Produksi tahun 2023 merupakan yang tertinggi dibandingkan jenis tanaman pangan lain yaitu mencapai 892.058 ton, luas tanam sebesar 16.872 Ha dan luas panen 19.401 Ha. Ubi kayu dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan tepung tapioka. Hal ini mendukung berkembangnya industri tepung tapioka Kabupaten Pati tidak lepas dari kemudahan dalam penyediaan bahan baku dan mudahnya proses pengolahan bahan baku tersebut. Penyediaan lahan pun tidak terlalu sulit karena dalam proses pengolahannya tidak membutuhkan lahan yang luas. Selain Proses pengolahan dari bahan baku menuju produk industrinya yang tergolong mudah dan proses pemasaran yang telah mampu menjangkau luar Kabupaten menjadikan industri tepung tapioka menjadi primadona dalam penentuan wirausaha. Penelitian Nugraha dkk. (2015) menyebutkan bahwa R/C ratio tanaman ubi kayu yang dihitung berdasarkan jarak tanam yang diterapkan pada kisaran 2 sampai 4 sehingga layak untuk dikembangkan.

2. Kelapa Kopyor

Kelapa kopyor merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di Kabupaten Pati dan menjadi salah satu produk khas Kabupaten Pati. Kelapa kopyor dibudidayalan di Kecamatan Tayu, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Gunungwungkal. Kelapa kopyor ini memiliki berbagai varietas. Keunggulannya yaitu mudah penanamannya dan tanaman kelapa ini dapat dimanfaatkan tidak hanya dari hasil buahnya saja. Untuk pemasaran bibit kelapa koyor telah dipasarkan hingga ke Luar Jawa khususnya Sulawesi.

Analisis produk basis dengan pendekatan analisis LQ diperoleh hasil bahwa tanaman kelapa kopyor memperoleh skor yaitu 105,6755. Produksi tahun 2023 mencapai 3.447 ton. Permendagri No. 9 tahun 2014 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa peningkatan daya tarik PUD dapat berdasarkan daya tarik kekhasan/keunikan, dengan demikian kelapa kopyor yang merupakan salah satu produk khas Kabupaten Pati layak dijadikan sebagai salah satu produk unggulan daerah Kabupaten Pati. Penelitian yang dilakukan Sutrisno (2016) menyebutkan bahwa kelapa kopyor sangat berpeluang dikembangkan karena 1) permintaan terus meningkat untuk konsumsi dan industri olahan, 2) ketersediaan sumber lahan yang cukup luas, 3) kesenjangan produktivitas lapangan dan potensi hasil, dan 4) tersedianya paket teknologi dan varietas baru serta sumberdaya manusia yang cukup terampil dalam budidaya kelapa kopyor.

3. Jeruk Pamelo

Jeruk Pamelo pertama kali ditemukan dan dikembangbiakkan di Desa Bageng Kecamatan Gembong. Jeruk pamelo diarahkan menjadi ciri khas Kabupaten Pati. Namun untuk saat ini pemasaran Jeruk Pamelo masih sebatas produk asli dan belum berupa produk olahan. Jeruk pamelo termasuk dalam kategori produk unggulan. Produk yang masuk kategori produk unggulan berarti produk tersebut memiliki kinerja indikator performance di atas rata-rata dan indikator kinerja prospek pengembangan di atas rata-rata. Analisis LQ diperoleh hasil bahwa tanaman jeruk pamelo memperoleh skor yaitu 27,4335. Produksi jeruk pamelo tahun 2023 mencapai 121.055 kwintal. Penelitian yang dilakukan Bappeda Kabupaten Pati (2019) menyebutkan bahwa Rasio R/C usaha budidaya jeruk pamelo lebih besar dari 1 sehingga layak untuk dikembangkan. Nilai keunggulan kompetitif (PCR) usaha budidaya jeruk pamelo di Kabupaten Pati 0,263 yang berarti sistem kompetitif. Nilai keunggulan komparatif (DRCR) usaha budidaya jeruk pamelo di Kabupaten Pati 0,616 yang berarti sistem mempunyai keunggulan komparatif.

4. Garam

Kabupaten Pati merupakan penghasil garam peringkat pertama di Provinsi Jawa Tengah dan kedua terbesar secara nasional setelah Kabupaten Sumenep. Terdapat 4 Kecamatan penyumbang terbesar yaitu Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Juwana, dan Kecamatan Batangan. Alur proses kegiatan perindustrian garam di Kabupaten Pati juga

telah terstruktur dengan baik berkat adanya kegiatan PUGAR dan dilanjutkan dengan kegiatan SEGAR hingga saat ini. SKPD dan Dinas terkait mampu memfasilitasi pengetahuan tentang manajemen perindustrian bagi para pelaku industri mulai dari hulu menuju hilir. Analisis LQ diperoleh hasil bahwa garam memperoleh skor yaitu 1,9516. Produktivitas garam tahun 2023 mencapai 86,60 ton/Ha/musim produksi. Produksi garam Kabupaten Pati tahun 2023 mencapai 251.264 ton, luas lahan budidaya garam 2.901,62 Ha dan jumlah pembudidaya garam sebesar 3.817 orang. Garam termasuk dalam kategori produk unggulan.

5. Nila Salin

Kabupaten Pati memiliki banyak produk perikanan, salah satunya yaitu nila salin. Budidaya nila salin dimulai tahun 2014 pada lahan payau di Kecamatan Tayu. Berkembang di Kecamatan Dukuhseti dan Margoyoso serta wilayah kecamatan pesisir lainnya. Nila salin tumbuh menjadi komoditas baru yang dapat menjadi produk unggulan perikanan budidaya di Kabupaten Pati. Tahun 2020 dikeluarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 523.3/2238 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Budidaya Nila Salin Berkelanjutan di Kecamatan Tayu dan Kawasan Pendukungnya di Kecamatan Margoyoso dan Dukuhseti. Produksi nila salin tahun 2023 sebesar 7.110,14 ton, luas lahan budidaya yaitu 1.726,02 Ha, jumlah pembudidaya 712 orang dan terdapat kelompok pembudidaya nila sebanyak 37 kelompok. Total Potensi Pengembangan Budidaya Nila Salin (di 7 Kecamatan Pesisir) kurang lebih 2.055 Ha. Analisis LQ diperoleh hasil bahwa nila salin memperoleh skor yaitu 7,6678.

2.1.6.Isu Permasalahan Daerah

Usulan permasalahan utama daerah adalah usulan Permasalahan utama daerah yang akan diselesaikan dalam masa RPJMD mendatang (2025-2029). Usulan permasalahan utama daerah, diambil dari isue strategis dan arah kebijakan RPJPD 2025-2045 dan hasil evaluasi RPJMD/RPD yang sedang berjalan, serta sumber-sumber lain yang dapat memperkuat hasil kajian (publikasi yang relevan, hasil diskusi, dsb). Kajian singkat permasalahan utama daerah disepakati seluruh stakeholder dalam forum FGD, dengan membuat Berita Acara hasil FGD tentang penetapan permasalahan utama daerah.

Berdasarkan pembahasan gambaran umum Kabupaten Pati, Laporan KLHS RPJPD 2025-2045, serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan,

selanjutnya dilakukan identifikasi isu permasalahan daerah. Rumusan isu permasalahan daerah merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Isu permasalahan daerah Kabupaten Pati yaitu :

A. su Strategis I : SDM yang Berdaya Saing

Sasaran Pokok : Penguatan Landasan Transformasi Sosial untuk Membangun Manusia yang Unggul dan Bermartabat

1. Kemiskinan

   Efektivitas kebijakan Pemerintah (Pemda) dalam mengurangi masalah sosial salah satu tolok ukurnya adalah angka kemiskinan. Determinan kemiskinan secara empirik bersumber dari persoalan (akses) pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, budaya dan masalah sosial yang lain.

   Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pati hingga tahun 2023 sebesar 9,31% atau rata-rata turun sebesar 0,45% poin selama 13 tahun terakhir. Tingkat kemiskinan di tahun 2025 diproyeksikan 8,90%-8,37%, sedangkan di akhir periode jangka menengah 2025-2029, kemiskinan ditargetkan terus menurun hingga pada kisaran sebesar 6,89%-5,85%.

2. Konsumsi Pangan

   Pangan akan terus menjadi isu yang sangat krusial di masa mendatang. Hal ini dikaitkan dengan fenomena perubahan iklim global, dan diperparah dengan kondisi geo politik yang semakin memanas. Krisis pangan akan menjadi ancaman nyata bagi kebutuhan pangan domestik sebagai dampak dari kondisi global tersebut, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, khususnya terkait produksi dan produktivitas sektor pertanian sebagai sumber/penghasil pangan agar bisa mengurangi ketergantungan atau sebagai substitusi bahan pangan impor dari luar negeri.

   Di sektor pangan, indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan tantangan dalam penyediaan pangan adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/POU*).

   Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (POU) daerah Kabupaten Pati tahun 2023 sebesar 7,78% atau dalam kurun waktu

tujuh tahun terakhir rata-rata turun sebesar 0,65% poin. POU di tahun 2025 7,41% dan di akhir periode 2025-2029 diproyeksikan menjadi sebesar 6,07%.

3. Stunting

Kasus stunting secara faktual tersebar, tidak hanya pada kelompok masyarakat miskin, namun juga terjadi pada individu masyarakat berlatar belakang ekonomi, dan strata sosial baik di pedesaan maupun perkotaan, yang bukan masuk kategori miskin atau rentan miskin. Penanganan stunting juga sudah mendasarkan pada standar internasional (WHO), dengan strategi integrasi intenvensi spesifik (fokus ke aspek kesehatan) dan intervensi sensitive (fokus ke aspek pendukung kesehatan seperti edukasi/pendampingan).

Angka stunting di Kabupaten Pati hingga tahun 2023 tercatat sebesar 5,78%. Sedangkan target prevalensi stunting di tahun 2025 adalah 4,53% serta di akhir periode 2025-2029 ditargetkan menjadi 3,57%.

4. Kematian Ibu

Kematian ibu menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah (Pemda) mengingat masih tingginya kejadian tersebut. Faktor penyebab tingginya kasus kematian secara umum dimulai dari fase sebelum hamil, persalinan hingga pasca persalinan dengan berbagai macam kasus kesehatan yang menyertainya. Idealnya kejadian kasus kematian terhadap ibu bisa semakin mendekati nol.

Jumlah angka kematian ibu di Kabupaten Pati di tahun 2023 adalah sebesar 118 per 100 ribu kelahiran hidup. Di Tahun 2025, kasus kematian ibu diharapkan dapat ditekan turun hingga menjadi 82 per 100 ribu kelahiran hidup, sedangkan di akhir periode 2025-2029, kasus kematian terhadap ibu bisa semakin turun hingga menjadi 76 per 100 ribu kelahiran hidup.

5. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun

Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun didefinisikan sebagai Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Ke depan, masyarakat Kabupaten Pati diharapkan bisa

memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi guna mendukung terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang kompetitif.

RLS Kabupaten Pati di tahun 2023 adalah 7,91 tahun yang artinya, di tahun tersebut, penduduk yang berusia lebih dari 25 tahun rata-rata menempuh pendidikan selama 8 tahun atau belum lulus SMP. Di tahun 2025 diproyeksikan menjadi 8,01 tahun, sedangkan di akhir periode 2025-2029 ditargetkan naik menjadi 8,17 tahun.

B. Isu Strategis II : Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan

Sasaran Pokok : Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi untuk Membangun Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi; Penguatan Ketahanan Lingkungan dan Kelestarian Alam; Penguatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan

1. Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan pembentuk pendapatan asli daerah (PAD) bersama dengan retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah. Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Daerah dalam 13 tahun terakhir (2011-2023) rata-rata sebesar 3,18% dan terhadap PAD sendiri, proporsi pajak rata-rata sebesar 23,42%.

Guna mengukur kemanfaatan ekonomi (daerah) terhadap pendapatan pajak (daerah), pemerintah menyusun indikator kinerja keuangan bagi pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah yaitu rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data empirik menunjukkan bahwa rata-rata rasio Pajak Daerah terhadap PDRB selama 13 tahun terakhir adalah sebesar 0,20%. Tahun 2025, rasio pajak daerah ditargetkan sebesar 0,51%, sedangkan target di akhir periode 2025-2029 adalah sebesar 0,55%. Sebagai perbandingan, rasio pajak nasional (*tax ratio*) saat ini adalah sebesar 10,31%; sehingga posisi rasio pajak daerah Kabupaten Pati masih jauh dibawah nasional.

2. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Pati dalam waktu 10 tahun terakhir cenderung menurun, meskipun sempat meningkat akibat Covid-19 tahun 2020-2021. Hingga Tahun 2023, TPT mencapai sebesar 4,29% dan secara rata-rata per tahun terjadi penurunan sebesar

0,79% poin dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Tahun 2024-2025, TPT ditargetkan terus turun hingga kisaran sebesar 3,66%–3,32% dan 4,04%-3,74%; sedangkan di akhir periode 2025-2029, TPT menjadi sebesar 3,40%-3,10%.

3. Kewirausahaan

Aspek kewirausahaan menjadi fokus perhatian Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan menggunakan standar Rasio Kewirausahaan negara maju yang mencapai minimal 12% dari total penduduk usia kerja dalam kategori Angkatan Kerja. Semakin tinggi rasio, semakin tinggi pula produktivitas masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Kabupaten Pati memiliki rasio kewirausahaan di tahun 2023 sebesar 2,40%. Tahun 2025 dan di akhir periode 2025-2029, Rasio Kewirausahaan diproyeksikan masing-masing sebesar 4,44% dan 4,65%.

4. Pengolahan Sampah

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan sampah dilakukan adalah ukuran timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT).

Total timbulan sampah 251.092,63 ton/tahun, total sampah yang terkelola sebanyak 35.684,104 ton/tahun (14,21% dari total sampah). Sampah yang terkelola kebanyakan oleh pengepul yaitu sebanyak 35.456,1 ton/tahun (99,36% dari total yang terkelola oleh fasilitas pengelolaan sampah sebanyak 35.684,104 ton/tahun. Adapun sampah yang masuk TPA rata-rata 187,2 ton/hari.

Target persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Pati Tahun 2025 dan di akhir periode 2025-2029 masing-masing sebesar 10,25% dan 30,19%.

5. Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup dilihat dari hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indikator pengelolaan lingkungan hidup berupa perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Environmental Performance Indeks (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas

lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah: 1) kualitas air; 2) kualitas udara; dan 3) kualitas tutupan lahan.

Pada tahun 2023, Kabupaten Pati memiliki nilai IKLH sebesar 60,63 dengan status sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup masih belum dalam penilaian baik. Tahun 2025 dan di akhir periode 2025-2029, IKLH diproyeksikan sebesar 72,28 dan 72,47.

6. Kebencanaan

Risiko bencana merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut.

Kabupaten Pati memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) di tahun 2023 sebesar 150,21 (masuk kategori Risiko Tinggi karena berada di angka IRB >144), di akhir periode 2025-2029 masing-masing diproyeksikan sebesar 150,44-145,87.

7. Akses Hunian Layak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Salah satu perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan rumah tinggal sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan kebutuhan rumah layak dalam lingkungan sehat tentunya menjadi kewajiban masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas untuk menciptakan iklim pembangunan yang kondusif sehingga memberikan peluang kepada dunia usaha menyediakan perumahan dan kawasan permukiman.

Tahun 2023, Kabupaten Pati memiliki persentase rumah tangga dengan akses hunian yang layak sebesar 70,92%. Angka ini diperoleh dari hasil pembagian jumlah RT dengan akses hunian layak dengan jumlah RT. Jumlah RT dengan akses hunian layak 355.699 KK dan jumlah rumah tangga tahun 2023 sebanyak 501.558 KK. Tahun 2025 dan di akhir periode 2025-2029 masing-masing diproyeksikan sebesar 79,81% dan 84,86%.

8. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi.

Kabupaten Pati tahun 2023 memiliki total panjang jalan 733,115 km yang merupakan jalan kabupaten. Kondisi jalan di Kabupaten Pati yaitu jalan beraspal baik sepanjang 394,325 km (53,79%), jalan beraspal sedang sepanjang 132,370 km (18,06%), jalan beraspal rusak ringan sepanjang 124,135 km (16,93%) dan jalan beraspal rusak berat sepanjang 82,285 km (11,22%). Dengan kata lain kondisi jalan di Kabupaten Pati sepanjang 526,695 km (71,84%) dalam kondisi mantap dan sepanjang 206,420 km (28,16%) dalam kondisi tidak mantap. Tahun 2025 dan di akhir periode 2025-2029 masing-masing diproyeksikan sebesar 89,65% dan 90,99%.

9. Air Minum Perpipaan

Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang tidak terbatas dan berkelanjutan. Peningkatan kebutuhan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, peningkatan derajat kehidupan warga serta perkembangan kawasan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kondisi sosial dan ekonomi warga. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Guna memenuhi kebutuhan air masyarakat Kabupaten Pati, sistem penyediaan air minum di Kabupaten Pati menggunakan sistem perpipaan dan non perpipaan.

Pencapaian akses air minum Perumda air minum Tirta Bening Kabupaten Pati tahun 2023 adalah 11,04% atau jumlah pelanggan

sebanyak 38.835 SR. Tahun 2025 dan di akhir periode 2025-2029 masing-masing diproyeksikan sebesar 0% dan 25%.

10. Infrastruktur Irigasi

Infrastruktur untuk prasarana sumberdaya air yang ada di Kabupaten Pati yaitu waduk, embung, bendung dan sistem irigasi. Secara khusus untuk sistem Jaringan Irigasi yang terdiri dari bendung, jaringan irigasi dan daerah irigasi di Kabupaten sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Status Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pati terdapat 327 DI dengan luasan 20.965 Ha. Berdasarkan nilai Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) tahun 2023 nilainya adalah 56,02 atau kategori Kinerja Kurang (K) dan perlu perhatian.

C. Isu Strategis III : Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas & Adaptif

Sasaran Pokok : Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Membangun Pemerintahan yang Unggul dan Adaptif

1. Reformasi Birokrasi

Definisi reformasi birokrasi mengacu istilah *good governance* adalah merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, diukur dengan menggunakan indikator indeks reformasi birokrasi. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi yang ada di daerah, diharapkan dapat meningkatkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik.

Indeks reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 mencapai sebesar 63,37 dan diharapkan akan meningkat di tahun 2025 sebesar 65,54, sedangkan di akhir periode 2025-2029 diproyeksikan sebesar 67,26.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas layanan publik diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik yang terdiri dari 6 (enam) aspek pelayanan yaitu (i) kebijakan pelayanan, (ii) profesionalisme SDM, (iii) sarpras pelayanan public, (iv)

sistem informasi pelayanan public, (v) konsultasi dan pengaduan, dan (vi) inovasi.

Indeks pelayanan publik pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2025 dan akhir periode 2025-2029 diproyeksikan sebesar 3,69 dan 4,02 (kategori baik dan sangat baik). (*catatan: Tahun 2024 dan sebelumnya belum mencantumkan indikator indeks pelayanan publik dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah karena termasuk indikator kinerja baru*).

2.2. Kondisi Riset dan Inovasi Daerah

2.2.1. Kemampuan melakukan Kajian untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Salah satu poin penting yang akan diidentifikasi dari kondisi riset dan inovasi di daerah adalah kemampuan daerah dalam melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Hal ini untuk menjawab berbagai isu strategis ataupun permasalahan yang ada pada seluruh sektor pembangunan yang menjadi kewenangan daerah. Kemampuan ini dapat dilihat dari 3 aspek yaitu:

1). Sumber Daya Manusia Riset dan Inovasi Daerah

Sumber daya manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati tahun 2024 sebanyak 68 orang yeng terdiri dari ASN sebanyak 47 orang, P3K sebanyak 9 orang, dan Non ASN/tenaga harian lepas sebanyak 12 orang. Rincian pendidikan dari 47 orang ASN di Bapperida Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.Tingkat Pendidikan ASN Bapperida Kabupaten Pati

No	Uraian	Tingkat Pendidikan				
		SLTA	D3	S1	S2	S3
1	ASN	4	1	17	23	2

Sumber:Bapperida Kabupaten Pati (2025)

Ketersediaan Sumber daya manusia fungsional di Bidang Iptek dan Bidang Manajemen Iptek. SDM Iptek terdiri dari 2 orang Peneliti Ahli Madya, 4 orang Peneliti Ahli Muda dan 2 orang Analis Pemanfaatan Iptek, sedangkan untuk SDM Manajemen Iptek terdiri dari 13 orang perencana (1 orang madya dan 12 orang muda), dan 1 orang Pranata Komputer Terampil.

2). Kelembagaan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun

2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan

Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah:

Pasal 34 : Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan pembinaan, bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembanginan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Pasal 35 : Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :

(a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
(b) Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
(c) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
(d) Pengoordinasian, sinkronisasi, serta pengemdalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
(e) Pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permaslahan yang mungkin timbul;
(f) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
(g) Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;

(h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu kelitbangan yang sifatnya sektoral juga dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada. Selain Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berada di bawah Bappeda, Kelembagaan riset dan inovasi di Kabupaten Blora terdiri atas sejumlah perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan lembaga riset yaitu:

Tabel 2.9. Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati

No	Nama Perguruan Tinggi	Alamat
1	Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA)	JL. Raya Pati -Tayu KM.20 Desa Purworejo, Kecamatan Margoyoso,KabupatenPati
2	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK AKI)	Jl. Kamandowo No.13 Kabupaten Pati
3	Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP)	Jl. Kampus Raya No.5 Desa Dadirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati
4	Sekolah Tinggi Agama Kristen Wiyata Wacana (STAKWW)	Jl. P. Diponegoro, Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati
5	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bakti Utama	Jl. Ki Ageng Selo No.15, Desa Blaru, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati
6	Sekolah Tinggi Ilmu Budaya Islam Syekh Jangkung Pati	Gang Tempel, Karang Mulyo, Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati
8	Universitas Safin Pati	Jl. Raya Pati-Tayu KM13,Desa Ketanen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati

Infrastruktur riset dan inovasi yang ada di Kabupaten Pati yang berupa Kebun Raya, Kawasan Sains dan Teknologi (KST), Laboratorium, Inkubator dan Pusat Inovasi. Namun Pemerintah Kabupaten Pati sudah membentuk Sentra Pengelolaan Kekayaan Intelektual dengan SK Bupati Pati Nomor: 050/6086 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sentra Pengelolaan Kekayaan Intelektual tanggal 20 Agustus 2022 yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Pokja. Tim Koordinasi Sentra Kekayaan Intelektual mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perlindungan Kekayaan Intelektual milik Pemerintah Kabupaten Pati maupun yang berafiliasi kepada Pemerintah Kabupaten Pati, serta milik masyarakat umum di Kabupaten Pati. Sedangkan Pokja terdiri dari Pokja I: Kekayaan Intelektual Paten, Paten Sederhana, Indikasi Geografis, Komunal, dan Hak Cipta, Pokja II: Kekayaan Intelektual Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri,

dan Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu, dan Pokja III: Kekayaan Intelektual Sumber Daya Genetik.

Adapun tugas Pokja adalah sebagai berikut:

a. melakukan identifikasi hasil-hasil kreativitas/ inovasi/ invensi untuk menentukan jenis perlindungan kekayaan intelektual yang layak sesuai nomenklatur Pokja untuk diajukan pendaftaran;
b. melakukan penelusuran kebaharuan atas potensi kekayaan intelektual dari hasil identifikasi hasil-hasil kreativitas/ inovasi/ invensi sesuai nomenklatur Pokja;
c. menyusun kelengkapan administratif dan substantif;
d. melakukan pendaftaran dan pengurusan Kekayaan Intelektual ke Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI;
e. meningkatkan kemampuan SDM pengelola kekayaan intelektual;
f. menyelenggarakan edukasi, advokasi, dan pelatihan teknis seputar jenis-jenis kekayaan intelektual sesuai nomenklatur Pokja; dan
g. melakukan hilirisasi atau komersialisasi atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan baik secara komersial atau nonkomersial.

3). Jejaring Riset dan Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Pati telah membangun jejaring riset dan inovasi melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, baik yang terdapat di daerah maupun yang di luar daerah, sebagai berikut :

(1). Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
(2). Universitas Negeri Semarang (UNNES) Semarang
(3). Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
(4). Institut Pertanian Bogor (IPB)
(5). Universitas Terbuka (UT)
(6). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(7). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
(8). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
(9). Sekolah Tiggi Teknik Darat (STTD) Kemenhub Bekasi
(10). Akademi Metrologi Dan Instrumentasi (Akmet Bandung) Kementrian Perdagangan
(11). Uinversitas Gadjah Mada (UGM)
(12). Universitas Islam Sultan Agung (UNNISULA) Semarang
(13). Universitas Pgri Semarang (UPGRIS) Semarang
(14). Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

(15). Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang
(16). Universitas Slamet Riyadi (UNSRI) Surakarta
(17). Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
(18). Universitas Muria Kudus (UMK)
(19). Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS)
(20). Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU)
(21). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang
(22). Univeristas Duta Bangsa (UNDABA) Surakarta
(23). Universitas An Nuur Grobogan
(24). Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Cendekia Utama Kudus
(25). Universitas Islam Nu (UNISNU) Jepara
(26). Institut Sains Dan Teknologi Akprind Yogyakarta
(27). Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI Al Anwar) Rembang
(28). Sekolah Tinggi Teknik Pati (STTP)
(29). Sekolah Tinggi Ilmu Budaya Islam (STIBI) Syeh Jangkung Pati
(30). Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bakti Utama Pati
(31). Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga
(32). Stie Totalwin Semarang
(33). Stisip Kartika Bangsa Yogyakarta
(34). Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati
(35). Universitas Safin Pati (USP)
(36). STAIP Pati

2.2.2. Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Di Daerah

identifikasi dilakukan terhadap kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah, untuk melihat daya dukung ekosistem di daerah terhadap upaya penguatan riset dan inovasi yang akan dilakukan. Kegiatan dan program riset dan inovasi yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Pati yaitu :

(1). Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sesuai Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Kabupaten Pati telah menetapkan 2 (dua) kebijakan penguatan SIDa ke dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Pati Nomor 135 Tahun 2018 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018-2022 yang memuat kondisi SIDa saat ini, tantangan dan peluang SIDa, kondisi SIDa Kabupaten Pati yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa Kabupaten Pati, fokus dan program prioritas SIDa Kabupaten Pati serta rencana aksi penguatan SIDa Kabupaten Pati. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDa Kabupaten Pati telah membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pati Nomor: 050/508 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Inovasi daerah Kabupaten Pati yang beranggotakan 29 orang. Selanjutnya melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati selaku Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati Nomor: 050/046 Tahun 2017 dibentuk pula Sekretariat Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati yang beranggotakan 34 orang.

(2). Kelitbangan Pemerintahan Daerah Sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016

Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 9 ayat (2) maka Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang menjelaskan arah kebijakan kelitbangan baik dari arah kebijakandan strategi jangka panjang pembangunan daerah, kebijakan inovasi, serta strategi yang akan dilakukan. Adapun penyusunan Rencana Induk Kelitbangan melibatkan 14 orang yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Nomor 050/072/Tahun2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Adapun pelaksanaan amanat pasal 37 Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, pengorganisasian kelitbangan di Kabupaten Pati terdiri atas:

a. Majelis Pertimbangan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pati Nomor: 070/362 Tahun 2018 tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Pati beranggotakan 24 orang yang terdiri dari Bupati, pejabat tinggi pratama, administrator, tenaga ahli/pakar/praktisi.
b. Tim Pengendali Mutu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pati Nomor: 070/363 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu

Kelitbangan Kabupaten Pati beranggotakan 8 orang terdiri dari Kepala Bappeda, pejabat administrator dan pengawas serta tenaga ahli/pakar/praktisi.

c. Tim Kelitbangan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pati Nomor: 070/364 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Kelitbangan Kabupaten Pati yang terdiri dari 5 orang unsur pelaksana dan 5 unsur penunjang.

(3). Inovasi Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017

Penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Selain itu, setiap tahun Kabupaten Pati berpartisipasi dalam kegiatan pengukuran, penilaian, dan pemberian penghargaan Indeks Inovasi Daerah dan *Innovative Government Award* (IGA) yang diselenggarakan oleh Kemendagri dengan hasil sebagaiberikut:

a. Surat Mendagri Nomor: 002.6/3445/Litbang hal Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018 tanggal 22 Agustus 2019, Kabupaten Pati berada pada urutan 42 untuk kategori Kabupaten dengan nilai 1.050 predikat sangat inovatif;
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002. 6-415 Tahun 2019 tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Thaun Anggaran 2019, Kabupaten Pati berada pada urutan 99 Kategori Kabupaten dengan nilai 1.250 predikat sangat inovatif;
c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100 – 4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020, Kabupaten Pati berada pada urutan 62 kategori Kabupaten dengan nilai 2.736 predikat sangat inovatif; dan
d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, Kabupaten Pati berada pada urutan 62 kategori Kabupaten dengan nilai 53.81 predikat inovatif.

(4). Kegiatan Kajian dan Riset

Setiap tahun, Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bapperida Kabupaten Pati memiliki hasil-hasil kelitbangan berupa laporan/ kajian hasil penelitian. Output kegiatan riset/ penelitian yang dihasilkan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

TAHUN 2019

1. Inovasi Pelayanan Publik : Studi Penerapan Pati Smart City Melalui Aplikasi Sistem Informasi Dini Bencana (SIDINA)
2. Pengembangan Usaha dan Daya Saing Produk Unggulan Pertanian/Perkebunan di Kabupaten Pati (Studi pada Komoditas Jeruk Pamelo)
3. Laporan Indikator Ekonomi Daerah : Studi Kelayakan Pengelolaan Limbah Medis, Studi Kelayakan Produksi Biji Plastik, Studi Kelayakan Produksi Karton Gembos

TAHUN 2021

1. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Masa Pandemi
2. Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19
3. Strategi Pengembangan Nila Salin Sebagai Potensi Unggulan Daerah

TAHUN 2022

1. Strategi Pengembangan BUMDes di Kabupaten Pati
2. Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani di Kabupaten Pati

TAHUN 2024

3. Motivasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Penggunaan Digital Marketing untuk Pengembangan Usaha
4. Disparitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

(5). Kegiatan Publikasi Jurnal

Kegiatan riset lainnya yang dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pad Bapperida Kabupaten Pati yaitu publikasi artikel jurnal secara nasional dan online melalui situs https://ejurnal-litbang.patikab.go.id . Jurnal Litbang : Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK sudah mendapatkan sertifikat akreditasi peringkat 3 (Sinta 3).

Jurnal Litbang terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Penerbitan artikel jurnal terbuka untuk pelajar/mahasiswa, masyarakat umum, akademisi, dan praktisi secara gratis. Adapun judul artikel

Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan Iptek yang telah terbit adalah sebagai berikut:

TAHUN 2019

1. Potensi Ekonomi Industri Pengolahan Limbah Udang di Kabupaten Pati
2. Analisis Aspek Input pada Upaya Promosi Pemberian Asi Eksklusif
3. Faktor Determinan Konsistensi Pemakaian Kondom pada Pekerja Seks Perempuan
4. Analisis Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk pada Anak Balita di Puskesmas Jakenan Kabupaten Pati
5. Analisis Potensi Dampak Lingkungan dari Budidaya Tebu Menggunakan Pendekatan Life Cycle Assessment (LCA)
6. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Pembakaran Terbuka Sampah Rumah Tangga Menggunakan Model Ipcc
7. Eksistensi Pembangunan Masyarakat Dan Desa Di Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati
8. Capaian Program Pengembangan Sapi Potong Di Kabupaten Wonogiri Dan Kabupaten Pati
9. Pengambilan Keputusan Menjadi Pekerja Migran Indonesia Perempuan
10. Kajian Pelayanan Antenatal K4 Dan Pertolongan Persalinan Di Puskesmas Kabupaten Pati
11. Perilaku Jajan Pada Anak Sekolah Dasar
12. Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Perencanaan Studi Lanjut Pada Siswa

TAHUN 2020

1. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penolakan Imunisasi Bayi dan Balita pada Masyarakat Sedulur Sikep (Samin)
3. Tingkat Stres Ibu Menyusui dan Pemberian Asi pada Bulan Pertama
4. Produktivitas Perikanan Tangkap Jaring Purse Seine
5. Kebijakan Pembangunan Desa Tertinggal Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Potensi Lokal
6. Reserve Brain Drain sebagai Alternatif Mengatasi Kemiskinan
7. Gambaran Penyebab Balita Stunting di Desa Lokus Stunting Kabupaten Pati
8. Studi Kelayakan Usaha Biji Plastik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah
9. Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa Menggunakan Balanced Scorecard

10. Spot Survei Reservoir Leptospira di Daerah Dataran Rendah dan Dataran Tinggi
11. Transformasi Penghidupan Masyarakat Pasca Program Hutan Kemasyarakatan (HKm)

TAHUN 2021

1. Morfologi dan Citra Kota Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati
2. Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial
3. Adaptasi Pekerja Seni Musik Dangdut di Masa Pandemi Covid-19
4. Persepsi Generasi Milenial Kabupaten Sidoarjo Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
5. Revitalisasi Cagar Budaya untuk Pengembangan Pariwisata di Kawasan
6. Van Dering Serukam
7. Limbah Cair Tapioka, Pencemaran, dan Teknik Pengolahannya
8. Kinerja dan Potensi Daerah Irigasi di Kabupaten Pati
9. Strategi Peningkatan Kualitas Air Sungai : Studi Kasus Sungai Sani
10. Hubungan Status Gizi dan Status Hidrasi dengan Fungsi Memori Jangka Pendek Anak Usia Sekolah
11. Tinjauan Kasus COVID-19 Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan Usia dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pati
12. Penggunaan Salam Smart dalam Meningkatkan Kesehatan Mental dan Penerapan Protokol Kesehatan pada Kelompok Pengajian

TAHUN 2022

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Daging Ayam Broiler
2. Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Lebah Kelulut di Lombok, Nusa Tenggara Barat
3. Hubungan Antara Kebijakan Lingkungan dengan Perilaku Pro-Lingkungan: Sebuah Kajian Literatur Sistematis
4. Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut di Kepulauan Karimunjawa
5. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir
6. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisi
7. Analisis Efisiensi Faktor-Faktor Produksi Pada Usahatani Tebu
8. Analisis Efisiensi Ekonomis Penggunaan Input Produksi pada Usahatani Bawang Merah di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali

9. Penilaian Sistem Irigasi Berdasarkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah
10. Penerimaan Pemerintah Desa Terhadap Penerapan Aplikasi Penanganan Bencana Berbasis Android (SIDINA) di Kabupaten Pati
11. Media Promosi Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting

TAHUN 2023

1. Penerapan Standar dan Sertifikasi dalam Rantai Nilai Kopi: Peluang dan Kendala bagi Petani
2. Analisis Pendapatan Usaha Tani Padi (Oryza sativa L.) dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya
3. Alternatif Strategi Pengembangan Produk Agrowisata
4. Preferensi Adaptasi Masyarakat Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang terhadap Kerentanan Bencana Kekeringan
5. Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Air Minum
6. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga dan Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Penyintas Covid-19
7. Pengaruh Faktor Perubahan Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai
8. Dementia Care Class Meningkatkan Sikap Caregiver Informal dalam Perawatan Demensia Berbasis Masyarakat
9. Analisis Perubahan Kerapatan Vegetasi Pegunungan Kendeng Utara Kabupaten Pati Menggunakan Citra entinel
10. Pengaruh Peran Penyuluh Terhadap Pengetahuan Petani Kopi Tentang Sop Budidaya Kopi Organik
11. Analisis Tingkat Kepuasan dan Faktor Loyalitas Konsumen Kopi Tempur
12. Strategi Peningkatan Investasi Melalui Analisis Sektor Unggulan

TAHUN 2024

1. Pelatihan Kader Kesehatan untuk Meningkatkan Keterampilan Deteksi Dini Stunting
2. Pengembangan Inovasi Teknologi Berbentuk Website Direktori sebagai Upaya Brandfing Desa Wisata di Jawa Timur
3. Peningkatan Minat Wirausaha Para Ibu Melalui Pelatihan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal (Studi pada Kelompok Sadar Wisata)
4. Analisis Efektivitas dan Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

5. Konsep Struktur Citra Kota pada Sistem Pusat Pelayanan Kecamatan Kaliori sebagai Solusi Kemacetan Juwana-Rembang
6. Strategi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan
7. Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Pesisir Pekalongan melalui Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan
8. Analisis Penentuan Jalur Evakuasi Bencana Tanah Longsor pada Kawasan Pemukiman
9. Peningkatan Dukungan Keluarga dalam Perawatan Klien Tuberkolosis melalui Terapi Psikoedukasi
10. Pengembangan Kapasitas dalam Mendukung Pemerintahan Daerah yang Inklusif
11. Tantangan Sektor Pertanian dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Berkelanjutan
12. Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Komitmen Afektif sebagai Variabel Intervening

(6). Kegiatan lomba kreativitas dan inovasi (krenova) Pati *Innovation Award*

Untuk kegiatan inovasi di Kabupaten Pati, secara rutin dilaksanakan kegiatan lomba kreativitas dan inovasi (krenova) Pati *Innovation Award* bagi pelajar maupun masyarakat umum setiap tahunnya sejak tahun 2017 hingga saat ini. Bagi pemenang lomba Krenova tingkat Kabupaten Pati, selanjutnya diikutsertakan dalam lomba Krenova dan Lomba Penjaringan Inovasi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta tingkat nsional (Labda Kretya Maupun PBBT). Pada tahun 2019, Kabupaten Pati berhasil meraih juara III pada Lomba Labda Kretya yang diselenggarakan oleh Kemenristek inovasi "Bioreaktor Kapal Selam" oleh Muhammad Sobri dan "Mas Jawa T-Netra: Money Android Scanner sebagai Jawaban Masalah Tunanetra dengan Metode Optical Character Recognition" oleh Komunitas Lingkar Studi Tjokro. Adapun jumlah inovasi masyarakat pada lomba Krenova Pati Innovation Award tahun 2017-2023 sebanyak 225 yang berupa inovasi dalam bentuk digital maupun non digital. Bidang inovasi meliputi kesehatan, enegri terbarukan, pendidikan, industri kreatif, teknologi informasi dan komunikasi, kelautan dan perikanan, sosial budaya, agribisnis dan ketahanan pangan.

(7). Kegiatan lomba Inovasi Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik, dilaksanakan Lomba Inovasi Perangkat Daerah pada tahun 2018-2019 dan selama 3 (tiga) tahun sejak 2020-2022 dinyatakan vakum dikarenakan pandemi Covid-19. Bagi Pemenang Lomba Inovasi Perangkat Daerah, Inovasi Perangkat Daerah akan diikutsertakan dalam KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Sinovik Kemenpan RB serta pengukuran, penilaian, danpemberian penghargaan Indeks Inovasi Daerah dan Innovative Government Award (IGA) oleh Kemenagri. Pada tahun 2020 Kabupaten Pati berhasil masuk TOP 99 KIPP Sinovik Kemenpan RB dengan judul inovasi "SIPIPA (Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Juwana Unit II Kabupaten Pati". Adapun data inovasi Perangkat Daerah Tahun 2017-2023 sebanyak 350 inovasi.

(8). Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) melalui Program Laboratorium Inovasi

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pati melakukan kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) melalui program Laboratorium Inovasi pada tanggal 21 Desember 2017 dilakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Pati dan LAN RI Nomor: 21/XII/NK/2017 dan 58./K.1/HKM.03.1 oleh Bupati Pati dan Kepala LAN RI. Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 050/038/Litbang 2018 dan 22/D.3.2/HKM.03.2 antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dan Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN RI pada tanggal 2 Agustus 2018. Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi: a) teknis administratif; b) Drum–Up dan Diagnose; c) Design Rencana Aksi Inovasi; d) Launching dan Pelaksanaan Rencana Aksi Inovasi; e) Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Inovasi; f) Festival Inovasi; dan g) Evaluasi dan Penyusunan Laporan. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan sosialisasi 3 (tiga) tahapan yaitu sosialisasi, drum-up, diagnose, dan desain inovasi pada tanggal 4 s.d. 6 Desember 2018.

(9). Kegiatan Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi

Anggaran Kegitan Litbangjirap Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.449.012.400,00 terdiri atas Subkegiatan Masalah Aktual dan Isu-Isu

Strategis sebesar Rp.42.930.900,00; Subkegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang sebesar Rp.19.366.150,00; Subkegiatan Koordinasi Kelembagaan Dewan Riset Daerah (DRD) sebesar Rp.22.603.850,00; Subkegiatan Penyusunan kajian atau penelitian permasalahan perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.164.013.150,00; Subkegiatan Lomba Kreatifitas dan Inovasi sebesar Rp.123.915.300,00; Subkegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Rp.15.761.050,00; Subkegiatan Penataandan Pengembangan unsur SIDa Rp.12.119.050,00; Subkegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Rp.15.537.050,00; dan Subkegiatan Pengembangan Jaringan Penelitian sebesar Rp.32.765.900,00.

Adapun anggaran Litbangjirap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.424.292.000,00 terdiri atas Subkegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp.47.475.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Rp.39.945.450,00; Subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebesar Rp.150.343.500,00; Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan sebesar Rp.43.980.750,00; Subkegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Rp.76.289.750,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.28.494.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan sebesar Rp. 2.887.400,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Rp.29.520.600,00.

Anggaran Litbangjirap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.217.475.000,00 terdiri atas Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial sebesar Rp.41.336.000,00; Subkegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp.22.651.500,00; Subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebesar Rp.64.937.500,00; Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan sebesar Rp.33.636.500,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan sebesar Rp.39.316.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.15.597.500,00.

Anggaran Litbang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.264.767.000,00 terdiri atas Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup sebesar Rp.33.300.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.16.500.000,00; Subkegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp.33.082.000,00; Subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebesar Rp.133.116.000,00; Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan sebesar Rp.48.769.000,00.

Anggaran Litbang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.506.683.500,00 terdiri atas Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum sebesar Rp.52.078.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.17.812.500,00; Subkegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual sebesar Rp.71.750.000,00; Subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebesar Rp.209.418.000,00; Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan sebesar Rp.50.625.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek sosial sebesar Rp. 95.000.000,00.

Anggaran Litbang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.250.056.660,00 terdiri atas Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.96.469.000,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.25.535.800,00; Subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebesar Rp.89.926.500,00; Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan sebesar Rp.10.252.520,00; Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 27.872.840,00.

Ada 6 elemen ekosistem riset dan inovasi yang digunakan untuk mengelompokkan Hasil Identifikasi kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah, sesuai dengan acuan Peraturan Brin No.5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di daerah yaitu:

1. Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah;
2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi;
3. Kemitraan riset dan inovasi;
4. Budaya riset dan inovasi;

5. Keterpaduan riset dan inovasi di daerah; dan
6. Penyelarasan dengan perkembangan global.

Berdasarkan penjelasan tersebut disusunlah tabel yang memuat Produk Unggulan Daerah (PUD) dan Isu Permasalahan Daerah yang dipilih sebagai prioritas penguatan riset dan inovasi untuk mencapai misi pembangunan jangka panjang daerah dengan identifikasi kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah berdasarkan 6 elemen penguatan. Pada masing-masing elemen penguatan ekosistem riset dan inovasi ditentukan sejumlah Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi yang dipandang perlu untuk diperkuat. Penyajian tabelnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10. Kondisi Saat Ini Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Produk Unggulan Pertanian dan Perkebunan (Ubi kayu)			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung pengembangan produk Ubi Kayu	belum ada kebijakan daerah khusus yang mendukung pengembangan produk ubi kayu dan turunannya	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait PUD	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD ubi kayu	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD ubi kayu	Sudah tersedia lahan percontohan untuk peningkatan produksi ubi kayu, tetapi belum dibuat demplot percontohan	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD ubi kayu	dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD ubi kayu berupa penyediaan bibit	Penyediaan bibit dialokasikan jika ada permintaan dari kelompok
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi data kekayaan intelektual	belum ada perlindungan dan pemanfaatan KI untuk ubi kayu	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Belum optimalnya kelembagaan riset dan inovasi (BSIP Lingkungan Pertanian) yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi di sektor pertanian (khusus PUD ubi kayu)	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD ubi kayu	Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal.	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	Keberadaan BSIP Lingkungan Pertanian belum mampu dipergunakan secara maksimal untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati	
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD ubi kayu	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD ubi kayu masih belum optimal yaitu pola budidaya masih tradisional, serta teknologi pengolahan produk turunan ubi kayu masih terbatas	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD Sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu)	kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu)	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor Pertanian dan perkebunan, khususnya untuk PUD pertanian dan perkebunan (ubi kayu)	Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian khususnya PUD pertanian dan perkebunan (ubi kayu) sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Apresiasi prestasi inovasi	lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu)	Inovasi : • Aplikasi Determination Of Starch In Cassava Tubers (Descas Ver 1.0) Sebagai Solusi Prediksi Rendemen Pati Dalam Singkong Di Industri Tapioka) • E-Co Waste Water Treatment Rancang Bangun Prototype Pengolah Limbah Cair • Tapioka • Prototype Timbangan Rendemen Ketela Berbasis Arduino (DES 3.0 versi • Alat) • PROMIX: Tepung Tapioka Modifikasi Non Gluten Pengganti Terigu • “Mie Gandul”: Mie Sehat Bebas Gluten Berbahan Dasar Tepung Tapioka Modifikasi dan Ekstrak Kullit Jeruk • “Pembuatan Tepung Tapioka Modifikasi Hidrolisis Asam Laktat dan Photokimia UV”	
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu)	Peningkatan kelas wirausaha sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang.	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri).	• Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu)	1. Minimnya riset dan inovasi 2. Rendahnya daya saing di pasaran. 3. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah	Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian. Untuk ubi kayu belum memproduksi benih sendiri	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi Produk Hasil pertanian dan perkebunan	Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk pertanian dan perkebunan (ubi kayu) agar sesuai dengan standar yang diterapkan	
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	

Tabel 2.11. Kondisi Saat Ini Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Produk Unggulan Pertanian dan Perkebunan (Kelapa Kopyor)			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung pengembangan produk Kelapa Kopyor	Kebijakan kepala dinas pertanian untuk pengadaan bibit kelapa kopyor (kultur embrio)	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian terkait penggunaan laboratorium dinas pertanian untuk pembuatan bibit kelapa kopyor (kultur embrio)
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait PUD	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD kelapa kopyor	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD kelapa kopyor	pengembangan bibit kelapa kopyor melalui kultur jaringan	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD kelapa kopyor	dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD kelapa kopyor berupa dana penyediaan bibit,	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi data kekayaan intelektual	belum ada perlindungan dan pemanfaatan KI untuk kelapa kopyor	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Belum optimalnya kelembagaan riset dan inovasi (BSIP Lingkungan Pertanian) yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi di sektor pertanian	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan bibit dan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan meningkatkan produksi, produk olahan dan turunan PUD kelapa kopyor	Penyediaan bibit kelapa kopyor hasil kultur jaringan untuk pengembangan inovasi masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal.	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	Keberadaan BSIP Lingkungan Pertanian belum mampu dipergunakan secara maksimal untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati	
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD kelapa kopyor	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD kelapa kopyor masih belum optimal, masih dalam tahap penyediaan bibit kelapa kopyor kultur jaringan	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD kelapa kopyor	kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD kelapa kopyor	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor Pertanian dan perkebunan, khususnya untuk PUD pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor)	Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian khususnya PUD kelapa kopyor sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Apresiasi prestasi inovasi	lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD kelapa kopyor	• Agrowisata kelapa kopyor • pemanfaatan teknologi dengan penggunaan laboratorium dinas pertanian untuk pembuatan bibit kelapa kopyor (kultur embrio)	
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor)	Peningkatan kelas wirausaha sektor pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang.	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri).	• Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD kelapa kopyor	1. Minimnya riset dan inovasi 2. Rendahnya daya saing di pasaran. 3. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah	Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.Kelapa kopyor Kabupaten Pati belum memiliki merek sendiri karena belum tertandai secara indikasi-geografis	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi Produk Hasil pertanian dan perkebunan	Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD kelapa kopyor) agar sesuai dengan standar yang diterapkan	
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	

Tabel 2.12. Kondisi Saat Ini Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Produk Unggulan Pertanian dan Perkebunan (Jeruk Pamelo)			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung pengembangan produk Jeruk Pamelo	SK Menteri Pertanian Nomor 658/Kpts/SR.120/2/2010	Penetapan desa Bageng sebagai desa wisata Jeruk Pamelo
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait PUD	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD jeruk pamelo	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD jeruk pamelo	sudah tersedia kebun tanam jeruk pamelo di Desa Bageng	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD jeruk pamelo	dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD jeruk pamelo berupa dana penyediaan bibit, pemeliharaan, dan pemberantasan hama	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi data kekayaan intelektual	sudah ada SK Menteri Pertanian terhadap jeruk pamelo dengan nama Jeruk Pamelo Bageng Taji	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Belum optimalnya kelembagaan riset dan inovasi (BSIP Lingkungan Pertanian) yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi di sektor pertanian	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD jeruk pamelo	Penyediaan demplot / desa percontohan untuk pengembangan inovasi PUD jeruk pamelo masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal.	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	Keberadaan BSIP Lingkungan Pertanian belum mampu dipergunakan secara maksimal untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati	
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD jeruk pamelo	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD jeruk pamelo masih belum optimal, karena budidaya masih dijalankan secara tradisional	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD jeruk pamelo	kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD jeruk pamelo	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor Pertanian dan perkebunan, khususnya untuk PUD jeruk pamelo	Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian khususnya PUD jeruk pamelo sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database	
Apresiasi prestasi inovasi	lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD jeruk pamelo	Inovasi berupa pembuatan selai bahan dasar jeruk pamelo	
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD jeruk pamelo	Peningkatan kelas wirausaha sektor pertanian dan perkebunan (PUD jeruk pamelo) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang.	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri).	• Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD jeruk pamelo	1. Minimnya riset dan inovasi 2. Rendahnya daya saing di pasaran. 3. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah	Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian. Jeruk pamelo Pati telah terdaftar dengan nama varietas yaitu Jeruk Pamelo Bageng Taji	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi Produk Hasil pertanian dan perkebunan	Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD jeruk pamelo) agar sesuai dengan standar yang diterapkan	
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	

Tabel 2.13. Kondisi Saat Ini Produk Unggulan Daerah Garam

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Produk Unggulan Garam			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung pengembangan produk garam	belum ada kebijakan daerah khusus untuk yang mendukung pengembangan produk garam	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait PUD	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD garam	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD	Sudah tersedia lahan percontohan untuk peningkatan kualitas garam	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD garam	dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD garam berupa bantuan peralatan seperti geoisolator, kincir	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi data kekayaan intelektual	produk garam Pati belum memiliki dokumen IG maupun KI	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan	Belum terdapatnya kelembagaan riset dan inovasi yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi khusus untuk produk garam	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD sektor kelautan dan perikanan	Penyediaan demplot / desa percontohan untuk pengembangan inovasi PUD garam masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih sangat terbatas sebagian besar didanai dari dana pemerintah pusat, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal.	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	Belum terdapat bentuk kemitraan yang secara resmi dan legal untuk pengembangan PUD garam di Kabupaten Pati	
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD Sektor kelautan dan perikanan	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD garam masih berupa penggunaan geoisolator untuk perbaikan kualitas garam	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD Sektor Kelautan dan Perikanan	kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset khusus PUD garam	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor kelautan perikanan khususnya PUD garam	Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor kelautan perikanan khususnya PUD garam sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Apresiasi prestasi inovasi	lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khususnya garam)	belum ada pembagian kategori khusus PUD untuk lomba inovasi di daerah	
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD kelautan dan perikanan (Khusus PUD garam)	Peningkatan kelas wirausaha sektor kelautan dan perikanan (khususnya PUD garam) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang.	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri).	• Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khusus garam)	1. Minimnya riset dan inovasi 2. Rendahnya daya saing di pasaran. 3. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pusat dan Daerah	• Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan • Pelaksanaan Program Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi Produk Garam	Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk kelautan perikanan (PUD garam)	
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (garam)	Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD garam	

Tabel 2.14. Kondisi Saat Ini Produk Unggulan Daerah Nila Salin

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Produk Unggulan Nila Salin			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung prngembangan produk nila salin	Keputusan Bupati Pati No.523/2249 Tahun 2022 tentang Penetapan Kampung Perikanan Budidaya Ikan Nila Salin di Kab. Pati	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait PUD	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD nila salin	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD	Sudah tersedia lahan percontohan untuk pengembangan budidaya dan kualitas nila salin	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khusus PUD nila salin)	dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD nila salin berupa dana penyediaan bibit, pemeliharaan, pemberantasan hama dan bantuan peralatan	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi data kekayaan intelektual	belum ada perlindungan dan pemanfaatan KI untuk nila salin	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan	Belum terdapatnya kelembagaan riset dan inovasi yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi khusus untuk produk nila salin	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD nila salin	Penyediaan demplot / desa percontohan untuk pengembangan inovasi PUD nila salin masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal.	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	Belum terdapat bentuk kemitraan yang secara resmi dan legal untuk pengembangan nila salin di Kabupaten Pati	
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD Sektor kelautan dan perikanan	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD nila salin masih belum optimal. Penerapan teknologi masih pada pola budidaya	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD Sektor Kelautan dan Perikanan	kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD nila salin	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor kelautan perikanan khususnya PUD nila salin	Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor kelautan perikanan khususnya PUD nila salin sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database	
Apresiasi prestasi inovasi	lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan	Inovasi yaitu nila salin presto (NISATO) dan Tong Asap Ikan Gantung (TAIGAN)	
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD nila salin	Peningkatan kelas wirausaha khusus pembudidaya nila salin belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang.	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri)	• Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khusus nila salin)	1. Minimnya riset dan inovasi 2. Rendahnya daya saing di pasaran. 3. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pusat dan Daerah	Pemerintah Kabupaten Pati telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Pati Nomor 523.3/2238 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Budidaya Nila Salin Berkelanjutan di Kecamatan Tayu dan	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
		Kawasan Pendukungnya di Kecamatan Margoyoso dan Dukuhseti	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi Produk nila salin	Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk nila salin agar sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh konsumen	
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (Garam)	Pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD masih harus terus ditingkatkan untuk mencapai target yang direncanakan	

Tabel 2.15. Kondisi Saat Ini Isu Permasalahan SDM yang Berdaya Saing

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Isu permasalahan I: SDM yang berdaya saing			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing SDM	• Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial • Peraturan Bupati Pati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat • Perbup Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati • Perbup Nomor 38 Tahun 2020 mengatur tentang kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di tingkat	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
		desa Keputusan Bupati Pati NO. 400/1072 tahun 2024 tentang pembentukan tim koordinasi penggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan daya saing SDM	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan daya saing SDM terintegrasi	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM	infrastruktur khusus untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi dalam rangka penanganan permasalahan daya saing SDM belum optimal seperti laboratorium kesehatan yang masih terbatas kapasitas penggunaannya, serta belum memiliki laboratorium pangan	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM	dana atau anggaran khusus yang dialokasikan belum optimal untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM yang dihadapi (kemiskinan, stunting,kematian ibu)	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Terjalinnya kerjasama riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Belum sinerginya kolaborasi riset dan inovasi antar lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga pelaksana kegiatan teknis	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM masih terbatas, seperti perpustakaan daerah yang belum optimal menyediakan bahan referensi terbaru, keterbatasan SDM sesuai bidang kepakaran, dan sarana laboratorium yang masihbterbatas	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	• Belum terlaksananya koordinasi, kolaborasi, Kerjasama maupun upaya konsolidasi khususnya oleh para pemangku kebijakan daerah. • Belum berkembangnya platform kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan perguruan tinggi	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adanya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM belum optimal dan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Kreatif dan Inovatif untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Belum teridentifikasinya/terpetakan karakteristik daya saing SDM di Kabupaten Pati	
Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Apresiasi prestasi inovasi belum optimal, secara kualitas dan manfaat inovasi belum banyak menyentuh penyelesaian masalah daya saing SDM	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Belum ada inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan	Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM belum optimal, karena keterbatasan sarana dan anggaran	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Kebijakan sudah sinkron antara Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan daya saing SDM, namun kompleknya masalah yang dihadapi sehingga hasil yang diperoleh belum optimal	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Upaya peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM	Kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM belum optimal. Penanganan masalah lebih diprioritaskan untuk penyelesaian isu yang terjadi di daerah	
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Adanya kerjasama internasional/nasional dalam upaya penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daya saing SDM masih sangat terbatas dan bergantung pada pendanaan dari pusat	

Tabel 2.16. Kondisi Saat Ini Isu Permasalahan Pembangunan yang Inklusif & Berkelanjutan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Isu permasalahan II: Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	• Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
		• Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 108 Tahun 2018 tentang Kolaborasi Pengelolaan Jalan Desa • Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati • Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah • Peraturan Bupati Pati Nomor 112 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pati dalam Pengelolaan Sampah • Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah • Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman • Perda Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Peraturan Daerah	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
		(Perda) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas • Peraturan Pati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan terintegrasi	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait upaya penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	sudah tersedia balai latihan kerja, terdapat fasilitas TPA dengan pengolahannya, terbentuk destana (Desa Tangguh Bencana)	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	dana atau anggaran khusus yang dialokasikan masih terbatas untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan yang dihadapi	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Terjalinnya kerjasama riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Belum sinerginya kolaborasi riset dan inovasi antar lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga pelaksana kegiatan teknis	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan masih terbatas (terdapat balai latihan kerja dan TPA)	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	• Belum terlaksananya koordinasi, kolaborasi, Kerjasama maupun upaya konsolidasi khususnya oleh para pemangku kebijakan daerah. • Belum berkembangnya platform kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan perguruan tinggi	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adanya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka p penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan belum optimal dan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Kreatif dan Inovatif untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Belum teridentifikasinya/terpetakan karakteristik pembangunan di Kabupaten Pati	
Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Apresiasi prestasi inovasi belum optimal, secara kualitas dan manfaat inovasi belum banyak menyentuh penyelesaian masalah pembangunan daerah	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Belum ada inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan	Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan belum optimal karena keterbatasan sarana dan anggaran	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Kebijakan sudah sinkron antara Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan pembangunan yang inkusif dan berkelanjutan, namun kompleknya masalah yang dihadapi sehingga hasil yang diperoleh belum optimal	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Upaya peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan belum optimal. Penanganan masalah lebih diprioritaskan untuk penyelesaian isu yang terjadi di daerah	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Adanya kerjasama internasional/nasional dalam upaya penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Belum ada kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan masih sangat terbatas dan bergantung pada pendanaan dari pusat	

Tabel 2.17. Kondisi Saat Ini Isu Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas & Adaptif

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Isu permasalahan III: Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	• Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021-2025 • Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati • Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Sistem Pelayanan Terpadu • Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan tata kelola pemerintahan	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan tata kelola pemerintahan terintegrasi	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait upaya penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	terdapat Mall Pelayanan Publik (MPP)	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	dana atau anggaran khusus yang dialokasikan belum optimal untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif yang dihadapi	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Terjalinnya kerjasama riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Belum sinerginya kolaborasi riset dan inovasi antar lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga pelaksana kegiatan teknis	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	belum tersedia sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	• Belum terlaksananya koordinasi, kolaborasi, Kerjasama maupun upaya konsolidasi khususnya oleh para pemangku kebijakan daerah. • Belum berkembangnya platform kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan perguruan tinggi	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adanya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka p penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum optimal dan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Kreatif dan Inovatif untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Belum teridentifikasinya/terpetakan karakteristiktata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati	
Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Apresiasi prestasi inovasi belum optimal, secara kualitas dan manfaat inovasi belum banyak menyentuh penyelesaian masalah tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Belum ada inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan	Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum optimal	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Belum optimalnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan	Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum optimal karena keterbatasan sarana dan anggaran	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat ini	Keterangan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Belum optimalnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif, namun kompleknya masalah yang dihadapi sehingga hasil yang diperoleh belum optimal	

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek (RIPJ-PID) Kabupaten Pati disusun sebagai upaya penguatan riset dan inovasi dapat mendukung keberhasilan pencapaian misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian misi pembangunan daerah dapat diihat dari pencapaian target pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 2025-2029. Dokumen RIPJ-PID yang memuat serangkaian analisis untuk merumuskan kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah merupakan salah satu cara untuk percepatan pencapaian target pembangunan.

3.1. Tantangan dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Mendatang

3.1.1. Produk Unggulan Daerah (PUD)

(1). Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

- Pengembangan pusat inovasi memerlukan investasi yang signifikan
- Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dalam riset, inovasi, dan pengelolaan pusat inovasi sering kali terbatas di daerah
- Keterbatasan anggaran pemerintah daerah atau kurangnya minat dari sektor swasta untuk berinvestasi
- Pelaksanaan kebijakan membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak yang terdiri dari sejumlah perangkat daerah terkait, pelaku usaha, masyarakat dan dukungan iptek baik dari permerintah maupun dari perguruan tinggi
- Penguasan teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan upaya yang tidak mudah, baik dari sisi peningkatan kapasitas SDM, kualitas infrastruktur digital, dan edukasi kepada masyarakat secara luas mengenai pemanfaatan sistem informasi IPTEK
- Semakin maraknya pelanggaran hak cipta, paten, merek di era digital

(2). Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

- Diperlukan kelembagaan riset dan inovasi di daerah yang dapat mendorong upaya pemanfaatan iptek secara optimal untuk pengembangan PUD

- Sebagian daerah belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung riset dan uji coba inovasi, seperti laboratorium, fasilitas uji coba, dan peralatan

(3). Kemitraan Riset dan Inovasi

- Tingginya biaya produksi dan pengembangan bisnis terkait PUD akibat belum optimalnya fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki, serta belum optimalnya kontribusi oleh mitra perguruan tinggi dan komunitas penggiat inovasi di masyarakat
- Beberapa pelaku mungkin menolak perubahan atau merasa nyaman dengan metode tradisional yang telah mereka gunakan
- Biaya untuk mengadopsi dan menerapkan teknologi baru bisa sangat tinggi
- Ketersediaan data dan informasi yang terbatas tentang teknologi dan praktik terbaik dapat menghambat pengambilan keputusan
- Kurangnya akses dan kurangnya hasil riset dan praktik baik untuk PUD di Kabupaten Pati
- Minimnya kesadaran akan pentingnya informasi dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing.
- Keengganan keluar dari zona nyaman terkait praktik pengerjaan dengan cara tradisional diubah dengan cara moder
- Biaya pelatihan yang relatif mahal membuat sulit untuk mengakses informasi.

(4). Budaya riset dan inovasi

- Budaya kreatifitas dan inovasi di sektor kelautan perikanan sudah banyak bermunculan hanya perlu mendapat arahan dan bimbingan dari pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh pelaku kegiatan dan usaha kelautan perikanan Pati. Arahan dan bimbingan secara khusus dapat dilakukan untuk PUD
- Kurangnya minat atau partisipasi dari pelaku industri, akademisi, atau masyarakat yang bisa memengaruhi kualitas dan kuantitas lomba yang diselenggarakan
- Sulitnya untuk mendapatkan pengakuan atau penerimaan dari pasar untuk inovasi yang dihasilkan dari lomba.
- Mengukur dampak nyata dari inovasi setelah lomba bisa sulit dan memerlukan waktu.

- UMKM merupakan sektor yang dapat bertahan pada masa pandemi, dan membantu pemulihan ekonomi daerah sektor UMKM sudah memiliki budaya kreatif dan inovatif yang kedepannya akan sangat potensial dalam memanfaatkan hasil riset dan inovasi bagi peningkatan nilai tambah bisnisnya.
- Adanya Perda RIPPDA, Raperda RIPIK Kabupaten)

(5). Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah

- Meningkatkan motivasi pelaku usaha
- Infrastruktur belum memadai untuk mendukung riset dan inovasi
- Keterbatasan akses terhadap pelatihan, informasi, dan sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas PUD di Kabupaten Pati
- Pelaksanaan program pemerintah pusat di Kabupaten Pati membutuhkan informasi yang tepat mengenai kondisi kelautan perikanan di daerah untuk menghindari pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran, atau program yang tidak selaras dengan program pemerintah daerah.

(6). Penyelarasan dengan perkembangan global

- Pelaksanaan kegiatan selama masa produksi dan penanganan pasca panen dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan

3.1.2. Isu Permasalahan Daerah

(1). Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

- Penyelesaian isu permasalahan daerah membutuhkan identifikasi faktor penyebab isu pemasalahan yang dihadap agar kebijakan yang dikeluarkan tepat sasaran. Selain itu, membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak yang terdiri dari sejumlah perangkat daerah terkait, masyarakat dan dukungan iptek baik dari permerintah maupun dari perguruan tinggi
- Penguasan teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan upaya yang tidak mudah, baik dari sisi peningkatan kapasitas SDM, kualitas infrastruktur digital, dan edukasi kepada masyarakat secara luas mengenai pemanfaatan sistem informasi IPTEK
- Pengembangan pusat inovasi memerlukan investasi yang signifikan
- Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dalam riset, inovasi, dan pengelolaan pusat inovasi sering kali terbatas di daerah

- Keterbatasan anggaran pemerintah daerah atau kurangnya minat dari sektor swasta untuk berinvestasi
- anggaran yang terbatas, dengan fokus pada sektor-sektor yang dianggap lebih mendesak
- Optimalisasi anggaran khususnya untuk perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual

(2). Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

- Diperlukan kolaborasi antar lembaga untuk melakukan riset dan inovasi di daerah yang dapat mendorong upaya pemanfaatan iptek secara optimal untuk penyelesaian isu permasalahan daerah
- Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daerah

(3). Kemitraan Riset dan Inovasi

- Keterbatasan sumber daya riset dan inovasi yang dimiliki oleh daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk bermitra dengan berbagai pihak baik akademisi, pelaku usaha maupun komunitas masyarakat
- Hasil riset dan inovasi belum dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi pengambilan kebijakan pembangunan daerah
- Optimalisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan daerah

(4). Budaya riset dan inovasi

- Budaya kreatifitas dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daerah dengan dukungan dari pemerintah daerah
- Optimalisasi pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daerah
- Optimalisasi inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daerah

(5). Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah

- Membangun kolaborasi dan sinergi antara pemda dan stakeholders lainnya dalam pengembangan riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daerah
- Harmonisasi kebijakan yang ada di kabupaten dengan kebijakan pusat terkait penanganan isu permasalahan daerah

(6). Penyelarasan dengan perkembangan global

- Melaksanaan analisis/kajian terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daerah
- Mewujudkan kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daerah

3.2. Peluang dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Mendatang

3.2.1. Produk Unggulan Daerah (PUD)

(1). Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

- Dorongan pemerintah berupa kebijakan untuk pengembangan PUD yang didukung dengan riset dan inovasi diharapkan akan mampu mengangkat perekonomian daerah
- Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang Pati melalui website satu data yang memuat hasil kajian/riset dan inovasi tentang PUD
- Data base riset dan inovasi terpusat pada Sistem Informasi IPTEK
- Kebutuhan pasar terhadap PUD sangat besar sehingga masih butuh pengembangan
- Pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk PUD
- Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual
- Dukungan dan sokongan pemerintah untuk melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual

(2). Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

- Besarnya potensi PUD perlu didukung dengan bentuk kelembagaan riset dan inovasi yang dapat mendorong peningkatan penguasaan teknologi dimulai dari tingkat budidaya, peningkatan kualitas, serta pemasaran produk
- Perguruan tinggi dan swasta dapat menyediakan fasilitas riset dan tenaga ahli untuk mendukung uji coba di demplot.
- Memanfaatkan bambu lokal untuk uji coba dan pengembangan produk baru.

(3). Kemitraan Riset dan Inovasi

- Berkembangnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat untuk penguatan riset dan inovasi daerah khusus PUD

- Adanya program inkubasi dan akselerasi untuk mendukung pengembangan PUD
- Memanfaatkan teknologi digital dengan cara menyebarluaskan informasi dengan lebih mudah dan murah melalui platform digital.

(4). Budaya riset dan inovasi

- Kompetisi dan perlombaan yang bertemakan kreatifitas dan inovasi di khusus PUD
- Lomba inovasi dapat menarik ide-ide segar dan talenta baru yang mungkin tidak terdeteksi melalui jalur konvensional
- Lomba inovasi dapat membuka pintu untuk kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, dan pemerintah daerah
- Memberikan penghargaan dan insentif kepada inovator berpotensi tinggi untuk memotivasi mereka terus berinovasi
- Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi

(5). Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah

- Penggunaan platform digital untuk promosi produk
- Pameran dan festival industri untuk memperluas jaringan bisnis
- Kolaborasi riset dan inovasi
- Praktik berkelanjutan dalam produksi untuk meminimalkan dampak lingkungan
- Berkembangnya R&D menciptakan potensi perluasan pangsa pasar serta meningkatkan kualitas daya saing dari produk PUD

(6). Penyelarasan dengan perkembangan global

- Melakukan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk menerapkan standar kualitas produk yang dihasilkan
- Kerjasama nasional memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan terbaru , serta penganggaran dalam rangka pengembangan PUD

3.2.2. Isu Permasalahan Daerah

(1). Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

- Dorongan pemerintah berupa kebijakan dan penyediaan infrastruktur yang memadai sebagai upaya menyelesaikan isu permasalahan daerah. Serta dengan riset dan inovasi diharapkan akan mampu mengidentifikasi faktor penyebab isu permasalahan daerah
- Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang Pati melalui website satu data yang memuat hasil kajian/riset dan inovasi tentang isu permasalahan daerah
- Data base riset dan inovasi terpusat pada Sistem Informasi IPTEK
- Penanganan isu permasalahan daerah membutuhkan hasil kajian/riset agar tepat sasaran dalam menetukan program kegiatan yang sesuai
- Pemerintah mengalokasikan dana khusus kajian/penelitian untuk menangani isu permasalahan daerah
- Adanya potensi ide kreatif dari stakeholders untuk dikembangkan, direplikasi dan kemudian dilindungi kekayaan intelektualnya

(2). Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

- Banyaknya isu permasalahan di daerah memerlukan penyelesaian dengan memanfaatkan iptek (riset dan inovasi) agar hasil riset dan inovasi dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan dalam perencanaan program kerjanya
- Adanya perguruan tinggi baik di Kabupaten Pati maupun diluar kabupaten Pati dan lembaga penelitian yang lain

(3). Kemitraan Riset dan Inovasi

- Berkembangnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat untuk penguatan riset dan inovasi daerah
- Bertambahnya Lembaga Pendidikan khususnya Pendidikan tinggi di Kabupaten Pati
- Pelibatan akademisi oleh Pemerintah Kabupaten Pati baik akademisi lokal maupun luar daerah dalam hal penelitian terkait penanganan isu permasalahan daerah semakin meningkat.

(4). Budaya riset dan inovasi

- Dorongan dan tuntutan untuk penanganan dan penyelesaian isu permasalahan daerah

- Adanya potensi pemberian Inovasi apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daerah dari stakeholders di luar pemerintah kabupaten
- Adanya ide-ide kreatif dari masyarakat

(5). Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah

- Adanya perguruan tinggi baik di Kabupaten Pati maupun diluar kabupaten Pati dan lembaga penelitian yang lain
- Kebijakan yang ada di Kabupaten dengan kebijakan pusat terkait penanganan isu permasalahan Pembangunan daerah dapat diakses secara mudah

(6). Penyelarasan dengan perkembangan global

- Optimalisasi analisis/kajian secara periodik terkait penanganan permasalahan daerah
- Terbukanya kesempatan kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daerah

3.3. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Yang Diharapkan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan terhadap tantangan serta untuk memanfaatkan peluang yang ada, maka disusunlah serangkaian kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada periode Pembangunan jangka panjang menengah tahun 2025-2029 untuk setiap elemen ekosistem riset dan inovasi.

Tabel 3.1. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu yang Diharapkan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Produk Unggulan Ubi kayu			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung pengembangan produk Ubi Kayu	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (ubi kayu)	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait PUD	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi ubi kayu, pengolahan (ubi kayu menjadi tepung tapioka) dan pemasaran produk ubi kayu , serta turunannya di Kabupaten Pati	Infrastruktur terutama untuk sarana dan prasarana produksi (mesin dan peralatan, pertanian, pupuk) *bantuan sarana dan prasarana pertanian masih terfokus untuk tanaman pangan (padi)
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi data kekayaan intelektual	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar-benar unggul	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan.	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian	
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing.	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor Pertanian dan perkebunan, khususnya untuk PUD pertanian dan perkebunan (ubi kayu, kelapa kopyor, jeruk pamelo)	• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD ubi kayu • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya untuk PUD ubi kayu	
Apresiasi prestasi inovasi	lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD pertanian dan perkebunan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri).	• Data dan informasi terkini (updating) tersedia	Kajian terbaru terkait Produk Unggulan Daerah (Kajian PUD terakhir tahun 2016)
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan	PUD pertanian dan perkebunan meningkat secara kualitas serta dapat mengembangkan produk turunan untuk memperluas jangkauan pemasaran
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif.	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah	Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian.	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi Produk Hasil pertanian dan perkebunan	Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD ubi kayu)	
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	

Tabel 3.2. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor yang Diharapkan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Produk Unggulan Kelapa Kopyor			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung pengembangan produk Kelapa Kopyor	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (Kelapa kopyor)	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait PUD	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD kelapa kopyor	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi kepala kopyor, pemasaran dan pengolahan produk turunan kepala kopyor di Kabupaten Pati	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD kelapa kopyor	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi data kekayaan intelektual	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar-benar unggul	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan bibit dan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan meningkatkan produksi, produk olahan dan turunan PUD kelapa kopyor	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan.	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD kelapa kopyor	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD kelapa kopyor	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD kelapa kopyor yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing.	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor Pertanian dan perkebunan, khususnya untuk PUD pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor)	• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD kelapa kopyor • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya untuk PUD pertanian	
Apresiasi prestasi inovasi	lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD kelapa kopyor	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan	
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri).	• Data dan informasi terkini (updating) tersedia	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD kelapa kopyor	Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif.	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah	Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian.	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi Produk Hasil pertanian dan perkebunan	Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD kelapa kopyor)	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	

Tabel 3.3. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo yang Diharapkan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Produk Unggulan Jeruk Pamelo			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung pengembangan produk Jeruk Pamelo	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (Jeruk Pamelo)	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian terkait Pengembangan Jeruk pamelo
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait PUD	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD jeruk pamelo	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi (ubi kayu, kepala kopyor dan jeruk pamelo), pengolahan (ubi kayu menjadi tepung tapioka) dan pemasaran (jeruk pamelo) di Kabupaten Pati	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD jeruk pamelo	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi data kekayaan intelektual	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar-benar unggul	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD jeruk pamelo	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan.	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian	
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD jeruk pamelo	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD jeruk pamelo	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan (Jeruk pamelo) yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
		produk, efisiensi produksi, dan daya saing.	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor Pertanian dan perkebunan, khususnya untuk PUD jeruk pamelo	• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD pertanian (jeruk pamelo) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya untuk PUD pertanian (jeruk pamelo)	
Apresiasi prestasi inovasi	lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD jeruk pamelo	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan	
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD jeruk pamelo	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri).	• Data dan informasi terkini (updating) tersedia	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD jeruk pamelo	Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif.	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah	Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian.	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi Produk Hasil pertanian dan perkebunan	Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD jeruk pamelo)	
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	

Tabel 3.4. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Garam yang Diharapkan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Produk Unggulan Garam			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung pengembangan produk garam	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD garam	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait PUD	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk garam di Kabupaten Pati	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD garam	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi data kekayaan intelektual	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis agar menjadi memiliki produk kelautan perikanan yang unggul	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD sektor kelautan dan perikanan	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan.	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor kelautan perikanan	
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD Sektor kelautan dan perikanan	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD Sektor Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing.	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor kelautan perikanan khususnya PUD garam	• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (garam) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (garam)	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Apresiasi prestasi inovasi	lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khususnya garam)	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor kelautan dan perikanan	
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD kelautan dan perikanan (Khusus PUD garam)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti, Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri).	• Data dan informasi terkini (updating) tersedia	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khusus garam)	Daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor kelautan dan perikanan	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif.	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pusat dan Daerah	Penyelarasan antara program / kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program / kegiatan keluatan perikanan yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha kelautan perikanan	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi Produk Garam	Peningkatan kualitas produk kelautan perikanan (PUD garam)	
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (garam)	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan	

Tabel 3.5. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Nila Salin yang Diharapkan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Produk Unggulan Nila Salin			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung prngembangan produk nila salin	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD nila salin	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait PUD	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait pengembangan PUD	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk nila salin di Kabupaten Pati	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khusus PUD nila salin)	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi data kekayaan intelektual	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kerjasama dengan BRIN, BRIDA, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis agar menjadi memiliki produk kelautan perikanan yang unggul	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan demplot untuk uji coba dan pengembangan inovasi dalam rangka pengembangan produk olahan dan turunan PUD nila salin	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan.	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor kelautan perikanan	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
	Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)		
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD Sektor kelautan dan perikanan	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset untuk PUD Sektor Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing.	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Riset, Kreatif dan Inovatif di sektor kelautan perikanan khususnya PUD nila salin	• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (nila salin) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (nila salin)	
Apresiasi prestasi inovasi	lomba inovasi yang cocok dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor kelautan dan perikanan	
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Meningkatkan kelas wirausaha pemula ke wirausaha mapan dari sektor PUD nila salin	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan Analisis terkait PUD dan Kajian Pendukung lainnya seperti , Minapolitan, Kompetensi Inti Industri, Raperda RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri).	• Data dan informasi terkini (updating) tersedia	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (khusus nila salin)	Daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor kelautan dan perikanan	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif.	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pusat dan Daerah	Penyelarasan antara program / kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program / kegiatan keluatan perikanan yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha kelautan perikanan	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi Produk nila salin	Peningkatan kualitasproduk kelautan perikanan (PUD nila salin)	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Terbangunnya kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan (Garam)	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan	

Tabel 3.6. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Isu Permasalahan SDM yang Berdaya Saing yang Diharapkan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Isu permasalahan I: SDM yang berdaya saing			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing SDM	Tersedianya kebijakan sebagai upaya menyelesaikan isu permasalahan daya saing SDM	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan daya saing SDM	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Terjalinnya kerjasama riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan daya saing SDM	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	• Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adanya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Kreatif dan Inovatif untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	SDM yang berkualitas dan berdaya saing, serta memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam penggunaan teknologi, dapat dioptimalkan kreatifitasnya untuk pembangunan daerah	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan	Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Upaya peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM	Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM	
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Adanya kerjasama internasional/nasional dalam upaya penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Terjalinnya kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daya saing SDM	

Tabel 3.7. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Isu Permasalahan Pembangunan yang Inklusif & Berkelanjutan yang Diharapkan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Isu permasalahan II: Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Tersedianya kebijakan sebagai upaya penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait upaya penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Terjalinnya kerjasama riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan	Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
dengan kemampuan daerah.	pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	berkelanjutan	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	• Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adanya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan meningkat	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Kreatif dan Inovatif untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan berdasarkan riset dan inovasi	
Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan meningkat	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan	Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan meningkat	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Upaya peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Adanya kerjasama internasional/nasional dalam upaya penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Terjalinnya kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	

Tabel 3.8. Kondisi Akhir Ekosistem Riset dan Inovasi Isu Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas & Adaptif yang Diharapkan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Isu permasalahan III: Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Tersedianya kebijakan sebagai upaya penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan tata kelola pemerintahan	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Adanya pengembangan infrastruktur riset dan inovasi terkait upaya penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	anggaran untuk riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Terjalinnya kerjasama riset dan inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Platform Kemitraan Riset Dan Inovasi (Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Konsolidasi antara Para Pemangku Kebijakan dan Stakeholder terkait Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta, Tokoh Masyarakat dan Ormas yang lain)	• Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adanya sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Budaya Kreatif dan Inovatif untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif berdasarkan hasil riset dan inovasi	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan	Adanya prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Upaya peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Keterangan
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Adanya kerjasama internasional/nasional dalam upaya penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Terjalinnya kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Setiap area penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah dilakukan analisis baik terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Analisis kesenjangan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kesenjangan (gap) yang ada antara kondisi awal ekosistem riset dan inovasi di daerah, baik tentang produk-produk unggulan daerah maupun permasalahan-permasalahan daerah, dibandingkan dengan kondisi akhir yang diharapkan.Penjabaran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah sebagai berikut ini:

Tabel 4.1. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan di 2029 Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Produk Unggulan Ubi kayu			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	belum ada kebijakan daerah khusus yang mendukung pengembangan produk ubi kayu dan turunannya	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (ubi kayu)	belum optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi untuk meningkatkan produksi dan produk olahan bahan dasar ubi kayu sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang tata kelola PUD ubi kayu)
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD ubi kayu	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Sudah tersedia lahan percontohan untuk peningkatan produksi ubi kayu, tetapi belum dibuat demplot percontohan	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi ubi kayu, pengolahan (ubi kayu menjadi tepung tapioka) dan pemasaran produk ubi kayu, serta turunannya di Kabupaten Pati	Keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli untuk berinovasi guna meningkatkan daya saing produk dan turunnya ubi kayu, sehingga perlu penyediaan infrastruktur, terutama dalam bentuk sarana dan prasarana produksi seperti peralatan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
			produksi yang lebih modern, akses jalan yang baik, serta revitalisasi pasar produk daerah Pati (Pasar Pragolo)
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD ubi kayu berupa penyediaan bibit	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	dana riset dan inovasi yang tersedia masih terbatas, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	belum ada perlindungan dan pemanfaatan KI untuk ubi kayu	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Platform informasi tentang KI yang tersedia masih terbatas dan belum mudah diakses, serta tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap pentingnya Perlindungan KI, oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Belum optimalnya kelembagaan riset dan inovasi (BSIP Lingkungan Pertanian) yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi di sektor pertanian (khusus PUD ubi kayu)	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar-benar unggul	keterbatasan lahan produksi, keterbatasan modal dan tenaga untuk menghasilkan produk olahan dan keterbatasan jaringan pemasaran. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD ubi kayu
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal.	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan	Pendanaan untuk pengembangan demplot /desa percontohan masih belum optimal, sehingga sulit untuk merencanakan program penelitian dan pengembangan jangka panjang. Oleh karena itu perlu dibuat demplot

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
		berkelanjutan.	penanaman ubi kayu sesuai dengan rencana kerja tahunan berdasarkan skala prioritas
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Keberadaan BSIP Lingkungan Pertanian belum mampu dipergunakan secara maksimal untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian	sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait pengembangan PUD
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD ubi kayu masih belum optimal yaitu pola budidaya masih tradisional, serta teknologi pengolahan produk turunan ubi kayu masih terbatas	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	Biaya mengadopsi dan penerapan teknologi baru tergolong tinggi. Selain itu, terdapat keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu harus dibuat kerjasama dengan tenaga ahli guna mempercepat transfer ilmu dan teknologi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu)	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing.	Biaya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset, seperti biaya pelatihan dan seminar, masih tergolong tinggi. Kurangnya motivasi para pelaku usaha ubi kayu untuk belajar dan menerapkan praktik baru karena mereka merasa sudah terbiasa dengan cara-cara lama yang mereka lakukan. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian khususnya PUD pertanian dan perkebunan (ubi kayu) sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database.	• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD ubi kayu • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya untuk PUD ubi kayu	belum adanya kegiatan promosi/kampanye khusus PUD pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait PUD (misal festival PUD atau pameran produk)
Apresiasi prestasi inovasi	Inovasi : • Aplikasi Determination Of Starch In Cassava Tubers (Descas Ver 1.0) Sebagai Solusi Prediksi Rendemen Pati Dalam Singkong Di Industri Tapioka) • E-Co Waste Water Treatment Rancang Bangun Prototype Pengolah Limbah Cair • Tapioka • Prototype Timbangan Rendemen Ketela Berbasis Arduino (DES 3.0 versi • Alat) • PROMIX: Tepung Tapioka Modifikasi Non Gluten Pengganti	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan	Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
	Terigu • "Mie Gandul": Mie Sehat Bebas Gluten Berbahan Dasar Tepung Tapioka Modifikasi dan Ekstrak Kullit Jeruk • "Pembuatan Tepung Tapioka Modifikasi Hidrolisis Asam Laktat dan Photokimia UV"		
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Peningkatan kelas wirausaha sektor pertanian dan perkebunan (khusus ubi kayu) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	Pelaku usaha sektor pertanian dan perkebunan masih kesulitan untuk berkembang karena pengelolaan yang belum baik, keterbatasan modal dan SDM. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh dinas pertanian untuk meningkatkan pengelolaan usaha, fasilitasi kemudahan peminjaman modal dan pelatihan-pelatihan terhadap SDM pengelola usaha sektor pertanian dan perkebunan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	• Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun	• Data dan informasi terkini (updating) tersedia	• Perangkat daerah melakukan kajian PUD secara sektoral berdasarkan kebutuhan masing-masing Kajian PUD yang ada sudah terlalu lama (tahun 2016) sehingga perlu diperbaharui • Perlu adanya inventarisasi dan pendataan terhadap teknologi yang digunakan masyarakat maupun

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
			kearifan lokal masyarakat dalam pengembangan PUD ubi kayu
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	1. Minimnya riset dan inovasi 2. Rendahnya daya saing di pasaran. 3. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi	Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan	Peningkatan daya saing PUD pertanian dan perkebunan (ubi kayu) terhambat karena keterbatasan modal, ketrampilan SDM serta kurangnya investasi. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif secara khusus penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi untuk PUD ubi kayu
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif.	Kualitas dan produksi PUD ubi kayu belum memenuhi kebutuhan untuk bahan baku industri tepung tapioka. Oleh karena itu perlu adanya pembentukan klaster industri ubi kayu
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian. Untuk ubi kayu belum memproduksi benih sendiri	Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian.	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah belum optimal karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja yang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan pertanian
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk pertanian dan perkebunan (ubi kayu) agar sesuai dengan standar yang diterapkan	Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD ubi kayu)	Produk ubi kayu Kabupaten Pati belum terstandarisasi, sehingga dilakukan standarisasi produk ubi kayu dengan fasilitasi dari dinas pertanian

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pengembangan PUD ubi kayu. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif untuk memulai membangun kerjasama baik secara nasional maupun internasional untuk pembangunan pertanian

Tabel 4.2. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan di 2029 Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Produk Unggulan Kelapa Kopyor			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Kebijakan kepala dinas pertanian untuk pengadaan bibit kelapa kopyor (kultur embrio)	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (Kelapa kopyor)	belum optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi tentang untuk meningkatkan produksi dan produk olahan kelapa kopyor, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang tata kelola PUD kelapa kopyor)
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD kelapa kopyor	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	pengembangan bibit kelapa kopyor melalui kultur jaringan	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi kepala kopyor, pemasaran dan pengolahan produk turunan kepala kopyor di Kabupaten Pati	Keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli untuk berinovasi guna meningkatkan daya saing produk dan turunnya kelapa kopyor, sehingga perlu penyediaan infrastruktur, terutama dalam bentuk sarana dan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
			prasarana produksi seperti peralatan produksi yang lebih modern, akses jalan yang baik, serta revitalisasi pasar produk daerah Pati (Pasar Pragolo)
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD kelapa kopyor berupa dana penyediaan bibit,	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	dana riset dan inovasi yang tersedia masih terbatas, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	belum ada perlindungan dan pemanfaatan KI untuk kelapa kopyor	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Platform informasi tentang KI yang tersedia masih terbatas dan belum mudah diakses, serta tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap pentingnya Perlindungan KI. Oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Belum optimalnya kelembagaan riset dan inovasi (BSIP Lingkungan Pertanian) yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi di sektor pertanian	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar-benar unggul	keterbatasan lahan produksi, keterbatasan modal dan tenaga untuk menghasilkan produk olahan dan keterbatasan jaringan pemasaran. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD kelapa kopyor

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan bibit kelapa kopyor hasil kultur jaringan untuk pengembangan inovasi masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal.	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan.	Pendanaan untuk pengembangan demplot /desa percontohan masih belum optimal, sehingga sulit untuk merencanakan program penelitian dan pengembangan jangka panjang. Oleh karena itu perlu dibuat demplot penanaman ubi kayu sesuai dengan rencana kerja tahunan berdasarkan skala prioritas
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Keberadaan BSIP Lingkungan Pertanian belum mampu dipergunakan secara maksimal untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian	sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait pengembangan PUD
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD kelapa kopyor masih belum optimal, masih dalam tahap penyediaan bibit kelapa kopyor kultur jaringan	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	Biaya mengadopsi dan penerapan teknologi baru tergolong tinggi. Selain itu, terdapat keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu harus dibuat kerjasama dengan tenaga ahli guna mempercepat transfer ilmu dan teknologi

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD kelapa kopyor	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD kelapa kopyor yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing.	Biaya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset, seperti biaya pelatihan dan seminar, masih tergolong tinggi Kurangnya motivasi para pelaku usaha kelapa kopyor untuk belajar dan menerapkan praktik baru karena mereka merasa sudah terbiasa dengan cara-cara lama yang mereka lakukan. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian khususnya PUD kelapa kopyor sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database	• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD kelapa kopyor • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya untuk PUD pertanian	Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan
Apresiasi prestasi inovasi	• Agrowisata kelapa kopyor • pemanfaatan teknologi dengan penggunaan laboratorium dinas pertanian untuk pembuatan bibit kelapa kopyor (kultur embrio)	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan	Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan,

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
			monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Peningkatan kelas wirausaha sektor pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	Pelaku usaha sektor pertanian dan perkebunan masih kesulitan untuk berkembang karena pengelolaan yang belum baik, keterbatasan modal dan SDM. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh dinas pertanian untuk meningkatkan pengelolaan usaha, fasilitasi kemudahan peminjaman modal dan pelatihan-pelatihan terhadap SDM pengelola usaha sektor pertanian dan perkebunan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	• Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun	• Data dan informasi terkini (updating) tersedia	• Perangkat daerah melakukan kajian PUD secara sektoral berdasarkan kebutuhan masing-masing Kajian PUD yang ada sudah terlalu lama (tahun 2016) sehingga perlu diperbaharui • Perlu adanya inventarisasi dan pendataan terhadap teknologi yang digunakan masyarakat maupun kearifan lokal masyarakat dalam pengembangan PUD kelapa kopyor

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	1. Minimnya riset dan inovasi 2. Rendahnya daya saing di pasaran. 3. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi	Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan	Peningkatan daya saing PUD pertanian dan perkebunan (kelapa kopyor) terhambat karena keterbatasan modal, ketrampilan SDM serta kurangnya investasi. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif secara khusus penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi untuk PUD kelapa kopyor
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif.	PUD kelapa kopyor belum diolah produk turunannnya, serta belum ada inovasi pengemasan produk untuk pemasaran agar lebih efisien. Oleh karena itu perlu adanya pembentukan klaster industri kelapa kopyor
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.Kelapa kopyor Kabupaten Pati belum memiliki merek sendiri karena belum tertandai secara indikasi-geografis	Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian.	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah belum optimal karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja yang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan pertanian

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD kelapa kopyor) agar sesuai dengan standar yang diterapkan	Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD kelapa kopyor)	Kepala kopyor Kabupaten Pati belum memiliki sertifikat merk ataupun indikasi geografis., sehingga perlu dilakukan pengajuan sertifikat merk dan penyusunan indikasi geografis kelapa kopyor
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pengembangan PUD kelapa kopyor. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif untuk memulai membangun kerjasama baik secara nasional maupun internasional untuk pembangunan pertanian

Tabel 4.3. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan di 2029 Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Produk Unggulan Jeruk Pamelo			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	SK Menteri Pertanian Nomor 658/Kpts/SR.120/2/2010	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (Jeruk Pamelo)	belum optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi tentang untuk meningkatkan produksi dan produk olahan jeruk pamel, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang tata kelola

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
			PUD jeruk pamelo)
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD jeruk pamelo	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	sudah tersedia kebun tanam jeruk pamelo di Desa Bageng	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi (ubi kayu, kepala kopyor dan jeruk pamelo), pengolahan (ubi kayu menjadi tepung tapioka) dan pemasaran (jeruk pamelo) di Kabupaten Pati	Keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli untuk berinovasi guna meningkatkan daya saing produk dan turunnya jeruk pamelo, sehingga perlu dilakukan sehingga perlu penyediaan infrastruktur, terutama dalam bentuk sarana dan prasarana produksi seperti peralatan produksi yang lebih modern, akses jalan yang baik, serta revitalisasi pasar produk daerah Pati (Pasar Pragolo)
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD jeruk pamelo berupa dana penyediaan bibit, pemeliharaan, dan pemberantasan hama	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	dana riset dan inovasi yang tersedia masih terbatas, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	sudah ada SK Menteri Pertanian terhadap jeruk pamelo dengan nama Jeruk Pamelo Bageng Taji	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Platform informasi tentang KI yang tersedia masih terbatas dan belum mudah diakses, serta tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap pentingnya Perlindungan KI. oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Belum optimalnya kelembagaan riset dan inovasi (BSIP Lingkungan Pertanian) yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi di sektor pertanian	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar-benar unggul	keterbatasan lahan produksi, keterbatasan modal dan tenaga untuk menghasilkan produk olahan dan keterbatasan jaringan pemasaran. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD jeruk pamelo
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan demplot / desa percontohan untuk pengembangan inovasi PUD jeruk pamelo masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal.	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan.	Pendanaan untuk pengembangan demplot /desa percontohan masih belum optimal, sehingga sulit untuk merencanakan program penelitian dan pengembangan jangka panjang. Oleh karena itu perlu optimalisasi dan perhatian khusus demplot jeruk pamelo sesuai dengan rencana kerja tahunan berdasarkan skala prioritas

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Keberadaan BSIP Lingkungan Pertanian belum mampu dipergunakan secara maksimal untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian	sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait pengembangan PUD
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD jeruk pamelo masih belum optimal, karena budidaya masih dijalankan secara tradisional	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	Biaya mengadopsi dan penerapan teknologi baru tergolong tinggi. Selain itu, terdapat keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu harus dibuat kerjasama dengan tenaga ahli guna mempercepat transfer ilmu dan teknologi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD jeruk pamelo	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan (Jeruk pamelo) yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing.	Biaya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset, seperti biaya pelatihan dan seminar, masih tergolong tinggi Kurangnya motivasi para pelaku usaha jeruk pemelo untuk belajar dan menerapkan praktik baru karena mereka merasa sudah terbiasa dengan cara-cara lama yang mereka lakukan. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
			pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian khususnya PUD jeruk pamelo sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database	• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD pertanian (jeruk pamelo) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya untuk PUD pertanian (jeruk pamelo)	belum adanya kegiatan promosi/kampanye khusus PUD pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait PUD (misal festival PUD atau pameran produk)
Apresiasi prestasi inovasi	Inovasi berupa pembuatan selai bahan dasar jeruk pamelo	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan	Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Peningkatan kelas wirausaha sektor pertanian dan perkebunan (PUD jeruk pamelo) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan	Pelaku usaha sektor pertanian dan perkebunan masih kesulitan untuk berkembang karena pengelolaan yang belum baik, keterbatasan modal dan SDM. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh dinas pertanian untuk meningkatkan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
		inovasi.	pengelolaan usaha, fasilitasi kemudahan peminjaman modal dan pelatihan-pelatihan terhadap SDM pengelola usaha sektor pertanian dan perkebunan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	• Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun	• Data dan informasi terkini (updating) tersedia	• Perangkat daerah melakukan kajian PUD secara sektoral berdasarkan kebutuhan masing-masing Kajian PUD yang ada sudah terlalu lama (tahun 2016) sehingga perlu diperbaharui • Perlu adanya inventarisasi dan pendataan terhadap teknologi yang digunakan masyarakat maupun kearifan lokal masyarakat dalam pengembangan PUD jeruk pamelo
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	1. Minimnya riset dan inovasi 2. Rendahnya daya saing di pasaran. 3. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi	Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan	Peningkatan daya saing PUD pertanian dan perkebunan (jeruk pamelo) terhambat karena keterbatasan modal, ketrampilan SDM serta kurangnya investasi. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif secara khusus penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi untuk PUD jeruk pamelo

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif.	PUD jeruk pamelo belum diolah produk turunannnya, serta belum ada inovasi pengemasan produk untuk pemasaran agar lebih efisien. Oleh karena itu perlu adanya pembentukan klaster industri jeruk pamelo
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian. Jeruk pamelo Pati telah terdaftar dengan nama varietas yaitu Jeruk Pamelo Bageng Taji	Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian.	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah belum optimal karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja yang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan pertanian
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD jeruk pamelo) agar sesuai dengan standar yang diterapkan	Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD jeruk pamelo)	• Produk hasil pertanian dan perkebunan belum terstandarisasi dengan baik. • Kurangnya pengawasan terhadap penerapan standar produk pertanian dan perkebunan Kurangnya pengawasan terhadap penerapan standar produk pertanian dan perkebunan • sehingga dilakukan standarisasi produk ubi kayu dengan fasilitasi dari dinas pertanian

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Penguatan kerjasama internasional/ nasional	Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pengembangan PUD jeruk pamelo. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif untuk memulai membangun kerjasama baik secara nasional maupun internasional untuk pembangunan pertanian

Tabel 4.4. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan di 2029 Produk Unggulan Daerah Garam

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Produk Unggulan Garam			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	belum ada kebijakan daerah khusus untuk yang mendukung pengembangan produk garam	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD garam	belum terdapat kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor kelautan perikanan khususnya garam terkait kualitas, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang tata kelola PUD garam)
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD garam	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Sudah tersedia lahan percontohan untuk peningkatan kualitas garam	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk garam di Kabupaten Pati	Keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli untuk pengembangan kualitas garam, sehingga perlu penyediaan infrastruktur, terutama dalam bentuk sarana dan prasarana produksi seperti peralatan produksi yang lebih modern, akses jalan yang baik, serta peningkatan tata kelola usaha garam melalui revitalisasi koperasi dan gudang garam nasional
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD garam berupa bantuan peralatan seperti geoisolator, kincir	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	dana riset dan inovasi yang tersedia masih terbatas, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	produk garam Pati belum memiliki dokumen IG maupun KI	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Platform informasi tentang KI yang tersedia masih terbatas dan belum mudah diakses, serta tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap pentingnya Perlindungan KI. Oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku	Belum terdapatnya kelembagaan riset dan inovasi yang secara spesifik dapat mendorong	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi	keterbatasan lahan produksi, keterbatasan modal dan tenaga untuk

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
kepentingan;	pemanfaatan riset dan inovasi khusus untuk produk garam	dan pengembangan bisnis agar menjadi memiliki produk kelautan perikanan yang unggul	menghasilkan produk olahan dan keterbatasan jaringan pemasaran. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD garam
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan demplot / desa percontohan untuk pengembangan inovasi PUD garam masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih sangat terbatas sebagian besar didanai dari dana pemerintah pusat, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal.	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan.	Pendanaan untuk pengembangan demplot /desa percontohan masih belum optimal, sehingga sulit untuk merencanakan program penelitian dan pengembangan jangka panjang. Oleh karena itu perlu dibuat demplot penanaman ubi kayu sesuai dengan rencana kerja tahunan berdasarkan skala prioritas
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Belum terdapat bentuk kemitraan yang secara resmi dan legal untuk pengembangan PUD garam di Kabupaten Pati	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor kelautan perikanan	sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait pengembangan PUD
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD garam masih berupa penggunaan geoisolator untuk	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	Biaya mengadopsi dan penerapan teknologi baru tergolong tinggi. Selain itu, terdapat keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
	perbaikan kualitas garam		pengembangan PUD garam. Oleh karena itu harus dibuat kerjasama dengan tenaga ahli guna mempercepat transfer ilmu dan teknologi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset khusus PUD garam	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing.	Biaya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset, seperti biaya pelatihan dan seminar, masih tergolong tinggi Kurangnya motivasi para pelaku usaha garam untuk belajar dan menerapkan praktik baru karena mereka merasa sudah terbiasa dengan cara-cara lama yang mereka lakukan. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor kelautan perikanan khususnya PUD garam sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database	• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (garam) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (garam)	belum adanya kegiatan promosi/kampanye khusus PUD kelautan dan perikanan. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait PUD (misal festival PUD atau pameran produk)

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Apresiasi prestasi inovasi	belum ada pembagian kategori khusus PUD untuk lomba inovasi di daerah	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor kelautan dan perikanan	Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Peningkatan kelas wirausaha sektor kelautan dan perikanan (khususnya PUD garam) belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	Pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan masih kesulitan untuk naik kelas dikarenakan kendala adminsitrasi maupun SDM. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pengelolaan usaha, fasilitasi kemudahan peminjaman modal dan pelatihan-pelatihan terhadap SDM pengelola usaha sektor kelautan dan perikanan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	• Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun	• Data dan informasi terkini (updating) tersedia	• Perangkat daerah melakukan kajian PUD secara sektoral berdasarkan kebutuhan masing-masing Kajian PUD yang ada sudah terlalu lama (tahun 2016) sehingga perlu diperbaharui

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
			• Perlu adanya inventarisasi dan pendataan terhadap teknologi yang digunakan masyarakat maupun kearifan lokal masyarakat dalam pengembangan PUD garam
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	1. Minimnya riset dan inovasi 2. Rendahnya daya saing di pasaran. 3. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi	Daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan terhambat karena keterbatasan modal, ketrampilan SDM serta kurangnya investasi. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif secara khusus penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi untuk PUD garam
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif.	Kualitas dan hasil pengolahan garam belum optimal, kadar yodium dan kualitas garam masih tergolong rendah. Oleh karena itu perlu adanya pembentukan klaster industri garam

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	• Pelaksanaan Program kerja disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan • Pelaksanaan Program Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyelarasan antara program / kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program / kegiatan keluatan perikanan yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha kelautan perikanan	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah belum optimal karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja yang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan kelautan dan perikanan
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk kelautan perikanan (PUD garam)	Peningkatan kualitas produk kelautan perikanan (PUD garam)	belum adanya HPP untuk garam pati Kurangnya pengawasan terhadap penerapan standar produk garam konsumsi, sehingga perlu dilakukan penetapan HPP dan standarisasi produk garam dengan fasilitasi dari dinas kelautan dan perikanan
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD garam	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan	Keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pengembangan PUD garam. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif untuk memulai membangun kerjasama baik secara nasional maupun internasional untuk pembangunan kelautan perikanan

Tabel 4.5. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan di 2029 Produk Unggulan Daerah Nila Salin

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Produk Unggulan Garam			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Keputusan Bupati Pati No.523/2249 Tahun 2022 tentang Penetapan Kampung Perikanan Budidaya Ikan Nila Salin di Kab. Pati	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD nila salin	belum maksimalnya pemanfaatan riset dan inovasi tentang untuk meningkatkan produksi, kualitas, serta produk olahan nila salin, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang tata kelola PUD nila salin)
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait PUD nila salin	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Sudah tersedia lahan percontohan untuk pengembangan budidaya dan kualitas nila salin	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk nila salin di Kabupaten Pati	Keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli untuk pengembangan kualitas dan produk olahan nila salin, sehingga perlu penyediaan infrastruktur, terutama dalam bentuk sarana dan prasarana produksi seperti peralatan produksi yang lebih modern, akses jalan yang baik
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	dana atau anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan PUD nila salin berupa dana penyediaan bibit, pemeliharaan, pemberantasan hama dan bantuan peralatan	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	dana riset dan inovasi yang tersedia masih terbatas, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	belum ada perlindungan dan pemanfaatan KI untuk nila salin	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Platform informasi tentang KI yang tersedia masih terbatas dan belum mudah diakses, serta tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap pentingnya Perlindungan KI, oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Belum terdapatnya kelembagaan riset dan inovasi yang secara spesifik dapat mendorong pemanfaatan riset dan inovasi khusus untuk produk nila salin	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis agar menjadi memiliki produk kelautan perikanan yang unggul	keterbatasan lahan produksi, keterbatasan modal dan tenaga untuk menghasilkan produk olahan dan keterbatasan jaringan pemasaran. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD nila salin
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan demplot / desa percontohan untuk pengembangan inovasi PUD nila salin masih terbatas. Pendanaan untuk pengembangan demplot/desa percontohan masih terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang optimal.	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan.	Pendanaan untuk pengembangan demplot /desa percontohan masih belum optimal, sehingga sulit untuk merencanakan program penelitian dan pengembangan jangka panjang. Oleh karena itu perlu dibuat demplot penanaman ubi kayu sesuai dengan rencana kerja tahunan berdasarkan skala prioritas

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	Belum terdapat bentuk kemitraan yang secara resmi dan legal untuk pengembangan nila salin di Kabupaten Pati	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor kelautan perikanan	sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait pengembangan PUD
Peningkatan difusi inovasi;	Model dan strategi transfer teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan PUD nila salin masih belum optimal. Penerapan teknologi masih pada pola budidaya	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	Biaya mengadopsi dan penerapan teknologi baru tergolong tinggi. Selain itu, terdapat keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu harus dibuat kerjasama dengan tenaga ahli guna mempercepat transfer ilmu dan teknologi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	kurangnya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang praktik baik dan hasil riset PUD nila salin	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing.	Biaya akses informasi tentang praktik baik dan hasil riset, seperti biaya pelatihan dan seminar, masih tergolong tinggi Kurangnya motivasi para pelaku usaha nila salin untuk belajar dan menerapkan praktik baru karena mereka merasa sudah terbiasa dengan cara-cara lama yang mereka lakukan. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
			workshop oleh pemerintah daerah
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Kegiatan riset/kajian, kreatifitas dan inovasi di sektor kelautan perikanan khususnya PUD nila salin sudah banyak bermunculan tetapi belum terkelola dan terinventaris sebagai satu kesatuan database	• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (nila salin) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (nila salin)	belum adanya kegiatan promosi/kampanye khusus PUD kelautan dan perikanan. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait PUD (misal festival PUD atau pameran produk)
Apresiasi prestasi inovasi	Inovasi yaitu nila salin presto (NISATO) dan Tong Asap Ikan Gantung (TAIGAN)	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor kelautan dan perikanan	Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Peningkatan kelas wirausaha khusus pembudidaya nila salin belum diarahkan secara spesifik untuk memanfaatkan riset dan inovasi, yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan usaha di masa mendatang.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	Pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan masih kesulitan untuk naik kelas dikarenakan kendala adminsitrasi maupun SDM. dilakukan pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pengelolaan usaha, fasilitasi kemudahan peminjaman modal dan pelatihan-

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
			pelatihan terhadap SDM pengelola usaha sektor kelautan dan perikanan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	• Belum ada update dan implementasi berupa Kebijakan atas kajian dan peraturan yang telah tersusun	• Data dan informasi terkini (updating) tersedia	• Perangkat daerah melakukan kajian PUD secara sektoral berdasarkan kebutuhan masing-masing Kajian PUD yang ada sudah terlalu lama (tahun 2016) sehingga perlu diperbaharui • Perlu adanya inventarisasi dan pendataan terhadap teknologi yang digunakan masyarakat maupun kearifan lokal masyarakat dalam pengembangan PUD nila salin
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	1. Minimnya riset dan inovasi 2. Rendahnya daya saing di pasaran. 3. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi	Daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan (nila salin) terhambat karena keterbatasan modal, ketrampilan SDM serta kurangnya investasi. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif secara khusus penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi untuk PUD nila salin

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum terdapat klaster inovasi berbasis PUD	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif.	Kualitas dan hasil pengolahan PUD nila salin belum optimal, ukuran nila salin belum memenuhi kebutuhan untuk ekspor dan belum banyak produk olahan nila salin (nila salin presto). Oleh karena itu perlu adanya pembentukan klaster industri nila salin
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Pati telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Pati Nomor 523.3/2238 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Budidaya Nila Salin Berkelanjutan di Kecamatan Tayu dan Kawasan Pendukungnya di Kecamatan Margoyoso dan Dukuhseti	Penyelarasan antara program / kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program / kegiatan keluatan perikanan yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha kelautan perikanan	Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah belum optimal karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja yang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan kelautan dan perikanan
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Pelaku usaha berupaya Meningkatkan kualitas produk nila salin agar sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh konsumen	Peningkatan kualitasproduk kelautan perikanan (PUD nila salin)	Produk nila salin belum terstandarisasi dengan baik (ukuran masih kecil), sehingga dilakukan standarisasi produk nila salin dengan fasilitasi dari dinas kelautan dan perikanan
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Pemanfaatan kerjasama nasional dalam rangka pengembangan PUD masih harus terus ditingkatkan untuk mencapai target yang direncanakan	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan	Keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pengembangan PUD nila salin. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif untuk memulai membangun kerjasama baik secara nasional

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
			maupun internasional untuk pembangunan kelautan dan perikanan

Tabel 4.6. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang diharapkan Tahun 2029 Isu Permasalahan SDM yang Berdaya Saing

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Isu permasalahan I: SDM yang berdaya saing			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	• Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial • Peraturan Bupati Pati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat • Perbup Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati • Perbup Nomor 38 Tahun 2020 mengatur tentang kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di tingkat desa Keputusan Bupati Pati NO. 400/1072 tahun 2024 tentang	Tersedianya kebijakan sebagai upaya menyelesaikan isu permasalahan daya saing SDM	Belum optimalnya penggunaan hasil kajian/riset dan inovasi dalam penyusunan kebijakan dalam upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*)

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
	pembentukan tim koordinasi penggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati		
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan daya saing SDM terintegrasi	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	infrastruktur khusus untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi dalam rangka penanganan permasalahan daya saing SDM belum optimal seperti laboratorium kesehatan yang masih terbatas kapasitas penggunaannya, serta belum memiliki laboratorium pangan	Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal	Belum optimalnya infrastruktur riset dan inovasi, anggaran masih terbatas, sehingga perlu penyediaan infrastruktur dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung peningkatan daya daya saing SDM
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	dana atau anggaran khusus yang dialokasikan belum optimal untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM yang dihadapi (kemiskinan, stunting,kematian ibu)	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	belum dialokasikan khusus dana untuk riset dan inovasi, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Perlu optimalisasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM. oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset	Belum sinerginya kolaborasi riset dan	Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang	Perlu upaya menjalin

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	inovasi antar lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga pelaksana kegiatan teknis	menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	kerjasama riset dan inovasi dengan pemangku kepentingan penanganan isu permasalahan daya saing SDM. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) yang terkait dengan peningkatan daya saing SDM
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM masih terbatas, seperti perpustakaan daerah yang belum optimal menyediakan bahan referensi terbaru, keterbatasan SDM sesuai bidang kepakaran, dan sarana laboratorium yang masihbterbatas	Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Pemenuhan sarana pendukung riset dan inovasi terkait untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM. sehingga sulit untuk merencanakan program penelitian dan pengembangan jangka panjang. Oleh karena itu perlu dibuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan sarana pendukung riset dan iniovasi
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	• Belum terlaksananya koordinasi, kolaborasi, Kerjasama maupun upaya konsolidasi khususnya oleh para pemangku kebijakan daerah. • Belum berkembangnya platform kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan perguruan tinggi	• Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah	sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait upaya peningkatan daya saing SDM

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM belum optimal dan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat	Peningkatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Belum teridentifikasinya/terpetakan karakteristik daya saing SDM di Kabupaten Pati	SDM yang berkualitas dan berdaya saing, serta memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam penggunaan teknologi, dapat dioptimalkan kreatifitasnya untuk pembangunan daerah	belum adanya kegiatan promosi/kampanye khusus penanganan isu permasalahan daerah. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait upaya penanganan isu permasalahan daerah
Apresiasi prestasi inovasi	Apresiasi prestasi inovasi belum optimal, secara kualitas dan manfaat inovasi belum banyak menyentuh penyelesaian masalah daya saing SDM	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat	Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Belum ada inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu	Perlunya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
	permasalahan daya saing SDM	permasalahan daya saing SDM	masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM belum optimal, karena keterbatasan sarana dan anggaran	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat	Perlunya diinisiasi prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Kebijakan sudah sinkron antara Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan daya saing SDM, namun kompleknya masalah yang dihadapi sehingga hasil yang diperoleh belum optimal	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Perlunya penguatan sinergi penyesuaian kebijakan/regulasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan isu permasalahan daya saing SDM. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja secara bertahap untuk penanganan permasalahan daerah
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM belum optimal. Penanganan masalah lebih diprioritaskan untuk penyelesaian isu yang terjadi di daerah	Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM	Pelaksanaan analisis/kajian terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah erkait penanganan permasalahan daya saing SDM belum dilakukan secara periodik. Oleh karena itu perlu disusun rencana kerja

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
			tahunan sebagai upaya penanganan isu permasalahan daerah
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daya saing SDM masih sangat terbatas dan bergantung pada pendanaan dari pusat	Terjalinnya kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Jejaring internasional untuk menjalin kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daya saing SDM belum dibangun. Oleh karena itu perlu inisiasi dari pemerintah daerah (dinas2 terkait) untuk mulai membangun kerjasama secara nasional/internasional

Tabel 4.7. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang diharapkan Tahun 2029 Isu Permasalahan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Isu permasalahan II: Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	• Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah • Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 108 Tahun 2018 tentang Kolaborasi	Tersedianya kebijakan sebagai upaya penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Belum optimalnya penggunaan hasil kajian/riset dan inovasi dalam penyusunan kebijakan dalam upaya penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based*

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
	Pengelolaan Jalan Desa • Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati • Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah • Peraturan Bupati Pati Nomor 112 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pati dalam Pengelolaan Sampah • Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah • Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman • Perda Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun		*policy*)

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
	2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas • Peraturan Pati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana		
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan terintegrasi	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	sudah tersedia balai latihan kerja, terdapat fasilitas TPA dengan pengolahannya, terbentuk destana (Desa Tangguh Bencana)	Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal	Belum optimalnya infrastruktur riset dan inovasi, anggaran masih terbatas, sehingga perlu penyediaan infrastruktur dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	dana atau anggaran khusus yang dialokasikan masih terbatas untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan yang dihadapi	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	belum dialokasikan khusus dana untuk riset dan inovasi, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Perlu optimalisasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Belum sinerginya kolaborasi riset dan inovasi antar lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga pelaksana kegiatan teknis	Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Perlu upaya menjalin kerjasama riset dan inovasi dengan pemangku kepentingan penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) yang terkait dengan pembagunan yang inklusif dan berkelanjutan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan masih terbatas (terdapat balai latihan kerja dan TPA)	Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Pemenuhan sarana pendukung riset dan inovasi terkait untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu dibuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan sarana

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	• Belum terlaksananya koordinasi, kolaborasi, Kerjasama maupun upaya konsolidasi khususnya oleh para pemangku kebijakan daerah. • Belum berkembangnya platform kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan perguruan tinggi	• Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah	sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait permasalahan pembangunan di Kabupaten Pati
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka p penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan belum optimal dan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan meningkat	Peningkatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Belum teridentifikasinya/terpetakan karakteristik pembangunan di Kabupaten Pati	Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan berdasarkan riset dan inovasi	belum adanya kegiatan promosi/kampanye khusus penanganan isu permasalahan daerah. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait upaya penanganan isu permasalahan daerah

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Apresiasi prestasi inovasi	Apresiasi prestasi inovasi belum optimal, secara kualitas dan manfaat inovasi belum banyak menyentuh penyelesaian masalah pembangunan daerah	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan meningkat	Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Belum ada inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Perlunya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan belum optimal karena keterbatasan sarana dan anggaran	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan meningkat	Perlunya diinisiasi prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Kebijakan sudah sinkron antara Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan pembangunan yang inkusif dan berkelanjutan, namun kompleknya masalah yang dihadapi sehingga hasil yang diperoleh	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Perlunya penguatan sinergi penyesuaian kebijakan/regulasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan isu permasalahan Pembangunan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
	belum optimal		Yang Inklusif & Berkelanjutan. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja secara bertahap untuk penanganan permasalahan daerah
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah+A23:I23	Kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan belum optimal. Penanganan masalah lebih diprioritaskan untuk penyelesaian isu yang terjadi di daerah	Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Pelaksanaan analisis/kajian terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah erkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan belum dilakukan secara periodik. Oleh karena itu perlu disusun rencana kerja tahunan sebagai upaya penanganan isu permasalahan daerah
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Belum ada kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan masih sangat terbatas dan bergantung pada pendanaan dari pusat	Terjalinnya kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Jejaring internasional untuk menjalin kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan belum dibangun. Oleh karena itu perlu inisiasi dari pemerintah daerah (dinas2 terkait) untuk mulai membangun kerjasama secara nasional/internasional

Tabel 4.8. Analisis Kesenjangan Kondisi Kajian Saat Ini dan Kondisi yang diharapkan Tahun 2029 Isu Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Adaptif

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Isu permasalahan III: Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif			
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	• Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021-2025 • Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati • Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Tersedianya kebijakan sebagai upaya penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Belum optimalnya penggunaan hasil kajian/riset dan inovasi dalam penyusunan kebijakan dalam upaya penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif, sehingga diperlukan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*)
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Belum terdapat basis data riset dan inovasi terkait isu permasalahan tata kelola pemerintahan terintegrasi	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Harus dilakukan penyusunan Database Sistem Informasi Iptek Daerah baru mulai dirintis akhir tahun 2024
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	terdapat Mall Pelayanan Publik (MPP)	Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal	Belum optimalnya infrastruktur riset dan inovasi, anggaran masih terbatas, sehingga perlu penyediaan infrastruktur dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	dana atau anggaran khusus yang dialokasikan belum optimal untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif yang dihadapi	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	belum dialokasikan khusus dana untuk riset dan inovasi, sehingga pengganggaran riset dan inovasi perlu dialokasikan secara khusus dan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Perlu optimalisasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif. oleh karena itu harus dibuat sistem informasi terpadu yang memuat informasi tentang KI
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Belum sinerginya kolaborasi riset dan inovasi antar lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga pelaksana kegiatan teknis	Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Perlu upaya menjalin kerjasama riset dan inovasi dengan pemangku kepentingan penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif. Oleh karena itu harus diperkuat kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) yang terkait dengan permasalahan tata kelola pemerintahan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	belum tersedia sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Pemenuhan sarana pendukung riset dan inovasi terkait untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif. Oleh karena itu perlu dibuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan sarana pendukung riset dan iniovasi
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan kemitraan antar lembaga	• Belum terlaksananya koordinasi, kolaborasi, Kerjasama maupun upaya konsolidasi khususnya oleh para pemangku kebijakan daerah. • Belum berkembangnya platform kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan perguruan tinggi	• Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah	sinergitas dan kolaborasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi, sehingga harus dilakukan Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik terkait permasalahan tata kelola pemerintahan
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka p penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum optimal dan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat	Peningkatan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif. Dengan demikian perlu lebih banyak diselenggarakan pelatihan dan workshop oleh pemerintah daerah

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Belum teridentifikasinya/terpetakan karakteristiktata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati	Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif berdasarkan hasil riset dan inovasi	belum adanya kegiatan promosi/kampanye khusus penanganan isu permasalahan daerah. Oleh karena itu perlu diselenggarakan sebuah event khusus terkait upaya penanganan isu permasalahan daerah
Apresiasi prestasi inovasi	Apresiasi prestasi inovasi belum optimal, secara kualitas dan manfaat inovasi belum banyak menyentuh penyelesaian masalah tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat	Apresiasi terhadap inovasi berupa pemberian penghargaan dan hadiah inovasi daerah dan lomba krenova, belum terdapat pendampingan lanjutan, sehingga perlu dilakukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi terhadap inovasi yang dihasilkan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Belum ada inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Perlunya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan Tata	Perlunya diinisiasi prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
mengatasi permasalahan	Yang Berkualitas & Adaptif belum optimal	Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat	kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Belum optimalnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Perlunya penguatan sinergi penyesuaian kebijakan/regulasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif. Dengan demikian perlu dibuat rencana kerja secara bertahap untuk penanganan permasalahan daerah
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum optimal karena keterbatasan sarana dan anggaran	Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Pelaksanaan analisis/kajian terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah erkait penanganan permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum dilakukan secara periodik. Oleh karena itu perlu disusun rencana kerja tahunan sebagai upaya penanganan isu permasalahan daerah
Penguatan kerjasama	Belum optimalnya Sinkronisasi Kebijakan	Terjalinnya kerjasama internasional/nasional	Jejaring internasional

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang diharapkan di 2029	Kesenjangan
internasional/nasional	Pemerintah pusat dengan daerah terkait penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif, namun kompleknya masalah yang dihadapi sehingga hasil yang diperoleh belum optimal	dalam penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	untuk menjalin kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif belum dibangun. Oleh karena itu perlu inisiasi dari pemerintah daerah (dinas2 terkait) untuk mulai membangun kerjasama secara nasional/internasional

BAB V STRATEGI PENGEMBANGAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

5.1. Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)

Strategi pengembangan ekosistem riset dan Inovasi di daerah menjabarkan mengenai prakarsa strategis serta langkah yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD). Strategi ini ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah melalui pengembangan PUD mulai dari level makro, meso, dan mikro.

Level makro bertujuan untuk mempersiapkan kerangka umum pengembangan produk unggulan daerah serta mengatasi permasalahan utama daerah. Level meso bertujuan untuk menumbuhkan kolaborasi antar pelaku ekonomi melalui pembentukan klaster industri berbasis PUD, serta keterpaduan antara peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sektor yang terkait dengan PUD. Sedangkan level mikro bertujuan menumbuhkan wirausaha baru berbasis riset dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dari PUD.

Besarnya potensi ekonomi dari sejumlah pertanian dan perkebunan, serta kelautan dan perikanan menunjukkan adanya prospek yang sangat besar untuk secara bertahap mendorong pengembangan PUD di sektor tersebut dan memperluas pemasarannya. Strategi pengembangan juga mencakup penguatan infrastruktur riset dan inovasi untuk mendukung sektor unggulan.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan ekosistem riset dan Inovasi di Daerah untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah, seperti tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1	Menyusun kebijakan dan penyediaan infrastruktur riset dan inovasi	Melakukan Kajian, Rekomendasi Kebijakan dan inovasi pengembangan PUD, mengembangkan sistem informasi riset dan inovasi, menyediakan sarana, prasarana budidaya, menyempurnakan teknologi, meningkatkan ketersediaan bibit unggul
2	Mengembangkan Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi	Memanfaatkan kelembagaan riset dan inovasi yang didukung dengan upaya studi banding ke daerah lain yang sudah berhasil, melakukan evaluasi mendalam tentang kebutuhan dan kapasitas lokal dalam mendukung riset dan inovasi, menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk meningkatkan

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
		dukungan dan akses ke teknologi, meningkatkan kapasitas lokal dalam pengelolaan dan operasional demplot melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, memprioritaskan pengembangan produk unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing di pasar
3	Meningkatkan kemitraan riset dan inovasi	• Melakukan kajian identifikasi model kemitraan antar stakeholders (pemda, pelaku usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, lembaga riset dan komunitas masyarakat) dalam memperkuat sektor pertanian dan perkebunan di Pati • Membentuk Forum kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku bisnis mengenai teknologi baru dan teknik inovatif. • Membangun kolaborasi yang efektif antara pelaku bisnis, lembaga riset, dan sektor swasta • Mendukung petani dan pembudidaya produk unggulan daerah dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru • Membentuk koperasi produksi untuk memfasilitasi pemasaran, dan pembelian peralatan pengolahan produk • Mendokumentasikan praktik terbaik dalam produksi, hasil olahan, dan pemasaran • Menyelenggarakan pelatihan yang mengacu pada hasil riset terbaru mengenai teknologi dan pengolahan produk • Menciptakan forum dan jaringan untuk pertukaran pengetahuan dan praktik baik di antara para pelaku usaha • Mempublikasikan dan promosikan hasil riset yang relevan dengan usaha
4	Meningkatkan budaya riset dan inovasi	• Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pelaksanaan kegiatan riset/pengkajian, kreatifitas dan inovasi di sektor pertanian dan perkebunan • Memberikan pendampingan kepada pemenang dan peserta terpilih, seperti akses ke mentor, jaringan industri, atau peluang kolaborasi • Melakukan kajian/riset dan inovasi tentang pengembangan UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan • Meningkatkan daya saing UMKM berbasis klaster inovasi
5	Meningkatkan keterpaduan riset dan inovasi	• Meningkatkan ketrampilan SDM di sektor pertanian dan perkebunan • Meningkatkan akses pemodalan untuk sektor pertanian dan perkebunan • Memberikan bantuan dan fasilitasi untuk sertifikasi produk untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menarik investasi dari pihak swasta • Membentuk klaster inovasi berbasis

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
		produk unggulan daerah • Melakukan kajian potensi dan kelayakan program dan kegiatan pertanian dan perkebunan dari pemerintah pusat
6	Meningkatkan Penyelarasan dengan perkembangan global	• Meningkatkan standar dan kualitas produk unggulan daerah ubi kayu • Mengidentifikasi lembaga, perusahaan, dan organisasi internasional/nasional yang memiliki kepentingan dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan • Melakukan kerja sama dengan lembaga internasional/nasional untuk mengembangkan standar kualitas yang sesuai dengan pasar global

5.2. Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah

Strategi pengembangan ekosistem riset dan Inovasi di daerah juga digunakan untuk dalam menghadapi isu permasalahan daerah Kabupaten Pati. Strategi ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul atau mengembangkan potensi yang ada.

Isu pemasalahan daerah Kabupaten Pati yang akan dihadapi tahun 2025-2029 adalah mengenai SDM yang Berdaya Saing, Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Adaptif.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan ekosistem riset dan Inovasi di Daerah untuk mengatasi isu permasalahan daerah Kabupaten Pati, seperti tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Utama Daerah

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1	Optimalisasi kebijakan yang terkait dengan permasalahan utama daerah.	Meningkatkan pelaksanaan peraturan perundangan di daerah terkait dengan permasalahan utama daerah, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan lintas perangkat daerah dan lembaga non pemerintah daerah secara aktif. Mengoptimalkan penggunaan riset untuk penanganan isu permasalahan daerah
2	Optimalisasi penggunaan dan penyediaan infrastruktur riset dan inovasi yang terkait dengan permasalahan utama daerah	Mengoptimalkan dan menyediakan infrastruktur riset dan inovasi terkait penanganan isu permasalahan daerah, mengoptimalkan alokasi anggaran penanganan isu permasalahan daerah
3	Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan di bidang riset dan teknologi, serta mendorong kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan penelitian
4	Membangun kemitraan dan Kolaborasi dengan Stakeholder	Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, universitas, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem inovasi yang lebih terintegrasi dan sinergis. Membentuk forum

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
		kemitraan riset dan inovasi antara pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan penyedia/tenaga ahli. Melakukan kolaborasi diseminasi praktik baik dan hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan daerah
5	Peningkatan budaya riset dan inovasi	Menggunakan riset dan inovasi sebagai dasar penentuan pembangunan di kabupaten Pati. Mengoptimalkan pemberian apresiasi atas inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daerah, mengoptimalkan Ide-ide kreatif dari masyarakat
6	Peningkatan keterpaduan riset dan inovasi di daerah	• Mengoptimalkan jaringan kelitbangan dalam pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk penanganan isu permasalahan daerah • Melakukan kajian untuk mengoptimalkan kesesuaian kebijakan yang ada di Kabupaten dengan kebijakan pusat terkait penanganan isu permasalahan daerah
7	Penyelarasan dengan perkembangan global	• Mempersiapkan komponen utama maupun pendukung yang dapat melakukan analisis/kajian secara periodik terkait penanganan permasalahan daerah mengikuti standar global utamanya terkait: SDM PNS peneliti/analis/ahli yang kompeten, sistem data, anggaran dan jaringan kelitbangan • Membuka relasi dan jaringan dengan lembaga kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan daerah

BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Peta jalan riset dan inovasi di daerah adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai kondisi ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan/ diinginkan dalam pengembangan PUD dan permasalahan utama daerah selama lima tahun (tahun 2025-2029). Langkah-langkah strategis tersebut meliputi 6 elemen ekosistem riset dan inovasi maupun sub-elemen masing-masing elemen.

Keenam elemen tersebut dijalankan secara terintegrasi/ bersama-sama oleh masing-masing perangkat daerah sesuai urusannya. Namun intensitas/penekanan masing-masing elemen dapat berbeda sesuai kebutuhannya. Misalnya di tahun pertama ditekankan kepada reformasi kebijakan yang mendukung dan revitalisasi infrastruktur riset dan inovasi. Di samping itu juga dijalankan elemen-elemen yang lain dengan kadar/ intensitas yang berbeda. Peta jalan riset dan inovasi daerah akan menggambarkan langkah-langkah dan fokus dari elemen/sub-elemen tiap tahun dalam periode 5 tahun ke depan (tahun 2025-2029).

Peta jalan riset dan inovasi selanjutnya akan dirumuskan menjadi rencana aksi masing-masing elemen/sub-elemen. Pada akhirnya akan menjadi rencana aksi, setelah disinkronisasi dengan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih (dalam proses penyusunan RPJMD tahun 2025-2029).

Tabel 6.1. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah
Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu					
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Perumusan kebijakan pengembangan produk ubi kayu (perda atau perbup tentang tata kelola PUD ubi kayu)	Implementasi terhadap kebijakan pengembangan produk ubi kayu (perda atau perbup tentang tata kelola PUD ubi kayu)	Implementasi terhadap kebijakan pengembangan produk ubi kayu (perda atau perbup tentang tata kelola PUD ubi kayu)	Implementasi terhadap kebijakan pengembangan produk ubi kayu (perda atau perbup tentang tata kelola PUD ubi kayu)	Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan produk ubi kayu (perda atau perbup tentang tata kelola PUD ubi kayu)
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Penggunaan dan pengembangan Database	Penerapan Database Sistem Informasi	Penerapan Database Sistem Informasi	Penerpan Database Sistem Informasi	Evaluasi terhadap penerapan Database

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Sistem Informasi Iptek Daerah	Iptek Daerah	Iptek Daerah	Iptek Daerah	Sistem Informasi Iptek Daerah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Penyediaan infrastruktur peralatan produksi ubi kayu	perbaikan jalan diarea produksi ubi kayu	perbaikan jalan diarea produksi ubi kayu	Revitalisasi pasar pragola	Evaluasi terhadap kegiatan penyediaan sarana dan prasarana terkait PUD Ubi kayu
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Perumusan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Inisiasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD ubi kayu	Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD ubi kayu	Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD ubi kayu	Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD ubi kayu	Evaluasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD ubi kayu

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Demplot varietas baru ubi kayu Pembinaan 727 Poktan Tanaman Pangan di 10 Kecamatan Sentra Ubi Kayu	Demplot varietas baru ubi kayu Pembinaan 727 Poktan Tanaman Pangan di 10 Kecamatan Sentra Ubi Kayu	Demplot varietas baru ubi kayu Pembinaan 727 Poktan Tanaman Pangan di 10 Kecamatan Sentra Ubi Kayu	Demplot varietas baru ubi kayu Pembinaan 727 Poktan Tanaman Pangan di 10 Kecamatan Sentra Ubi Kayu	Demplot varietas baru ubi kayu Pembinaan 727 Poktan Tanaman Pangan di 10 Kecamatan Sentra Ubi Kayu
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi					
Penguatan kemitraan antar lembaga		Kerjasama dengan BSIP Sulawesi untuk pembelian bibit ubi kayu varietas baru, kategori bibit yang dicari adalah yang berproduksi tinggi dengan kandungan pati tinggi	implemetasi hasil kerjasama dengan Kerjasama dengan BSIP Sulawesi	implemetasi hasil kerjasama dengan Kerjasama dengan BSIP Sulawesi	Evaluasi terhadap hasil kerjasama dengan Kerjasama dengan BSIP Sulawesi
Peningkatan difusi inovasi;	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi					
Promosi dan kampanye inovasi;		Inisiasi penyelenggaraan pameran produk PUD		Inisiasi penyelenggaraan pameran produk PUD	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Apresiasi prestasi inovasi	• Terlaksanaanya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksanaanya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksanaanya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksanaanya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksanaanya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan pemasarandigital bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi UMKM.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.		Inisiasi pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembangan PUD ubi kayu	Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembangan PUD ubi kayu		
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD		kajian/penelitian terkait PUD ubi kayu (identifikasi faktor-faktor produksi)	kajian/ penelitian terkait PUD ubi kayu (penguatan kelembaga-an)	kajian/penelitian terkait PUD ubi kayu (pengembangan pemasaran produk dan turunannya)	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	inisiasi pembentuk-an klaster inovasi berbasis PUD	Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Implementa-si pembentuk-an klaster inovasi berbasis PUD	Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Evaluasi terhadap klaster inovasi berbasis PUD
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah	Upaya peningkatan produktivi-tas PUD ubi kayu dengan	Upaya peningkatan produktivitas PUD ubi kayu dengan	Upaya peningkatan produktivi-tas PUD ubi kayu dengan	Evaluasi terhadap varietas-varietas baru yang	Implementa-si penggunaan varietas baru yang

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Daerah	pembuatan demplot varietas baru	pembuatan demplot varietas baru	pembuatan demplot varietas baru	diujicobakan	dipilih dari hasil evaluasi
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah		Standarisasi terhadap produk ubi kayu		Standarisasi terhadap produk ubi kayu	
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah

Tabel 6.2. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah
Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor					
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Perumusan kebijakan pengembangan produk kelapa kopyor (perda atau perbup tentang tata kelola PUD kelapa kopyor)	Implementasi terhadap kebijakan pengembangan produk kelapa kopyor (perda atau perbup tentang tata kelola PUD kelapa kopyor)	Implementasi terhadap kebijakan pengembangan produk kelapa kopyor (perda atau perbup tentang tata kelola PUD kelapa kopyor)	Implementasi terhadap kebijakan pengembangan produk kelapa kopyor (perda atau perbup tentang tata kelola PUD kelapa kopyor)	Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan produk kelapa kopyor (perda atau perbup tentang tata kelola PUD kelapa kopyor)
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Penggunaan dan pengembangan Database	Penerapan Database Sistem Informasi	Penerapan Database Sistem Informasi	Penerpan Database Sistem Informasi	Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Sistem Informasi Iptek Daerah	Iptek Daerah	Iptek Daerah	Iptek Daerah	Informasi Iptek Daerah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;		Penyediaan infrastruktur peralatan produksi kelapa kopyor		Revitalisasi pasar pragola	Evaluasi terhadap kegiatan penyediaan sarana dan prasarana terkait PUD kelapa kopyor
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebun-an	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Perumusan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebun-an	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;		Inisiasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang-an PUD kelapa kopyor	Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang-an PUD kelapa kopyor	Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang-an PUD kelapa kopyor	Evaluasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang-an PUD kelapa kopyor
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan	Pembuatan benih kultur embrio 180 batang	Pembuatan benih kultur embrio 180 batang	Pembuatan benih kultur embrio 240 batang	Pembuatan benih kultur embrio 240 batang	Pembuatan benih kultur embrio 300 batang

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
kemampuan daerah.					
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi					
Penguatan kemitraan antar lembaga	Tergabung daam Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) Kab. Pati, BPSB Provinsi Jawa Tengah pos Pati	Tergabung daam Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) Kab. Pati, BPSB Provinsi Jawa Tengah pos Pati	Tergabung daam Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) Kab. Pati, BPSB Provinsi Jawa Tengah pos Pati	Tergabung daam Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) Kab. Pati, BPSB Provinsi Jawa Tengah pos Pati	Tergabung daam Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) Kab. Pati, BPSB Provinsi Jawa Tengah pos Pati
Peningkatan difusi inovasi;	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi					
Promosi dan kampanye inovasi;		Inisiasi penyelenggaraan pameran produk PUD		Inisiasi penyelenggaraan pameran produk PUD	
Apresiasi prestasi inovasi	• Terlaksananya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksananya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksanaanya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksananya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksanaanya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi UMKM.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.			Inisiasi pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembangan PUD kelapa kopyor	Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembangan PUD kelapa kopyor	
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD			• kajian/penelitian terkait PUD kelapa kopyor (identifikasi faktor-faktor produksi) • Pengembangan Bibit kelapa kopyor yang dapat menghasilkan 100% kelapa kopyor	• kajian/penelitian terkait PUD kelapa kopyor (pemasaran kelapa kopyor) • Inovasi cara pengemasan produk untuk pemasaran	• kajian/penelitian terkait PUD kelapa kopyor (pengembangan produk turunannya) • inovasi produk olahan dan turunan kelapa kopyor
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	inisiasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Evaluasi terhadap klaster inovasi berbasis PUD
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Upaya peningkatan produktivitas PUD kelapa kopyor dengan pembuatan kultur embrio	Upaya peningkatan produktivitas PUD kelapa kopyor dengan pembuatan kultur embrio	Upaya peningkatan produktivitas PUD kelapa kopyor dengan pembuatan kultur embrio	Upaya peningkatan produktivitas PUD kelapa kopyor dengan pembuatan kultur embrio	Evaluasi terhadap produksi kelapa kopyor dari pohon kelapa kopyor hasil kultur embrio

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah			Sertifikasi Varietas kelapa kopyor pati		
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah

Tabel 6.3. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah
Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo					
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Perumusan kebijakan pengembangan produk jeruk pamelo (perda atau perbup tentang tata kelola PUD jeruk pamelo)	Implementasi terhadap kebijakan pengembangan produk jeruk pamelo perda atau perbup tentang tata kelola PUD jeruk pamelo)	Implementasi terhadap kebijakan pengembangan produk jeruk pamelo perda atau perbup tentang tata kelola PUD jeruk pamelo)	Implementasi terhadap kebijakan pengembangan produk jeruk pamelo perda atau perbup tentang tata kelola PUD jeruk pamelo)	Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan produk jeruk pamelo perda atau perbup tentang tata kelola PUD jeruk pamelo)
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Penggunaan dan pengembangan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerpan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;			Penyediaan infrastruk-tur peralatan produksi jeruk pamelo	perbaikan jalan diarea produksi jeruk pamelo	Revitalisasi pasar pragola
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebun-an	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebun-an	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Perumusan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebun-an	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebun-an	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait PUD Sektor pertanian dan perkebunan
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;			Inisiasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengemban-gan PUD jeruk pamelo	Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD jeruk pamelo	Evaluasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembanga n PUD jeruk pamelo
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Pembinaan Kelompok Tani Hortikultu-ra (Jeruk Pamelo) Penangan-an penyakit tanaman jeruk pamelo	Penanganan penyakit tanaman jeruk pamelo	Penangana n penyakit tanaman jeruk pamelo	Penanganan penyakit tanaman jeruk pamelo	Penanganan penyakit tanaman jeruk pamelo

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi					
Penguatan kemitraan antar lembaga	Kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro Batu Malang)	Kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro Batu Malang)	Kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro Batu Malang)	Kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro Batu Malang)	Kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro Batu Malang)
Peningkatan difusi inovasi;	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati	Pengoptimalan kinerja UPTD Balai Benih Dispertan Kab. Pati
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebun-an	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebun-an	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor pertanian dan perkebunan
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi					
Promosi dan kampanye inovasi;		Inisiasi penyelenggaraan pameran produk PUD		Inisiasi penyelenggaraan pameran produk PUD	
Apresiasi prestasi inovasi	• Terlaksanaanya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksanaanya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksanaanya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksananya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksanaanya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan pemasar-	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan pemasaran	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi UMKM

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	UMKM.	an digital bagi UMKM.	UMKM.	digital bagi UMKM.	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.				Inisiasi pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembangan PUD jeruk pamelo	Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembang-an PUD jeruk pamelo
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD				• kajian/peneliti-an terkait PUD jeruk pamelo (pemasaran) • Inovasi cara pengemasan produk untuk pemasaran	• kajian/pene litian terkait PUD jeruk pamelo (produk turunan) • Inovasi produk olahan dan turunan
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	inisiasi pembentuk an klaster inovasi berbasis PUD	Implementa-si pembentuk-an klaster inovasi berbasis PUD	Implementa si pembentuk an klaster inovasi berbasis PUD	Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Evaluasi terhadap klaster inovasi berbasis PUD
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Upaya peningkat-an produktivi-tas PUD sektor pertanian dan perkebunan	Upaya peningkatan produktivi-tas PUD sektor pertanian dan perkebunan	Upaya peningkat-an produktivi-tas PUD sektor pertanian dan perkebunan	Upaya peningkatan produktivitas PUD sektor pertanian dan perkebunan	Upaya peningkatan produktivitas PUD sektor pertanian dan perkebunan
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah		Sertifikasi Varietas Jeruk Pamelo		Sertifikasi benih hasil kultur embrio	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah

Tabel 6.4. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah
Produk Unggulan Daerah Garam

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Produk Unggulan Garam					
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Perumusan kebijakan pengembangan produk garam (perda atau perbup tentang tata kelola PUD garam)	Implementasi terhadap kebijakan pengembangan produk garam (perda atau perbup tentang tata kelola PUD garam)	Implementasi terhadap kebijakan pengembangan produk garam (perda atau perbup tentang tata kelola PUD garam)	Implementasi terhadap kebijakan pengembangan produk garam (perda atau perbup tentang tata kelola PUD garam)	Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan produk garam (perda atau perbup tentang tata kelola PUD garam)
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Penggunaan dan pengembangan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerpan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Penyediaan infrastruktur peralatan produksi garam	perbaikan jalan diarea produksi garam	perbaikan jalan diarea produksi garam	Revitalisasi pasar pragola	Evaluasi terhadap kegiatan penyediaan sarana dan prasarana terkait PUD garam
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD	Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Sektor kelautan dan perikanan	Sektor kelautan dan perikanan	Sektor kelautan dan perikanan	Sektor kelautan dan perikanan	inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Perumusan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan	Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;		Inisiasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang-an PUD garam	Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengem-bangan PUD garam	Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang-an PUD garam	Evaluasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembang-an PUD garam
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penetapan HPP Garam Terbentukn ya KUB Garam	Penetapan HPP Garam Terbentuknya Koperasi Garam	Penetapan HPP Garam Terbentuk-nya Managemen Koperasi Garam yang kredibel	Penetapan HPP Garam	Penetapan HPP Garam
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi					
Penguatan kemitraan antar lembaga	Kerjasama simbiosis mutualisme dengan PT SPJT, PT Garam dan pihak swasta	Kerjasama simbiosis mutualisme dengan PT SPJT, PT Garam dan pihak swasta	Kerjasama simbiosis mutualisme dengan PT SPJT, PT Garam dan pihak swasta	Kerjasama simbiosis mutualisme dengan PT SPJT, PT Garam dan pihak swasta	Kerjasama simbiosis mutualisme dengan PT SPJT, PT Garam dan pihak swasta
Peningkatan difusi inovasi;	Pengoptimal an kinerja KUB dan BBI	Pengoptimal-an kinerja KUB dan BBI	Pengoptimal an kinerja KUB dan BBI	Pengoptimal-an kinerja KUB dan BBI	Pengoptimal-an kinerja KUB dan BBI
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
pelaku inovasi.	dan Perikanan	Perikanan	dan Perikanan	Perikanan	Perikanan
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi					
Promosi dan kampanye inovasi;		Inisiasi penyelenggaraan pameran produk PUD		Inisiasi penyelengga-raan pameran produk PUD	
Apresiasi prestasi inovasi	• Terlaksanakan lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksanakan lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksanakan lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksanakan lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksanakan lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi UMKM.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.		Inisiasi pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembangan PUD garam	Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendataan teknologi dan kearifan lokal dalam pengembangan PUD garam		
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD		• kajian/penelitian terkait PUD garam (identifikasi faktor-faktor produksi) • Inovasi	kajian/penelitian terkait PUD garam (penguatan kelembagaan)	kajian/penelitian terkait PUD garam (pengembangan pemasaran produknya)	

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		cara meningkatkan kuantitas dan kualitas garam			
Penyelenggara-an pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	inisiasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Evaluasi terhadap klaster inovasi berbasis PUD
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Upaya peningkatan kualitas PUD garam dengan penggunaan teknologi geo membran	Upaya peningkatan kualitas PUD garam dengan penggunaan teknologi geo membran	Upaya peningkatan kualitas PUD garam dengan penggunaan teknologi geo membran	Upaya peningkatan kualitas PUD garam dengan penggunaan teknologi geo membran	Upaya peningkatan kualitas PUD garam dengan penggunaan teknologi geo membran
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	• Standari-sasi Produk garam Kab Pati dapat masuk ke industri • Titrasi rutin pada IKM	Standarisasi Produk garam Kab. Pati dapat masuk ke industri	Standarisa-si Produk garam Kab Pati dapat masuk ke industri	Standarisasi Produk garam Kab Pati dapat masuk ke industri	Standarisasi Produk garam Kab Pati dapat masuk ke industri
Penguatan kerjasama internasional/ nasional	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah

Tabel 6.5. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah
Produk Unggulan Daerah Nila Salin

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Produk Unggulan Kelautan dan Perikanan (Garam dan Nila Salin)					
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Perumusan kebijakan pengem-bangan produk nila salin (perda atau perbup tentang tata kelola PUD nila salin)	Implementasi terhadap kebijakan pengembang-an produk nila salin (perda atau perbup tentang tata kelola PUD nila salin)	Implementa si terhadap kebijakan pengem-bangan produk nila salin (perda atau perbup tentang tata kelola PUD nila salin)	Implementasi terhadap kebijakan pengembang-an produk nila salin (perda atau perbup tentang tata kelola PUD nila salin)	Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembang-an produk nila salin (perda atau perbup tentang tata kelola PUD nila salin)
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Penggunaan dan pengemban gan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerpan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Penyediaan infrastruk-tur peralatan produksi nila salin	perbaikan jalan diarea produksi nila salin	perbaikan jalan diarea produksi nila salin	Revitalisasi pasar pragola	Evaluasi terhadap kegiatan penyediaan sarana dan prasarana terkait PUD nila salin
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan	Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Perumusan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan	Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait PUD Sektor kelautan dan perikanan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Inisiasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD nila salin	Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD nila salin	Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD nila salin	Implentasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD nila salin	Evaluasi kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi (MOU) untuk pengembangan PUD nila salin
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	• Pengembangan infrastruktur (listrik, irigasi, jalan) • Peningkatan kapasitas produksi • Pengembangan siste Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pendampingan dan pelatihan serta lebih mendayagunakan forum mulyo • Peningkatan akses permodalan bagi kelompok dan koperasim pemasaran	• Peningkatan teknis berbudidaya • Peningkatan nilai tambah produksi dengan pengayaan hasil produksi • Penguatan kapasitas koperasi budidaya nila salin demi memperkuat daya tawar, pemenuhan kebutuhan sarana produksi dan akses pembiayaan • Peningkatan teknis berbudidaya dengan pemberian pelatihan teknis berbudidaya yang efisien	• Sertifikasi kualitas • membangun bisnis terpadu yang berkaitan dengan budidaya nila salin untuk mendukung pertumbuhan budidaya nila salin • Pelatihan penyusunan rencana bisnis • pengembangan jaringan dengan dunia bisnis dan produsen pakan dan sarana produksi lainnya	• Inovasi teknologi untuk efesiensi produksi • Promosi dan pemasaran • pelatihan bagi kelompok dan koperasi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.	• Penyelarasan budidaya dengan lingkungan hidup sehingga dapat berlangsung berkelanjutan • Pengembangan agrowisata berbasis pendidikan • Meningkatkan peran kelembagaan dalam pengembangan agrowisata dan edukasi terkait budidaya ikan nila salin • Mendorong kelompok dalam menerapkan sistem budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim • Meningkatkan nilai tambah produk olahan nila

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
					salin melalui pengembangan produk turunan dan diversifikasi pasar
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi					
Penguatan kemitraan antar lembaga	• Mengaktifkan kembali forum mulyo • Bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan akses terhadap teknologi budidaya yang tepat guna • Bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk mengembangkan SDM, teknologi, manajen, pemasaran • Bekerjasama dengan lembaga penelitian untuk mengembangkan benih nila salin unggul yang	• mendayagunakan kembali forum mulyo • Bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan akses terhadap teknologi budidaya yang tepat guna • Bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk mengembangkan SDM, teknologi, manajemen, pemasaran	• mendayagunakan kembali forum mulyo • Bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan akses terhadap teknologi budidaya yang tepat guna • Bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk mengembangkan SDM, teknologi, manajen, pemasaran • Bekerjasama dengan instansi pemangku kepariwisataan baik pusat maupun daerah dalam mengem-	• Mendayagunakan kembali forum mulyo • Bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan akses terhadap teknologi budidaya yang tepat guna • Bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk mengembangkan SDM, teknologi, manajen, pemasaran • Bekerjasama dengan instansi pemangku kepariwisataan baik pusat maupun daerah dalam mengembangkan agro wisata • Bekerjasama dengan lembaga riset dan pengembangan untuk mengembang	• mendayagunakan kembali forum mulyo • Bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan akses terhadap teknologi budidaya yang tepat guna • Bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk mengembangkan SDM, teknologi, manajen, pemasaran • Bekerjasama dengan instansi pemangku kepariwisataan baik pusat maupun daerah dalam mengembangkan agro wisata • Mendukung pengembangan jaringan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	tahan penyakit, tumbuh cepat, dan memiliki kualitas daging yang baik		bangkan agro wisata	kan produk-produk olahan nila salin yang inovatif	informasi dan komunikasi global untuk pembudidaya nila salin. • Membangun jaringan dengan lembaga penelitian, universitas, dan perusahaan teknologi dalam pengembangan budidaya nila salin dengan teknologi yang up to date
Peningkatan difusi inovasi;	Pengoptimalan kinerja KUB dan BBI (pengelolaan dan pemanfaatan sesuai fungsinya)	Pengoptimalan kinerja KUB dan BBI (pengelolaan dan pemanfaatan sesuai fungsinya)	Pengoptimalan kinerja KUB dan BBI (pengelolaan dan pemanfaatan sesuai fungsinya)	Pengoptimalan kinerja KUB dan BBI (pengelolaan dan pemanfaatan sesuai fungsinya)	Pengoptimalan kinerja KUB dan BBI (pengelolaan dan pemanfaatan sesuai fungsinya)
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan Perikanan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan Perikanan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan Perikanan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan Perikanan	Diseminasi hasil riset dan inovasi PUD Sektor Kelautan dan Perikanan
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi					
Promosi dan kampanye inovasi;	• Verifikasi, dan evaluasi untuk menilai kemampuan SDM pembudidaya ikan nila salin • Memberikan pelatihan	• Mengadakan pelatihan lanjutan dalam manajemen bisnis untuk pembudidaya yang ingin mengembangkan	• Memberikan pelatihan tentang adaptasi budidaya ikan nila salin terhadap perubahan iklim, teknologi informasi	• Mengadakan pelatihan budidaya ikan berbasis riset serta inovasi, bisnis berkelanjutan dan ramah lingkungan,	• Memberikan pelatihan tentang budidaya ikan nila salin dengan sistem budidaya cerdas, pengembangan bisnis

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	tentang manaje-men usaha dan keuangan untuk pembudi-daya, pemasar-an, promosi, akses permodal-an dan peluang usaha. • Memfasili-tasi akses informasi teknologi budidaya nila salin • Tersusun nya kajian tentang dampak budidaya nila salin terhadap lingkung-an • Tersusun nya kajian tentang strategi mitigasi untuk meminima lkan dampak negatif budidaya nila salin terhadap lingkung-an • Menerapk an teknologi Internet untuk meman-tau kondisi air, pakan, dan kesehatan ikan	usaha mereka secara ekonomis dan berkelanjut an. • Memberika n pelatihan tentang pengemban gan strategi bisnis, rencana usaha, analisis pasar, peluang pasar membangu n jaringan dan kemitraan • Tersusun-nya kajian tentang budidaya nila salin yang berkelanjut an dan ramah lingkungan • Tersusun-nya kajian tentang teknologi budidaya nila salin yang tepat guna, inovatif dan efisien • Tersusun-nya kajian tentang penangan-an dan pengolahan pasca panen nila salin • Identifikasi peluang pasar produk nila salin di dalam negeri dan luar negeri	terkini, bisnis digital, akses permodal-an, pengemba ngan bisnis, manajeme n risiko dan mitigasi krisis • Idenfikasi peluang pasar produk nila salin di dalam negeri dan luar negeri • Tersusun nya kajian tentang aspek sosial ekonomi budidaya nila salin • Menerap-kan teknologi artificial intelligen-ce untuk menganali sis data budidaya nila salin dan memberi-kan rekomend asi yang tepat kepada pembudi-daya • Memba-ngun jaringan pemasar-an produk nila salin ke pasar lokal, nasional, dan internasio	pelatihan akses pasar internasion al, kepemimpi nan yang visioner, komonikasi yang efektif • Mengidenti-fikasi kebijakan yang mendukung dan mengham-bat pengemba-ngan budidaya nila salin • Mengem-bangkan sistem budidaya nila salin yang berkelanjut an dan ramah lingkungan • Mengem-bangkan teknologi budidaya nila salin yang sesuai dengan kondisi lokal di Kabupaten Pati • Menerap-kan teknologi untuk memberday akan pembudida ya nila salin dalam mengakses permodalan dan pasar • Menerap-kan praktik budidaya nila salin yang ramah lingkungan	berbasis AI, kepemimpi nan global, komonikasi antar negara • Tersusun-nya kajian tentang dampak lingkungan budidaya nila salin terhadap perubahan iklim • Pemantau dan evaluasi perkem-bangan teknologi terbaru yang dapat diterapkan dalam budidaya nila salin • Inovasi cara pengema-san produk nila salin • Inovasi Produk olahan dan turunan nila salin

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		• Menerapkan teknologi rekayasa genetik untuk mengembangkan nila salin yang tahan penyakit dan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat • Mengembangkan produk olahan nila salin yang inovatif dan bernilai tambah tinggi • Mengembangkan kawasan agrowisata budidaya nila salin untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan pembudidaya	nal • Melaksanakan pelatihan dan penyuluhan tentang inovasi budidaya nila salin kepada pembudidaya		
Apresiasi prestasi inovasi	• Terlaksananya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksananya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksananya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksananya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksananya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan pemasaran digital bagi UMKM.	• Pameran Produk UMKM • Pelatihan bagi UMKM.
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan kajian penyusunan PUD	implementasi hasil kajian PUD	implementasi hasil kajian PUD	implementasi hasil kajian PUD	Evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kajian PUD
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	kajian/penelitian terkait PUD sektor kelautan dan perikanan	kajian/penelitian terkait PUD sektor kelautan dan perikanan	kajian/penelitian terkait PUD sektor kelautan dan perikanan	kajian/penelitian terkait PUD sektor kelautan dan perikanan	kajian/penelitian terkait PUD sektor kelautan dan perikanan
Penyelenggara-an pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	inisiasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Implementasi pembentukan klaster inovasi berbasis PUD	Evaluasi terhadap klaster inovasi berbasis PUD
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Upaya peningkatan produktivi-tas PUD sektor kelautan dan perikanan	Upaya peningkatan produktivitas PUD sektor kelautan dan perikanan	Upaya peningkatan produktivi-tas PUD sektor kelautan dan perikanan	Upaya peningkatan produktivitas PUD sektor kelautan dan perikanan	Upaya peningkatan produktivitas PUD sektor kelautan dan perikanan
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Standarisasi Produk nila salin Kab Pati dapat masuk ke industri	Standarisasi Produk nila salin Kab Pati dapat masuk ke industri	Standarisasi Produk nila salin Kab Pati dapat masuk ke industri	Standarisasi Produk nila salin Kab Pati dapat masuk ke industri	Standarisasi Produk nila salin Kab Pati dapat masuk ke industri

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Penguatan kerjasama internasional/ nasional	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah

Tabel 6.6. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah
Isu Permasalahan SDM yang Berdaya Saing

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Isu permasalahan I: SDM yang berdaya saing					
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Perumusan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan daya saing SDM	Implementasi terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan daya saing SDM	Implementasi terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan daya saing SDM	Implementasi terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan daya saing SDM	Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan daya saing SDM
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Penggunaan dan pengembangan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerpan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Perumusan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah-an daya saing SDM	Penerapan kebijakan peningkatan infrastruk-tur riset dan inovasi terkait isu permasalah an daya saing SDM	Penerapan kebijakan peningkatan infrastruk-tur riset dan inovasi terkait isu permasalah an daya saing SDM	Penerapan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalaha n daya saing SDM	Evaluasi terhadap penerapan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah-an daya saing SDM

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah-an daya saing SDM	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah an daya saing SDM	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah an daya saing SDM	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah-an daya saing SDM	Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalaha n daya saing SDM
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Perumusan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah-an daya saing SDM	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah an daya saing SDM	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah an daya saing SDM	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah-an daya saing SDM	Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait isu permasalah-an daya saing SDM
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	• Kajian/pen elitian tentang Efektivitas Penurunan Kemiskinan • Kajian/pe-nelitian tentang Penurunan kasus stunting	• Kajian/pe nelitian tentang Ketercu-kupan Pangan Bagi Masyara-kat • Kajian/pe nelitian tentang Penurun-an kasus kematian ibu	Kajian/pene litian terkait Peningkatan partisipasi sekolah	Implementasi hasil kajian/peneli tian	Evaluasi terhadap hasil kajian/riset
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah-an daya saing SDM	Penyediaan infrastruk-tur pendukung kajian/pene litian terkait permasalah an daya saing SDM	Penyediaan infrastruk-tur pendukung kajian/pene litian terkait permasalah an daya saing SDM	Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah-an daya saing SDM	Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah-an daya saing SDM
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi					
Penguatan kemitraan antar lembaga	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan,	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan,	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan,	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan,	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan,

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	NGO, Swasta)	NGO, Swasta)	NGO, Swasta)	NGO, Swasta)	NGO, Swasta)
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah-an daya saing SDM	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah an daya saing SDM	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah an daya saing SDM	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah-an daya saing SDM	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah-an daya saing SDM
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi					
Promosi dan kampanye inovasi;	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah
Apresiasi prestasi inovasi	• Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyara-kat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyara-kat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyara-kat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyara-kat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah-an daya saing SDM	implementa si hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah an daya saing SDM	implementa si hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah an daya saing SDM	implementasi hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah-an daya saing SDM	Evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah-an daya saing SDM
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi	kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah-an daya saing SDM	kajian/pene litian terkait penanganan isu permasalah an daya saing SDM	kajian/pene litian terkait penanganan isu permasalah an daya saing SDM	kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah-an daya saing SDM	kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah-an daya saing SDM

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
permasalahan					
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Upaya penanganan isu permasalah-an daya saing SDM	Upaya penanganan isu permasalah an daya saing SDM	Upaya penanganan isu permasalah an daya saing SDM	Upaya penanganan isu permasalah-an daya saing SDM	Upaya penanganan isu permasalah-an daya saing SDM
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Pengembang-an ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah-an daya saing SDM	Pengem-bangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah an daya saing SDM	Pengem-bangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah an daya saing SDM	Pengembang-an ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah-an daya saing SDM	Pengembang-an ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah-an daya saing SDM
Penguatan kerjasama internasional/ nasional	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah

Tabel 6.7. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah
Isu Permasalahan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Isu permasalahan II: Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan					
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Perumusan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan pembangun-an inklusif dan	Implementa si terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan pembangun an inklusif	Implementa si terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan pembangun an inklusif	Implementasi terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan pembangun-an inklusif	Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan pembangun-

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	berkelanjut-an	dan berkelanjut an	dan berkelanjut an	dan berkelanjut-an	an inklusif dan berkelanjut-an
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Penggunaan dan pengembang-an Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerpan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Perumusan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah-an pembanguna n inklusif dan berkelanjut-an	Penerapan kebijakan peningkatan infrastruk-tur riset dan inovasi terkait isu permasalah an pembangun an inklusif dan berkelanjut an	Penerapan kebijakan peningkatan infrastruk-tur riset dan inovasi terkait isu permasalah an pembangun an inklusif dan berkelanjut an	Penerapan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah-an pembangun-an inklusif dan berkelanjut-an	Evaluasi terhadap penerapan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah-an pembangun-an inklusif dan berkelanjut-an
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah-an pembangun-an yang inklusif dan berkelanjut-an	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah-an pembangun-an yang inklusif dan berkelanjut-an	Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah-an pembangun-an yang inklusif dan berkelanjut-an
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Perumusan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah-an pembangun-an yang inklusif dan berkelanjut-an	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah-an pembangun-an yang inklusif dan berkelanjut-an	Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait isu permasalah-an pembangun-an yang inklusif dan berkelanjut-an

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Kajian/penelitian terkait Optimalisasi PAD	• Kajian/ penelitian terkait Eksistensi Pengangguran Terbuka Daerah • Kajian/ penelitian terkait resiko bencana daerah	• Kajian/ penelitian terkait Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan • Kajian/ penelitian terkait Peningkatan Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat	• Kajian/penelitian terkait Pengelolaan lingkungan hidup • Kajian/penelitian terkait Peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat	• Kajian/penelitian terkait Pemetaan jalan kabupaten prioritas • kajian/penelitian terkait Penyediaan Air Siap Minum Perpipaan di Wilayah Perkotaan • kajian/penelitian terkait Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/penelitian terkait permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/penelitian terkait permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/penelitian terkait permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/penelitian terkait permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/penelitian terkait permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi					
Penguatan kemitraan antar lembaga	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta)	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta)	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta)	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta)	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta)
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalahan	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalahan	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalahan	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalahan	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalahan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
pelaku inovasi.	pembangun-an yang inklusif dan berkelanjut-an	pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an	pembangun an yang inklusif dan berkelanjut an	pembangun-an yang inklusif dan berkelanjut-an	pembangun-an yang inklusif dan berkelanjut-an
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi					
Promosi dan kampanye inovasi;	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah
Apresiasi prestasi inovasi	• Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyara-kat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyara-kat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyara-kat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyara-kat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah-an Pembangun-an Yang Inklusif & Berkelanjut-an	implementa si hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & Berkelanjut an	implementa si hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & Berkelanjut an	implementasi hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah-an Pembangun-an Yang Inklusif & Berkelanjut-an	Evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah-an Pembangun-an Yang Inklusif & Berkelanjut-an
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi	kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah-an Pembangun-an Yang Inklusif &	kajian/pene litian terkait penanganan isu permasalah an Pembangun an Yang Inklusif &	kajian/pene litian terkait penanganan isu permasalah an Pembangun an Yang Inklusif &	kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah-an Pembangun-an Yang Inklusif &	kajian/peneli tian terkait penanganan isu permasalah-an Pembangun-an Yang Inklusif &

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
permasalahan	Berkelanjut-an	Berkelanjut an	Berkelanjut an	Berkelanjuta n	Berkelanjut-an
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Upaya penanganan isu permasalah-an Pembangun-an Yang Inklusif & Berkelanjut-an	Upaya penanganan isu permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & Berkelanjut an	Upaya penanganan isu permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & Berkelanjut an	Upaya penanganan isu permasalah-an Pembangun-an Yang Inklusif & Berkelanjut-an	Upaya penanganan isu permasalah-an Pembangun-an Yang Inklusif & Berkelanjut-an
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah+A23:I23	Pengembanga n ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah-an Pembangun-an Yang Inklusif & Berkelanjut-an	Pengemban gan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & Berkelanjut an	Pengemban gan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah an Pembangun an Yang Inklusif & Berkelanjut an	Pengembanga n ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah-an Pembangun-an Yang Inklusif & Berkelanjut-an	Pengembanga n ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah-an Pembangun-an Yang Inklusif & Berkelanjut-an
Penguatan kerjasama internasional/n asional	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah

Tabel 6.8. Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah
Isu Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Adaptif

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Isu permasalahan III: Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif					
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Perumusan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintah-an yang berkualitas dan adaptif	Implementasi terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif	Implementasi terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif	Implementasi terhadap kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintah-an yang berkualitas dan adaptif	Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan (perda atau perbup tentang penerapan *evidance based policy*) yang mendukung peningkatan tata kelola pemerintah-an yang berkualitas dan adaptif
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Penggunaan dan pengembang-an Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah	Evaluasi terhadap penerapan Database Sistem Informasi Iptek Daerah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Perumusan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah-an tata kelola pemerintah-an yang berkualitas dan adaptif	Penerapan kebijakan peningkatan infrastruk-tur riset dan inovasi terkait isu permasalah an tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif	Penerapan kebijakan peningkatan infrastruk-tur riset dan inovasi terkait isu permasalah an tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif	Penerapan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah-an tata kelola pemerintah-an yang berkualitas dan adaptif	Evaluasi terhadap penerapan kebijakan peningkatan infrastruktur riset dan inovasi terkait isu permasalah-an tata kelola pemerintah-an yang berkualitas dan adaptif
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;	Perumusan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah-an tata kelola pemerintah-an yang	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah an tata kelola pemerintah	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah an tata kelola pemerintah	Penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah-an tata kelola pemerintah-an yang	Evaluasi terhadap penerapan kebijakan penyediaan anggaran riset dan inovasi terkait isu permasalah-an tata kelola

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	berkualitas dan adaptif	an yang berkualitas dan adaptif	an yang berkualitas dan adaptif	berkualitas dan adaptif	pemerintah-an yang berkualitas dan adaptif
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Perumusan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah-an tata kelola pemerintah-an yang berkualitas dan adaptif	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah an tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah an tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif	Penerapan kebijakan penerapan KI terkait isu permasalah-an tata kelola pemerintah-an yang berkualitas dan adaptif	Evaluasi terhadap penerapan KI riset dan inovasi terkait isu permasalah-an tata kelola pemerintah-an yang berkualitas dan adaptif
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;					• Kajian/pe nelitian terkait Implement asi Reformasi Birokrasi • Kajian/pe nelitian terkait Optimalis asi Pelayanan Publik yang Berkuali-tas
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah-an tata kelola pemerintah-an yang berkualitas dan adaptif	Penyediaan infrastruk-tur pendukung kajian/pene litian terkait permasalah an tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif	Penyediaan infrastruk-tur pendukung kajian/pene litian terkait permasalah an tata kelola pemerintah an yang berkualitas dan adaptif	Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah-an tata kelola pemerintah-an yang berkualitas dan adaptif	Penyediaan infrastruktur pendukung kajian/peneli tian terkait permasalah-an tata kelola pemerintah-an yang berkualitas dan adaptif
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi					
Penguatan kemitraan antar lembaga	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta)	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan,	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan,	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta)	kerjasama/ kolaborasi antar lembaga riset (Akademisi, Konsultan, NGO, Swasta)

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		NGO, Swasta)	NGO, Swasta)		
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas & Adaptif	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah an pembangun an yang inklusif dan berkelanjut anTata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas & Adaptif	Diseminasi hasil riset dan inovasi terkait isu permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas & Adaptif
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi					
Promosi dan kampanye inovasi;	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah	Promosi penerapan dan budaya berinovasi daerah
Apresiasi prestasi inovasi	• Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyara-kat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyara-kat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksan anya lomba inovasi kategori masyara-kat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyarakat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional	• Terlaksana nya lomba inovasi kategori masyara-kat dan OPD • Fasilitasi lomba inovasi untuk mengikuti lomba inovasi pada level Provinsi dan Nasional
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Updating data dan kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas &	implementa si hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang	implementa si hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang	implementasi hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas &	Evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kajian terkait dengan upaya penanganan isu permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Adaptif	Berkualitas & Adaptif	Berkualitas & Adaptif	Adaptif	an Yang Berkualitas & Adaptif
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan	kajian/penelitian terkait penanganan isu permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas & Adaptif	kajian/penelitian terkait penanganan isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif	kajian/penelitian terkait penanganan isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif	kajian/penelitian terkait penanganan isu permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas & Adaptif	kajian/penelitian terkait penanganan isu permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas & Adaptif
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Upaya penanganan isu permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas & Adaptif	Upaya penanganan isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif	Upaya penanganan isu permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif	Upaya penanganan isu permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas & Adaptif	Upaya penanganan isu permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas & Adaptif
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas & Adaptif	Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif	Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah an Tata Kelola Pemerintah an Yang Berkualitas & Adaptif	Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas & Adaptif	Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalah-an Tata Kelola Pemerintah-an Yang Berkualitas & Adaptif
Penguatan kerjasama internasional/nasional	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah	Kerjasama dengan lembaga riset dan inovasi dalam luar daerah

BAB VII RENCANA AKSI TAHUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Sasaran strategis yang termuat dalam peta jalan pengembangan produk unggulan daerah dan penyelesaian isu permasalahan daerah disesuaikan dengan penguatan ekosistem riset dan inovasi, maka disusunlah serangkaian program dalam jangka waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2025-2009.

Program penguatan ekosistem riset dan inovasi disandingkan dengan kegiatan dalam RPJMD/Renstra yang telah disusun oleh masing-masing perangkat daerah terkait. Pencapaian target pembangunan disesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah sehingga dapat dialokasikan dana melalui APBD sesuai tahun perencanaannya, serta memiliki perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program/kegiatan yang disusun.

Tabel 7.1. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah
Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Produk Unggulan Daerah Ubi Kayu									
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah									
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;			1 kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (ubi kayu)	Distan
Penataan basis data Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Distan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								produksi ubi kayu, pengolahan (ubi kayu menjadi tepung tapioka) dan pemasaran produk ubi kayu, serta turunannya di Kabupaten Pati	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	Distan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								Komunal (KIK)	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi									
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;			1 laporan	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar-benar unggul	Distan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.			1 demplot varietas baru ubi kayu	1 demplot varietas baru ubi kayu	1 demplot varietas baru ubi kayu	1 demplot varietas baru ubi kayu	1 demplot varietas baru ubi kayu	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								yang inovatif dan berkelanjutan.	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi									
Penguatan kemitraan antar lembaga				1 laporan	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian	Distan
Peningkatan difusi inovasi;			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing.	Distan
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi									
Promosi dan kampanye inovasi;			1 inovasi	• 1 kajian • 1 inovasi	• 1 kajian • 1 laporan evaluasi • 1 inovasi	• 1 laporan evaluasi • 1 inovasi	1 inovasi	• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD ubi	Bapperida Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								kayu • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya untuk PUD ubi kayu	
Apresiasi prestasi inovasi			• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan	Bapperida Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset			• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	Bapperida Distan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.			1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Data dan informasi terkini (updating) tersedia	Bapperida Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah									
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD			1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan	Bapperida Distan
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah			1 kegiatan	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif	Disdagperin Distan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Daerah								dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian.	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global									
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah				1 kegiatan		1 kegiatan		Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD ubi kayu)	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Penguatan kerjasama internasional/nasional			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Bapperida Distan
Program Riset dan Inovasi Daerah	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana pertanian oleh petani	25%	26,26	26,91	27,58	28,26		Bapperida Distan
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luasan lahan yang ditetapkan menjadi LP2B	91	91	91	91	91		

Tabel 7.2. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah
Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Produk Unggulan Daerah Kelapa Kopyor									
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah									
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;			1 kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (Kelapa kopyor)	Distan
Penataan basis data Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi kepala kopyor, pemasaran dan pengolahan produk turunan kepala kopyor di Kabupaten Pati	Distan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	Distan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								Intelektual Komunal (KIK)	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi									
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;			1 laporan	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar-benar unggul	Distan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.			benih kultur embrio 180 batang	benih kultur embrio 180 batang	benih kultur embrio 240 batang	benih kultur embrio 240 batang	benih kultur embrio 300 batang	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi									
Penguatan kemitraan antar lembaga			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian	Distan
Peningkatan difusi inovasi;			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								pasar lebih luas hingga masuk ke industri	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD kelapa kopyor yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing	Distan
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi									
Promosi dan kampanye inovasi;			1 laporan kegiatan	• 1 kajian • 1 inovasi	• 1 laporan kegiatan • 1 inovasi	• 1 laporan kegiatan • 1 inovasi	• laporan kegiatan • 1 kajian • 1 inovasi	• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya	Bapperida Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								untuk PUD kelapa kopyor • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya untuk PUD pertanian	
Apresiasi prestasi inovasi			• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan	Bapperida Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset			• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	Bapperida Distan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.			1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Data dan informasi terkini (updating) tersedia	Bapperida Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah									
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD			1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor pertanian dan perkebunan	Bapperida Distan
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah			1 kegiatan	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif	Disdagperin Distan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah								pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha pertanian.	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global									
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah					1 kegiatan			Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD kelapa kopyor)	Distan
Penguatan kerjasama internasional/nasional			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka	Bapperida Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	
Program Riset dan Inovasi Daerah	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana pertanian oleh petani	25%	26,26	26,91	27,58	28,26		Bapperida Distan
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luasan lahan yang ditetapkan menjadi LP2B	91	91	91	91	91		

Tabel 7.3. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah
Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Produk Unggulan Daerah Jeruk Pamelo									
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah									
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;			1 kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan (Jeruk Pamelo)	Distan
Penataan basis data Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;					1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan produksi (ubi kayu, kepala kopyor dan jeruk pamelo), pengolahan (ubi kayu menjadi tepung tapioka) dan pemasaran (jeruk pamelo) di Kabupaten Pati	Distan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	Distan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi									
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;					1 laporan kegiatan	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis di tingkat petani agar memiliki PUD sektor pertanian menjadi benar-benar unggul	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan	Distan
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi									
Penguatan kemitraan antar lembaga			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha,	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor pertanian	
Peningkatan difusi inovasi;			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	Distan
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor pertanian dan perkebunan (Jeruk pamelo) yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								daya saing.	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi									
Promosi dan kampanye inovasi;				1 laporan kegiatan		1 laporan kegiatan		• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan khususnya untuk PUD pertanian (jeruk pamelo) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor pertanian dan perkebunan/ munculnya petani-petani millenial khususnya	Bapperida Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								untuk PUD pertanian (jeruk pamelo)	
Apresiasi prestasi inovasi			• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor sektor pertanian dan perkebunan	Bapperida Distan
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset			• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta	Bapperida Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.			1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Data dan informasi terkini (updating) tersedia	Bapperida Distan
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah									
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD						1 kajian	1 kajian	Daya saing PUD sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk	Bapperida Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								PUD sektor pertanian dan perkebunan	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah			1 kegiatan	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif	Disdagperin Distan
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Penyelarasan antara program/kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program/kegiatan pertanian yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha	Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								pertanian.	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global									
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah				1 kegiatan		1 kegiatan		Peningkatan kualitasproduk produk pertanian dan perkebunan (khusus PUD jeruk pamelo)	Distan
Penguatan kerjasama internasional/nasional			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor pertanian dan perkebunan	Bapperida Distan
Program Riset dan Inovasi Daerah	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana pertanian oleh petani	25%	26,26	26,91	27,58	28,26		Bapperida Distan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luasan lahan yang ditetapkan menjadi LP2B	91	91	91	91	91		

Tabel 7.4. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah
Produk Unggulan Daerah Garam

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Produk Unggulan Daerah Garam									
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah									
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;			1 kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan PUD garam	DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Penataan basis data Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	DKP
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan evaluasi	Tersedia Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk garam di Kabupaten Pati	DKP
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan	DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								efisien.	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	DKP
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi									
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan				1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk	DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
pemangku kepentingan;								meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis agar menjadi memiliki produk kelautan perikanan yang unggul	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.			2 laporan kegiatan	2 laporan kegiatan	2 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan	DKP
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi									

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Penguatan kemitraan antar lembaga			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor kelautan perikanan	DKP
Peningkatan difusi inovasi;			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	DKP
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD	DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								sektor kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing.	
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi									
Promosi dan kampanye inovasi;				1 laporan kegiatan		1 laporan kegiatan		• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan	Bapperida DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								perikanan (garam) • Penumbuhan pengusaha baru di sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (garam)	
Apresiasi prestasi inovasi			• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor kelautan dan perikanan	Bapperida DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset			• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	Bapperida DKP
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.			1 laporan kegiatan	1 laporan evaluasi				Data dan informasi terkini (updating) tersedia	Bapperida DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah									
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD				1 kajian	1 kajian	1 kajian		Daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk PUD sektor kelautan dan perikanan	Bapperida DKP
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah			1 kegiatan	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang	Disdagperin DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								kompetitif	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Penyelarasan antara program / kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program / kegiatan keluatan perikanan yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku usaha kelautan perikanan	DKP
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global									
Peningkatan kepedulian isu			2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Peningkatan kualitas	DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah								produk kelautan perikanan (PUD garam)	
Penguatan kerjasama internasional/nasional			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan	Bapperida DKP
Program Riset dan Inovasi Daerah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi Perikanan budidaya dan garam	371.668,-	372.441,-	372.874,-	372.998,-	373.441,-		Bapperida DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		47,74	47,85	47,95	48,06	48,24		

Tabel 7.5. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah
Produk Unggulan Daerah Nila Salin

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Produk Unggulan Daerah Nila Salin									
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah									
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;			1 kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Tersusunnya kebijakan yang memuat rencana aksi tahunan yang berisi strategi dan indikator pengembangan	DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								PUD nila salin	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	DKP
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan evaluasi	Tersedia infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk nila salin di Kabupaten Pati	DKP
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	DKP
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Peningkatan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam	DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
intelektual.								bentuk hak cipta, paten, merek, potensi indikasi geografis, indikasi geografis dan kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi									
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;			1 kegiatan	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Berkembangnya kelembagaan riset dan inovasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan bisnis agar menjadi memiliki produk kelautan perikanan yang unggul	DKP
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.			4 laporan kegiatan	4 laporan kegiatan	4 laporan kegiatan	3 laporan kegiatan	5 laporan kegiatan	Tersedianya demplot/desa percontohan yang representatif dan beragam, Pendanaan untuk pengembangan demplot telah mencukupi untuk	DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								melakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi									
Penguatan kemitraan antar lembaga			4 laporan kegiatan	3 laporan kegiatan	4 laporan kegiatan	5 laporan kegiatan	6 laporan kegiatan	Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam sektor kelautan perikanan	DKP
Peningkatan difusi inovasi;			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Kualitas dan produk hasil pengolahan meningkat dan dapat menjangkau pasar lebih luas hingga masuk ke industri	DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Terwujudnya sistem sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset PUD sektor kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing.	DKP
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi									
Promosi dan kampanye inovasi;			•4 laporan kegiatan •2 kajian	• 6 laporan kegiatan • 2 kajian	• 5 laporan kegiatan • 1 kajian	6 laporan kegiatan	•2 laporan kegiatan •1 kajian	• Meningkatnya budaya pengkajian/penelitian, kreatif dan inovatif masyarakat dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (nila salin)	Bapperida DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								• Penumbuhan pengusaha baru di sektor kelautan perikanan, khususnya PUD kelautan perikanan (nila salin)	
Apresiasi prestasi inovasi			• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah dalam penciptaan inovasi baru untuk PUD sektor kelautan dan perikanan	Bapperida DKP
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset			• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	• 1 pameran • 1 pelatihan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) bukan saja meningkatkan kelas wirausaha baru namun juga	Bapperida DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								dapat menghasilkan wirausaha yang berbasis riset dan inovasi, serta meningkatkan kemitraan UMKM dengan lembaga riset dan inovasi.	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.			1 laporan kegiatan	1 laporan evaluasi				Data dan informasi terkini (updating) tersedia	Bapperida DKP
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah									
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD			1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	Daya saing PUD sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati semakin meningkat di tingkat nasional dan internasional. Investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan	Bapperida DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								inovasi untuk PUD sektor kelautan dan perikanan	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah			1 kegiatan	1 laporan implemen-tasi	1 laporan implemen-tasi	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Produk PUD Kabupaten Pati memiliki kualitas yang baik, jangkauan pemasaran yang luas, dan harganya yang kompetitif	Disdagperin DKP
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Penyelarasan antara program / kegiatan pertanian dari pemerintah pusat dengan program / kegiatan keluatan perikanan yang dilakukan oleh daerah, agar memberikan hasil panen yang optimal dan dapat memberikan pembelajaran bagi	DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								pelaku usaha kelautan perikanan	
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global									
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Peningkatan kualitasproduk kelautan perikanan (PUD nila salin)	DKP
Penguatan kerjasama internasional/nasional			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kerjasama nasional berkelanjutan dan tepat sasaran dalam rangka pengembangan PUD sektor kelautan dan perikanan	Bapperida DKP

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Program Riset dan Inovasi Daerah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi Perikanan budidaya dan garam	371.668,-	372.441,-	372.874,-	372.998,-	373.441,-		Bapperida DKP
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		47,74	47,85	47,95	48,06	48,24		

Tabel 7.6. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah
Isu Permasalahan SDM yang Berdaya Saing

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Isu Permasalahan SDM yang Berdaya Saing									
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah									
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;			1 kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Tersedianya kebijakan sebagai upaya menyelesaikan isu permasalahan daya saing SDM	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud
Penataan basis data Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan evaluasi	Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi									
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;			1 kajian	2 kajian	2 kajian	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Tersedianya kebijakan sebagai upaya menyelesaikan isu permasalahan daya saing SDM	Bapperida Setda Dispermades Dinsos Din ketapang DKK Disdikbud

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi									
Penguatan kemitraan antar lembaga			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	• Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi									
Promosi dan kampanye inovasi;			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	SDM yang berkualitas dan berdaya saing, serta memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam penggunaan teknologi, dapat dioptimalkan	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								kreatifitasnya untuk pembangunan daerah	
Apresiasi prestasi inovasi			• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan daya saing SDM meningkat	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.			1 laporan kegiatan	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah									
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan			1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	kajian/penelitian terkait penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Bapperida Setda Dinsos Dispermades Din ketapang

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
kebutuhan daerah untuk promosi PUD									DKK Disdikbud
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Upaya penanganan isu permasalahan daya saing SDM	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global									
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan daya saing SDM	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud
Penguatan kerjasama internasional/nasional			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Terjalinnya kerjasama internasional/nasional dalam	Setda Dinsos Dispermades Din ketapang

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								penanganan isu permasalahan daya saing SDM	DKK Disdikbud
Program Riset dan Inovasi Daerah	Program Pengelolaan Pendidikan								Bapperida Setda Dinsos Dispermades Din ketapang DKK Disdikbud
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		280.598	281.308	281.308	281.308	281.308		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa	85,71	100	100	100	100		

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	100	100	100	100	100		

Tabel 7.7. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah
Isu Permasalahan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Isu Permasalahan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan									
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah									
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;			1 kebijakan	1 laporan implemen-tasi kebijakan	1 laporan implemen-tasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Tersedianya kebijakan sebagai upaya penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening
Penataan basis data Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan evaluasi	Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu permasalahan pembangunan	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								yang inklusif dan berkelanjutan	BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi									
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;			1 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	3 kajian	Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Bapperida Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
									PDAM Tirta Bening
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi									
Penguatan kemitraan antar lembaga			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	• Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								mendorong kemajuan pembangunan daerah	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada stakeholder dalam rangka penanganan isu permasalahan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi									
Promosi dan kampanye inovasi;			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan berdasarkan riset dan inovasi	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Apresiasi prestasi inovasi			• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan meningkat	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.			1 laporan kegiatan	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah									
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD			1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan meningkat	Bapperida Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global									
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening
Penguatan kerjasama internasional/nasional			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Terjalinnya kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan	Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Program Riset dan Inovasi Daerah	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	85,27	85,85	86,13	86,42	86,71		Bapperida Setda BPKAD Disnaker Disdagperin DinKopUMKM DLH DPUTR BPDP Disperkim PDAM Tirta Bening
	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat kemantapan jalan (%)	81,93	85,40	86,67	87,94	89,21		
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional (%)	8,26	12,24	14,24	16,23	18,23		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunia dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	18,78	18,99	19,12	19,26	19,39		

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	100	100	100	100	100		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	42,96	43,78	44,53	45,29	46,04		
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	49,73	54,71	57,33	59,96	62,53		
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani	4,27	4,37	4,42	4,47	4,52		

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi (%)	35,8	37	39	41	43		
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Capaian pembangunan industri (RPIK)	0,47	0,58	0,63	0,69	0,75		
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	100	100	100	100	100		

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan objek pajak daerah	5	5	5	5	5		

Tabel 7.8. Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah
Isu Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Adaptif

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Isu Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Adaptif									
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah									
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;			1 kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan implementasi kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Tersedianya kebijakan sebagai upaya penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan	Setda

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								yang berkualitas dan adaptif	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Seluruh kegiatan maupun data berkaitan dengan riset dan inovasi tercantum dalam Sistem Informasi IPTEK	Setda
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan evaluasi	Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang optimal	Setda
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi;			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Sistem pendanaan riset dan inovasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.	Setda
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan			1 kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan Penerapan kebijakan	1 laporan evaluasi kebijakan	Adanya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk penanganan isu	Setda

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
intelektual.								permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi									
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;							2 kajian	Terbentuk kolaborasi antar lembaga yang menangani isu permasalahan dengan lembaga riset dan inovasi untuk penyelesaian isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif	Bapperida Setda
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	Optimalisasi sarana pendukung riset dan inovasi untuk penanganan isu permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Setda

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								dan adaptif	
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi									
Penguatan kemitraan antar lembaga			1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	• Penerapan model kemitraan dalam riset dan inovasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat • Terjalinnya hubungan yang saling menguatkan antara pemangku kepentingan dan pemangku	Setda

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								kebijakan sehingga tercipta ekosistem riset dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan pembangunan daerah	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada *stakeholder* dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat	Setda
Elemen 4 : Budaya riset dan inovasi									
Promosi dan kampanye inovasi;			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Setda

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
								berdasarkan hasil riset dan inovasi	
Apresiasi prestasi inovasi			• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	• 1 kegiatan lomba • 1 kegiatan fasilitasi	Pemberian apresiasi terkait inovasi dalam rangka penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat	Setda
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.			1 laporan kegiatan	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan implementasi	1 laporan evaluasi	Adanya inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan upaya penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Setda

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah									
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD			1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untukpenanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif meningkat	Bapperida Setda
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Setda
Elemen 6 : Penyelarasan dengan perkembangan global									
Peningkatan kepedulian isu internasional dan nasional yang			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Dilakukan analisis/kajian secara periodik terkait kepedulian isu internasional	Setda

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah								dan nasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah terkait penanganan permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	
Penguatan kerjasama internasional/nasional			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Terjalinnya kerjasama internasional/nasional dalam penanganan isu permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif	Setda
Program Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100	100	100	100	100		Bapperida Setda

Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPJMD/ Renstra	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	100	100	100	100	100		

BAB VIII PENUTUP

8.1. Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pembangunan Daerah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan komponen penting dalam kemajuan suatu negara, karena dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hidup masyarakat pada berbagai bidang kehidupan, serta perlindungan lingkungan hidup. Landasan pembangunan IPTEK dalam Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 31 ayat ke 5 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selain itu, Sistem Informasi Nasional (SISNAS) IPTEK telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Beberapa hal mengenai pengembangan Sisnas IPTEK adalah sebagai berikut :

Pasal 6 menyatakan:

(1) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional untuk:
    a. meningkatkan kualitas hidup manusia;
    b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
    c. meningkatkan kemandirian;
    d. memajukan daya saing bangsa;
    e. memajukan peradaban bangsa;
    f. menjaga kelestarian alam;
    g. melindungi dan melestarikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    h. menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan.

(2) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan melalui Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

(3) Sistem perencanaan pembangunan. Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat {2) meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Pasal 41 (1) menyatakan:

Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

8.2. Peran BRIDA/Bapperida Dalam Pembangunan Daerah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan modal dan investasi bagi pembangunan di daerah, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangan panjang. Terkait dengan ini dalam Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dinyatakan bahwa BRIDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek untuk daerah.

Selain itu, Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tersebut dinyatakan pula bahwa pada tahap perencanaan pembangunan daerah, BRIDA berperan memberikan masukan pemajuan Iptek di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, peran dari Pemerintah Daerah melalui BRIDA adalah melaksanakan penumbuhkembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Pasal 23, ayat 1). Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sendiri adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah. Pelaksanaan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah ini juga dikoordinasikan oleh BRIDA (Pasal 23, ayat 9). Tujuan dari pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah ini adalah untuk meningkatkan daya saing daerah. Elemen-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Pasal 23, ayat 2) meliputi:

a) elemen kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah;

b) elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;

c) elemen kemitraan Riset dan Inovasi;

d) elemen budaya Riset dan Inovasi;

e) elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah;

f) elemen penyelarasan dengan perkembangan global.

8.3. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029

Sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Pati yaitu sektor pertanian. Hasil kajian dan kesepakatan bersama dalam *Focus Group Discussion* menghasilkan 5 produk unggulan daerah. Produk unggulan daerah berasal dari subsektor Pertanian perkebunan dan subsektor kelautan perikanan. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yaitu

(1) Subsektor Pertanian Perkebunan
- Ubi Kayu
- Kelapa Kopyor
- Jeruk Pamelo

(2) Subsektor Kelautan Perikanan
- Garam
- Nila Salin

8.4. Isu Permasalahan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029

Isu permasalahan daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 dibagi menjadi 3 (tiga) isu strategis yaitu

(1) Isu Strategis I : SDM Yang Berdaya Saing
- Kemiskinan
- Konsumsi Pangan
- Stunting
- Kematian Ibu
- Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun

(2) Isu Strategis II : Pembangunan Yang Inklusif & Berkelanjutan
- Pajak Daerah
- Pengangguran
- Kewirausahaan
- Pengolahan Sampah
- Kualitas Lingkungan Hidup
- Kebencanaan
- Akses Hunian Layak
- Infrastruktur Jalan
- Air Minum Perpipaan
- Infrastruktur Irigasi

(3) Isu Strategis III : Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas & Adaptif
- Reformasi Birokrasi

- Kualitas Pelayanan Publik

8.5. Integrasi Dokumen RIPJ-PID dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029

Integrasi Dokumen RIPJ-PID dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yaitu

(1) Bab II RIPJ-PID Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 terintegrasi dengan Bab II RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029;

(2) Bab II RIPJ-PID Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 terintegrasi dengan Bab IV RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029;

(3) Bab V RIPJ-PID Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 terintegrasi dengan Bab IV RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029;

(4) Bab VI RIPJ-PID Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 terintegrasi dengan Bab IV RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029;

(5) Bab VII RIPJ-PID Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 terintegrasi dengan Bab IV RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010